

**HAMBATAN GURU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM
MENGEMBANGKAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DAN
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN BERDASARKAN KURIKULUM
TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN DI SMA SE-KABUPATEN SLEMAN
WILAYAH BARAT**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan



**Disusun Oleh:
Isti Nurwidayanti
05401241033**

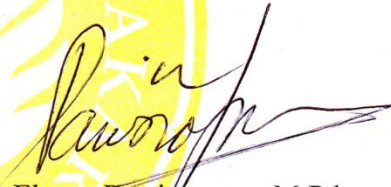
**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2012**

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul **“Hambatan Guru Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Dan Pelaksanaan Pembelajaran Berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Di SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat”** ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diujikan.

Yogyakarta, 10 September 2012





Pembimbing



Ekram Pawiroputro, M.Pd
NIP. 19480512 198003 1 002

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Hambatan Guru Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Dan Pelaksanaan Pembelajaran Berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Di SMA Se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat” ini telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 18 September 2012 dan dinyatakan lulus.

DEWAN PENGUJI			
Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Iffah Nurhayati, M. Hum	Ketua Penguji		19/09/2012
Muchson AR, M.Pd	Penguji Utama		19/09/2012
Nasiwan, M.Si	Sekretaris Penguji		19/09/2012
Ekram Pawiroputro, M.Pd	Penguji Pendamping		20/9/12

Yogyakarta, September 2012
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Yogyakarta
Dekan,



Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag.
NIP. 19620321 198903 1 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya :

Nama : Isti Nurwidayanti

NIM : 05401241033

Prodi/Jurusan : Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum (PKnH)

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial (FIS)

Menyatakan bahwa karya ilmiah yang berjudul **“Hambatan Guru Pendi Kewarganegaraan Dalam Mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Dan Pelaksanaan Pembelajaran Berdasarkan Kurikulum Tingkat S Pendidikan Di SMA Se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat”**, adalah benar karya saya sendiri, tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis oleh orar atau telah dipergunakan sebagai persyaratan penyelesaian studi di perguruan tinggi kecuali bagian-bagian tertentu yang saya ambil sebagai acuan dengan mengiku cara dan etika penulisan karya ilmiah yang lazim.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 10 September 20

Yang Menyatakan



Isti Nurwidayanti
NIM. 05401241033

MOTTO

”Lepaskanlah cita-citamu setinggi-tingginya, makin tinggi, makin baik. Harapkanlah hal yang paling bisa terjadi, bukannya nanti, melainkan sekarang. Ketahuilah tidak satu pun yang terlampau indah untuk diraih”.

(Eileen Caddy)

”Jangan sekali-kali cemas jurang yang membatasi mimpi dan kenyataan. Kalau Anda mampu memimpikannya, Anda pun bisa mewujudkannya”.

(Belva Davis)

“Jangan takut akan kegagalan, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang yang tidak pernah mencoba melangkah. Jangan takut akan salah karena kesalahan yang pertama akan menambah pengetahuan untuk mencari jalan benar pada langkah kedua”.

(HAMKA)

“Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena didalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil”.

(Mario Teguh)

“Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setelah kita terjatuh”.

(Confusius)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil‘alamin, segala puji dan syukur kepada Allah SWT, atas terselesaikannya karya sederhana ini. Karya sederhana ini akan kupersembahkan kepada:

Orang tuaku, Ayah (Suyanto) yang selalu memberikan kasih sayang dan dukungan, Ibu (Alm Qomariah) yang melahirkan dan selalu memberikan kasih sayangnya, dan Ibu (Ngatirah) yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, dan semangat.

Mbak (Yuni), Mas (Endi) dan Kakak ipar ku Mbak (Emi) yang selalu mendukung dan memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi.

Nenekku yang selalu memberikan kasih sayang.

Keluarga besar yang selalu mendukung dan mendoakan kelancaran dalam menyelesaikan tugas ini.

Almamater Universitasku tercinta.

**HAMBATAN GURU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM
MENGEMBANGKAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DAN
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN BERDASARKAN KURIKULUM
TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN DI SMA SE-KABUPATEN SLEMAN
WILAYAH BARAT**

**Oleh :
Isti Nurwidayanti
05401241033**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan guru pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran PKn berdasarkan KTSP di SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat, serta upaya yang diterapkan guru PKn dalam menghadapi hambatan-hambatan yang ada.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Subyek penelitian pada penelitian ini adalah guru-guru Pendidikan Kewarganegaraan di SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara (*interview*), observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis induktif. Sedangkan teknik pemeriksaan keabsahan data yang dipergunakan adalah teknik triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) hambatan dalam mengembangkan RPP dan pelaksanaan pembelajaran PKn yaitu faktor siswa yang meliputi karakteristik dan latar belakang yang berbeda, kondisi fisik yang lemah, kondisi ekonomi yang kurang mampu, motivasi yang rendah, dan daya pikir yang rendah. Faktor guru meliputi kurang pahami guru terhadap langkah-langkah penyusunan RPP, komponen RPP, dan materi PKn. Faktor waktu yaitu keterbatasan waktu yang tersedia, dan faktor media yaitu ketidaklengkapan media, 2) upaya dalam mengatasi hambatan dalam mengembangkan RPP dan pelaksanaan pembelajaran PKn yaitu faktor siswa yang meliputi karakteristik dan latar belakang siswa yang berbeda dengan mengembangkan RPP yang disesuaikan dengan latar belakang siswa dan menggunakan metode yang mudah dipahami siswa, untuk kondisi fisik yang lemah dengan menggunakan strategi yang menarik, untuk kondisi ekonomi dengan meminjam buku di perpustakaan, untuk motivasi yang rendah dengan menggunakan metode tanya jawab untuk memotivasi siswa, dan untuk daya pikir rendah dengan melakukan diklat atau latihan soal terus-menerus. Faktor guru yang meliputi kurang pahami guru terhadap langkah-langkah penyusunan RPP, komponen RPP dan materi ajar PKn dengan membahas bersama guru lainnya atau dengan MGMP dan meningkatkan pengetahuan dengan mencari materi lewat internet dan buku lainnya. faktor waktu yaitu keterbatasan waktu dengan menyesuaikan pelaksanaan pembelajaran dengan waktu yang tersedia, dan faktor media yaitu ketidaklengkapan media dengan menyesuaikan metode dengan dan media yang tersedia di sekolah masing-masing.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini, untuk memenuhi sebagai persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlaksana tanpa dukungan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu perkenankanlah penulis memberikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Rochmad Wahab, M.Pd. M.A, selaku Rektor yang telah memberikan izin dalam penelitian ini.
2. Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial yang telah memberikan izin dan mempermudah dalam menyelesaikan penelitian ini.
3. Dr. Samsuri, M.Ag, selaku ketua jurusan PKn dan Hukum Fakultas Ilmu Sosial UNY yang telah memberikan bantuan demi mencapai kelulusan
4. Muchson AR, M.Pd, selaku Narasumber dan Penguji Utama yang telah memberikan kemudahan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Iffah Nurhayati, M.Hum selaku ketua penguji yang telah memberikan kemudahan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ekram Pawiroputro, M.Pd, selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing, membantu mengarahkan penulis dengan sabar sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
7. Nasiwan, M.Si, selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis demi kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini.
8. Mukhamad Murdiono, M. Pd, selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, perhatian dan motivasi sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
9. Ayah dan Ibunda tercinta, yang telah memberi segala dukungan, doa dan segalanya.

10. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan PKn dan Hukum yang tidak bisa penulis sebutkan satu per-satu, terima kasih atas bimbingan, ilmu dan semua yang telah diberikan kepada penulis.
11. Bapak/ Ibu Kepala Sekolah seluruh SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat.
12. Bapak dan Ibu Guru PKn SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat yang telah menjadi informan dalam penelitian ini dan terimakasih.
13. Teman-Teman Jurusan Pkn dan Hukum angkatan 2005, Selly, Novi, Rika, Ita, Ely, Erlin, Kiki, Bayu dan yang tidak bisa disebutkan satu per-satu, terima kasih atas dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penulis satu per-satu yang selalu membantu dalam penyelesaian penelitian ini.

Semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritikan, saran/masukan yang bersifat membangun demi peningkatan dan kesempurnaan skripsi ini.

Yogyakarta, 10 September 2012

Penulis

Isti Nurwidayanti

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	12
C. Batasan Masalah	13
D. Rumusan Masalah	14
E. Tujuan Penelitian	15
F. Manfaat Penelitian	15
G. Batasan Istilah	16

BAB II KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.....	18
1. Kurikulum	18
2. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.....	25
3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran	33
B. Tinjauan Pendidikan Kewarganegaraan.....	42
1. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan.....	42
2. Karakteristik Pendidikan Kewarganegaraan.....	43

3. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan	53
4. Kompetensi dari Pendidikan Kewarganegaraan	55
5. Ruang Lingkup Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan	57
C. Pelaksanaan Pembelajaran Berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan	58
1. Pengertian Pelaksanaan Pembelajaran	58
2. Kegiatan dalam Pelaksanaan Pembelajaran	59
D. Kerangka Pikir	66
E. Pertanyaan Penelitian	70

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Pendekatan Penelitian	71
B. Tempat dan Waktu Penelitian	71
C. Penentuan Subyek Penelitian	72
D. Teknik Pengumpulan Data	73
E. Instrumen Penelitian	76
F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	78
G. Teknik Analisis Data	79

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum	82
1. SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat	82
2. Profil guru SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat	85
B. Deskripsi Data	86
C. Pembahasan dan Hasil Penelitian	143

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	155
B. Implikasi	157
C. Saran	158

DAFTAR PUSTAKA.....	160
LAMPIRAN	163

DAFTAR TABEL

Tabel :

1. Komponen Ketrampilan Kewarganegaraan	46
2. Nama Sekolah dan Guru	73
3. Latar Belakang Pendidikan Guru	85
4. Komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.....	86
5. Langkah-langkah dalam Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran	91

GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Berpikir.....	69
----------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara.....	163
2. Pedoman Observasi.....	165
3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).....	167
4. Surat Permohonan Izin Survey Penelitian (Observasi).....	196
5. Surat Ijin Penelitian dari Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta	197
6. Surat Izin Penelitian dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman.....	198
7. Surat Keterangan dari SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Baarat.....	199
8. SK Pembimbing	205

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan Nasional kita telah beberapa kali mengalami pembaharuan kurikulum, mulai dari Kurikulum 1994 sampai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau Kurikulum 2006. Hal ini menunjukkan bahwa kurikulum sebelumnya masih belum cukup bagus untuk menjawab tantangan kerja sekarang ini, di antaranya berkaitan dengan masalah relevansi, atau kesesuaian antara pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan. Sistem Pendidikan Nasional senantiasa harus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi baik tingkat lokal, nasional maupun global.

Pemerintah menggagas tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan sebagai tindak lanjut kebijakan pendidikan dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi. Pemerintah berharap melalui Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ini, masalah ketidaksesuaian antara pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan segera teratasi. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan merupakan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi sekolah/daerah, karakteristik sekolah/daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan karakteristik peserta didik (Mulyasa. 2006: 8).

Faktor yang sangat menentukan dalam pelaksanaan kurikulum adalah tenaga kependidikan/guru. Menurut UU No. 14 Tahun 2005 pasal 1 ayat 1, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional saat ini sarat dengan tuntutan yang cukup mendasar karena harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi, dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Salah satu komponen penting dari Sistem Pendidikan Nasional adalah kurikulum karena kurikulum merupakan komponen pendidikan yang dijadikan acuan oleh setiap satuan pendidikan, baik oleh pengelola maupun penyelenggara khususnya guru.

Pendidikan menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.

Kurikulum merupakan unsur penting dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah karena kurikulum merupakan rancangan formal dan tertulis bagi pelaksanaan pendidikan di sekolah, sehingga pendidikan dapat berjalan secara terencana, sistematis, dan teratur. Kurikulum merupakan bagian penting dalam pendidikan sebab kurikulum berkaitan dengan penentuan arah, isi, dan proses pembelajaran yang pada akhirnya akan menentukan kualifikasi suatu lembaga pendidikan.

Menurut Mulyasa (2006: 9), Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan merupakan upaya untuk menyempurnakan kurikulum agar lebih familiar dengan guru karena mereka banyak dilibatkan, diharapkan mereka memiliki tanggungjawab yang memadai. Penyempurnaan kurikulum yang berkelanjutan merupakan keharusan agar sistem pendidikan nasional selalu relevan dan kompetitif.

Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 35 dan 36 yang menekankan perlunya peningkatan standar nasional pendidikan sebagai acuan kurikulum secara berencana dan berkala dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Menurut Martinis Yamin (2007: 62), penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan menekankan pada pendekatan proses dan bukan pemaksaan pencapaian materi. Oleh sebab itu pembelajaran yang dilaksanakan harus melibatkan aktivitas siswa atau peserta didik, guru berperan sebagai mediator dan fasilitator dalam pembelajaran. Belajar yang dilakukan merupakan belajar bermakna dan tuntas, sehingga peserta didik betul-betul menguasai permasalahan yang dipecahkan bersama. Kemampuan dan prestasi siswa selalu dipantau dan dikontrol melalui proses evaluasi yang kontinyu.

Setelah pemberlakuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan tahun 2006, satuan-satuan pendidikan harus mampu mengembangkan komponen-

komponen dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Komponen yang dimaksud mencakup visi, misi dan tujuan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan, kalender pendidikan, silabus sampai pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan memiliki beberapa karakteristik yang secara umum yaitu adanya partisipasi guru dan keseluruhan atau sebagian staf sekolah, adaptasi (modifikasi) dan kreasi (mendesain kurikulum baru), perpindahan tanggung jawab dari pusat, proses berkelanjutan yang melibatkan masyarakat, dan ketersediaan struktur pendukung.

Pada dasarnya, tujuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah bagaimana membuat guru lebih aktif dalam mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran. Jadi guru juga harus aktif dalam memancing kreativitas anak didiknya sehingga dialog dua arah terjadi dengan sangat dinamis. Kelebihan lain Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah memberi alokasi waktu pada kegiatan pengembangan diri siswa. Siswa tidak hanya mengenal teori tetapi terlibat dalam sebuah proses pengalaman belajar.

Kurikulum ini lahir karena adanya tuntutan perkembangan yang menghendaki desentralisasi, otonomi, dan fleksibilitas dalam penyelenggaraan pendidikan. Sistem pendidikan sentralistik telah menimbulkan ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat sehingga kemandirian dan kreativitas sekolah tidak tumbuh. Pendekatan baru berupa desentralisasi dalam pendidikan akan memberikan kewenangan yang

cukup untuk sekolah dalam mengelola mutu pendidikan peserta didik. (Slamet, 2005:3).

Desentralisasi pendidikan bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan dan kinerja pendidikan, baik pemerataan, kualitas, relevansi, dan efisiensi pendidikan. Selain itu desentralisasi juga dimaksudkan untuk mengurangi beban pemerintah pusat yang berlebihan, mengurangi kemacetan-kemacetan jalur-jalur komunikasi, meningkatkan kemandirian, demokrasi, daya tanggap, akuntabilitas, kreativitas, inovasi, prakarsa, dan pemberdayaan dalam pengelolaan dan kepemimpinan pendidikan.

Pembuatan kurikulum dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan masih dilakukan oleh pemerintah pusat dengan kurikulum standar yang berlaku secara nasional. Kemudian untuk implementasinya, sekolah dapat mengembangkan kurikulum tersebut dengan mengacu isi kurikulum yang berlaku secara nasional. Namun dalam implementasi ternyata tidak sama. Hal tersebut dapat dilihat dalam penyusunan silabus. Silabus model Badan Standar Nasional Pendidikan yang seharusnya hanya sekadar menjadi model, telah menjadi acuan baku untuk dilaksanakan di seluruh penjuru tanah air. Akibatnya, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang seharusnya berbeda di setiap daerah, bahkan di setiap sekolah, namun yang terjadi justru ada penyeragaman. Selain itu kebanyakan sekolah atau guru yang tidak begitu memahami Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan juga mengimplementasikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan seperti kurikulum sebelumnya hanya merubah nama, format, atau silabus saja.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan menjadi Kurikulum yang tetap sama produk-nya. Implementasi yang seperti inilah maka Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pun menjadi kurang efektif dalam pengembangan diri siswa karena isinya sama saja (Slamet, 2005 : 3).

Proses pembelajaran adalah suatu sistem yang melibatkan berbagai komponen. Menurut Moh. Ali (1984: 4), secara garis besar komponen tersebut dikelompokkan menjadi 3 kategori utama yaitu guru, materi dan siswa. Ketiganya melibatkan sarana dan prasarana meliputi metode, alat peraga, media pembelajaran, dan penataan media tempat belajar sehingga tercipta situasi dan kondisi yang memungkinkan.

Proses pembelajaran adalah proses yang terarah pada tujuan pendidikan dan pengajaran. Komponen-komponen di dalam proses pembelajaran saling berinteraksi dan berhubungan untuk mencapai tujuan pendidikan. Salah satu komponen proses belajar adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang dibuat berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang berisi diantaranya kompetensi dasar, indikator, materi standar, pengalaman belajar, metode mengajar, dan penilaian (Mulyasa, 2006: 221-222).

Guru sering kali dalam kegiatan pembelajaran di sekolah merasa bahwa pembaharuan kurikulum sebagai beban. Guru harus memahami kurikulum yang baru dan mengubah pola kerja yang biasa dilakukan guru untuk disesuaikan dengan kurikulum. Keadaan demikian merupakan akibat logis dari terlalu seringnya ada pembaharuan kurikulum. Namun kurikulum yang baik bukan satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan pembelajaran.

Masih banyak faktor lain yang ikut andil terhadap kegiatan pembelajaran. Faktor kunci yang dianggap menentukan keberhasilan pembelajaran, diantaranya mutu guru, kondisi sarana dan prasarana pendidikan, manajemen sekolah, dan sistem pendidikan nasional.

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bagian dari rumpun ilmu sosial, karena itu tidak mengherankan apabila konsep-konsep atau bahan ajarnya abstrak. Bahan ajar yang abstrak menuntut keterampilan guru untuk mengorganisasikan bahan sedemikian rupa sehingga menarik dan menantang. Meskipun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan telah dilaksanakan, namun terdapat indikasi bahwa ada kecenderungan guru untuk menggunakan teknik mengajar tradisional, seperti ceramah dan tanya jawab. Padahal teknik ini kurang dapat memobilisasi dan menumbuhkembangkan potensi berpikir, sikap, dan keterampilan siswa.

Di samping itu menimbulkan perasaan bosan dan pasif sehingga siswa menganggap mudah mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Padahal mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ini bertugas mengembangkan pendidikan demokrasi yang mengemban 3 fungsi pokok, yaitu mengembangkan kecerdasan warga negara (*civic intelligensi*), membina tanggung jawab (*civic responsibility*), dan mendorong partisipasi warga negara (*civic participation*) (Udin S. Winataputra. 2005: 1.1). Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sangat penting dipelajari siswa sebagai warga negara.

Adanya perubahan baik kurikulum, pengembangan silabus, penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran, maka dalam pelaksanaannya tentu akan mengalami suatu hambatan. Mulai dari apakah guru tersebut bisa menyusun dan menguasai kurikulum. Kemudian apakah guru tersebut dapat menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, mengembangkan materi pembelajaran, mengembangkan strategi belajar-mengajar, mengembangkan dan memilih media pembelajaran, dan merencanakan dan melakukan evaluasi terutama untuk ranah kognitif.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah suatu perkiraan atau proyeksi guru mengenai seluruh kegiatan yang dilakukan baik oleh guru maupun peserta didik, terutama dalam kaitannya dengan membentuk kompetensi dan pencapaian tujuan pembelajaran (Mulyasa, 2009: 153).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 20 dinyatakan bahwa:

”Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar”.

Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses menjelaskan bahwa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi

peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

Menurut Mulyasa (2006: 255) pembelajaran pada hakekatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan ke arah yang lebih baik. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi didalam interaksi tersebut, baik faktor internal yang datang dari dalam diri individu maupun faktor eksternal yang datang dari lingkungan.

Tugas guru yang paling utama dalam pembelajaran adalah mengkondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku dari peserta didik. Pada umumnya pelaksanaan pembelajaran berbasis Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan mencakup tiga hal, yaitu *pre tes* (tes awal), pembentukan kompetensi, dan *post tes*.

Berdasarkan pengalaman peneliti ternyata pengetahuan tentang bagaimana pengembangan silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, dan pelaksanaan pembelajaran sangat diperlukan dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Hal ini dikarenakan masih banyak guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang belum secara maksimal dapat mengembangkan kompetensi yang ada di dalam silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.

Banyak guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang pada saat memberi materi/menyampaikan materi kepada peserta didik, cara penyajiannya masih kurang membangkitkan semangat peserta didik untuk

belajar secara aktif dan mandiri. Bahkan ada beberapa guru yang masih menggunakan metode ceramah dan tanya jawab dalam mengajar di kelas.

Berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dalam pengembangan silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, dan pelaksanaan pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan sekolah dan siswanya. Di mana setiap sekolah dalam pengembangannya berbeda-beda. Tetapi pada kenyataannya terjadi penyeragaman. Format contoh pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran digunakan sebagai acuan yang baku bagi Guru. Padahal format contoh tersebut masih harus dikembangkan lagi.

Adanya kesenjangan informasi antar daerah, keragaman kompetensi guru atau sarana-prasarana sekolah menjadi cacat utama dalam melaksanakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan menemui hambatan dari segi Sumber Daya Manusia yang kurang memadai. Tidak banyak Sumber Daya Manusia yang mampu menjabarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di dalam satuan pendidikan. Guru belum sepenuhnya memahami Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan secara utuh, baik dari segi konsep maupun penerapannya di lapangan. Padahal pengimplemetasian Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan tersebut mutlak diperlukan demi tercapainya target pengajaran yakni penguasaan materi dengan baik oleh peserta didik.

Sosialisasi dilakukan oleh pemerintah pusat ke daerah-daerah yaitu tingkat provinsi yang kemudian disosialisasikan ke sekolah-sekolah.

Sosialisasi ke sekolah-sekolah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah masing-masing. Namun kondisi geografis tanah air kita yang beragam membuat kurangnya sosialisasi sampai ke seluruh pelosok tanah air. Sekolah-sekolah yang berada di daerah terpencil mendapatkan informasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan hanya dari mulut ke mulut saja. Kurangnya sosialisasi juga menyebabkan banyak sekolah yang masih simpang-siur dalam memahami Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan meski telah diterapkan selama 6 tahun.

Selain itu masalah yang tidak kalah penting adalah segi sarana dan prasarana. Kebanyakan sekolah dinilai kekurangan sarana untuk mendukung kelengkapan pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Hal ini terutama dialami oleh sekolah yang berada di daerah terpencil dan sekolah-sekolah yang memiliki masalah kesulitan dana. Masalah tersebut sangat mempengaruhi pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, dan pelaksanaan pembelajaran di sekolah-sekolah yang berdampak pada kurang efektifnya penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Permasalahan tersebut juga dialami oleh SMA-SMA yang berada di Kabupaten Sleman khususnya Kabupaten Sleman wilayah Barat. Masih banyak guru yang belum optimal dalam mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran karena kurangnya sarana dan prasana.

SMA di Kabupaten Sleman Wilayah Barat merupakan SMA yang berada di daerah pinggiran kota. Guru-guru yang ada di daerah pinggiran kota memiliki indikasi yang besar dalam mengalami hambatan pada

pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan Pelaksanaan Pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa guru-guru se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat belum melakukan upaya dalam mengatasi suatu hambatan. Hal inilah yang melatarbelakangi pentingnya diberlakukan penelitian tentang apakah hambatan-hambatan yang dihadapi guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat, di mana Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan sudah diterapkan di sekolah, namun kurikulum tersebut belum terlaksana dengan sempurna dan masih menemui beberapa hambatan. Pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang diberlakukan oleh pemerintah masih terdapat berbagai hambatan khususnya di SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat karena itu perlu dilakukan suatu penelitian.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang relevan terkait dengan hambatan apa saja yang dihadapi oleh guru Pendidikan Kewarganegaraan SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat dalam mengimplementasikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan sebagai berikut :

1. Belum sempurnanya pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.

2. Belum optimalnya guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di sekolah-sekolah.
3. Kurangnya sarana prasarana sebagai kelengkapan dari pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan terutama sarana prasarana dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan khususnya di SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat.
4. Masih adanya hambatan yang dialami oleh guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam pengembangan silabus.
5. Masih adanya hambatan yang dialami oleh guru Pendidikan Kewarganegaraan khususnya di SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat dalam pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.
6. Masih adanya hambatan yang dialami oleh guru Pendidikan Kewarganegaraan khususnya di SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat dalam pelaksanaan pembelajaran.
7. Masih belum diketahuinya upaya yang dilakukan oleh guru Pendidikan Kewarganegaraan SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat dalam mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.

C. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah yang timbul sehubungan dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, maka dari uraian masalah yang berhasil diidentifikasi di atas, maka penelitian ini dibatasi pada :

1. Hambatan yang dihadapi guru Pendidikan Kewarganegaraan SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat dalam mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
2. Upaya yang dilakukan guru Pendidikan Kewarganegaraan SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat dalam mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa saja hambatan yang dihadapi guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat ?
2. Upaya apa saja yang dilakukan guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat ?

E. Tujuan Penelitian

Mengacu pada masalah yang telah disebutkan di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui hambatan yang dihadapi guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat.
2. Mengetahui upaya yang dilakukan guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk dijadikan sebagai bahan acuan bagi peneliti lain yang sejenis di masa yang akan datang.
 - b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk/terhadap konsep pembelajaran dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan untuk diteliti lebih lanjut baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi guru Pendidikan Kewarganegaraan pada khususnya dan guru mata pelajaran lainnya pada umumnya, dapat dijadikan sebagai sumber informasi dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan pembelajaran, khususnya mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi sekolah atau organisasi profesi guru untuk mengatasi berbagai permasalahan sarana kritis bagi terselenggaranya sistem pendidikan yang berpengaruh pada perbaikan kualitas pendidikan Indonesia.
- c. Bagi peneliti, penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang masalah yang sama atau masalah lain yang berkaitan.

G. Batasan Istilah

1. Menurut UU No. 14 Tahun 2005 pasal 1 ayat 1, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
2. Menurut Chollisin (2000: 19), Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bentuk pengajaran politik atau pendidikan politik. Pendidikan politik berarti fokusnya lebih menekankan bagaimana membina warga Negara

yang lebih baik (memiliki kesadaran politik dan hukum) lewat suatu proses belajar mengajar. Dalam proses ini karakter ilmu politik sangat berpengaruh secara dominan baik dalam mengembangkan materi maupun strategi pengajarannya.

3. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan atau sekolah (Mulyasa, 2006: 19). Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, kalender pendidikan dan silabus.
4. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah suatu perkiraan atau proyeksi guru mengenai seluruh kegiatan yang dilakukan baik oleh guru maupun peserta didik, terutama dalam kaitannya dengan membentuk kompetensi dan pencapaian tujuan pembelajaran (Mulyasa, 2009: 153).
5. Pembelajaran pada hakekatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan kearah yang lebih baik (Mulyasa. 2006: 255).

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

1. Kurikulum

a. Pengertian Kurikulum

Menurut Mulyasa (2006: 4), kurikulum merupakan komponen pendidikan yang dijadikan acuan oleh setiap satuan pendidikan, baik oleh pengelola maupun penyelenggaran khususnya guru dan kepala sekolah. Sejak Indonesia memiliki kebebasan untuk menyelenggarakan pendidikan bagi anak-anak bangsanya, karenanya sejak saat itu pula pemerintah menyusun kurikulum. Dalam hal ini, kurikulum dibuat oleh pemerintah pusat secara sentralistik dan diberlakukan bagi seluruh anak bangsa dan seluruh tanah air Indonesia.

Kurikulum merupakan rancangan pendidikan yang merangkum semua pengalaman belajar yang disediakan bagi siswa di sekolah. Kurikulum disusun oleh para ahli pendidikan/ahli kurikulum, ahli bidang ilmu, pendidik, pejabat pendidikan, pengusaha, serta unsur-unsur masyarakat lainnya. Rancangan ini disusun dengan maksud memberi pedoman kepada para pelaksana pendidikan, dalam proses pembimbingan perkembangan siswa, mencapai tujuan yang dicitakan oleh siswa sendiri, keluarga, maupun masyarakat (Nana Syaodih, 2005: 150). Suatu kurikulum diharapkan memberikan landasan, isi, dan menjadi

pedoman bagi pengembangan kemampuan siswa secara optimal sesuai dengan tuntutan, dan tantangan perkembangan masyarakat

Jadi kurikulum merupakan seperangkat aturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan belajar mengajar di sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

b. Tujuan Kurikulum

Tujuan adalah arah atau sasaran yang akan dituju oleh proses penyelenggaraan pendidikan. Setiap kegiatan semestinya mempunyai tujuan, karena tujuan menuntun kepada apa yang hendak dicapai atau sebagai gambaran yang jelas tentang hasil akhir dari suatu kegiatan.

Menurut Asep Herry Hermawan (2005: 116) tujuan kurikulum adalah :

- 1) memberikan pegangan mengenai apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya dan merupakan patokan untuk mengetahui hingga mana tujuan itu telah dicapai.
- 2) memegang peranan sangat penting, akan mewarnai komponen-komponen lainnya dan akan mengarahkan semua kegiatan mengajar.
- 3) kurikulum yang dirumuskan menggambarkan pula pandangan para pengembang kurikulum mengenai pengetahuan kemampuan serta sikap yang ingin dikembangkan.

c. Komponen Kurikulum

Menurut Suciati, dkk (2005: 4) komponen kurikulum yaitu sebagai berikut:

1) Komponen tujuan

Tujuan yang ditetapkan harus mengacu pada prinsip-prinsip atau kriteria tertentu yaitu kriteria substantif yang terdiri dari kebutuhan dasar anak,

kebutuhan sosial masyarakat, ilmu pengetahuan dan filsafat. Kriteria lainnya adalah kriteria prosedur mencakup keterwakilan (*representatif*), kejelasan, terpertahankan, konsistensi, dan fleksibilitas.

Tujuan yang diterapkan harus disusun dan dinyatakan secara jelas. Pernyataan yang tidak jelas, yang dipenuhi kata-kata atau istilah yang rancu dan kabur akan menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda pada tingkat penyusunan, pengelola sekolah, dan pada tingkat pelaksana kurikulum termasuk guru. Untuk menghindarinya diperlukan definisi operasional dan persamaan arti, istilah, konsep-konsep yang dimiliki oleh orang-orang yang terkait dengan penyusunan dan pelaksanaan kurikulum atau memiliki persamaan arah/tujuan pendidikan yang dicita-citakan.

2) Komponen Isi

Isi kurikulum yaitu pengalaman belajar yang diperoleh siswa dari sekolah. Pengalaman-pengalaman ini dirancang dan diorganisasikan sedemikian rupa sehingga nantinya yang diperoleh siswa adalah sesuatu dengan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk menentukan isi kurikulum diperlukan keahlian seseorang dalam suatu bidang atau mata pelajaran, sehingga dengan keahlian yang dimiliki itulah dapat mengkaji struktur bahan yang menjadi isi kurikulum. Untuk menjalankan tugas ini diperlukan guru yang sangat berkompeten.

3) Komponen Metode dan Proses Pembelajaran

Metode dan proses pembelajaran adalah cara siswa memperoleh pengalaman belajar untuk mencapai tujuan. Metode berkenaan dengan proses pencapaian tujuan, proses berkaitan dengan bagaimana pengalaman belajar atau isi kurikulum diorganisasikan. Setiap bentuk organisasi yang digunakan membawa dampak kepada proses untuk memperoleh pengalaman yang dilaksanakan. Untuk kepentingan ini diperlukan kriteria pola organisasi kurikulum yang efektif.

4) Komponen Evaluasi/Penilaian

Evaluasi yaitu cara untuk mengetahui apakah sasaran yang ingin dituju dapat dicapai/tidak. Evaluasi juga berguna untuk menilai apakah proses kurikulum berjalan secara optimal atau tidak. Melalui evaluasi akan diperoleh balikan tentang pelaksanaan kurikulum itu sendiri. Dengan balikan yang diperoleh dapat dilakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan.

Evaluasi kurikulum dilaksanakan secara terus menerus. Untuk itu terlebih dahulu perlu ditetapkan secara jelas apa yang akan dievaluasi dengan menggunakan acuan dan kriteria yang jelas pula. Perlu ditetapkan dua sasaran utama dalam evaluasi :

a) Evaluasi terhadap hasil (produk) kurikulum yaitu evaluasi yang menilai sampai sejauh mana keberhasilan dalam mencapai tujuan/hasil yang diharapkan.

b) Evaluasi terhadap proses kurikulum yaitu evaluasi yang menilai apakah proses itu berjalan secara optimal sehingga memungkinkan tercapainya tujuan.

d. Fungsi Kurikulum Bagi Guru

Kurikulum berfungsi sebagai pedoman bagi guru dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari di sekolah. Hal ini disebabkan karena guru bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan dan mengembangkan kurikulum di kelas. Dengan kurikulum guru dapat merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran.

e. Pengembangan Kurikulum

Pengembangan kurikulum adalah suatu istilah yang ada dalam studi kurikulum, yaitu sebagai alat untuk membantu guru melakukan tugasnya menyampaikan pembelajaran yang menarik minat siswa. Kegiatan pengembangan kurikulum ini perlu dilakukan untuk merespons perkembangan ilmu dan teknologi, perubahan sosial di luar sistem pendidikan, memenuhi kebutuhan siswa, dan merespon kemajuan-kemajuan dalam pendidikan.

Masalah yang ada dalam proses pengembangan kurikulum biasanya berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai bagaimana memilih materi yang diajarkan, apa yang harus dilakukan bila ada pandangan yang bertolak belakang dengan pengembangan dan bagaimana menerapkan kurikulum secara meyakinkan.

Pengembangan kurikulum merupakan bagian yang sangat esensial dalam proses pembelajaran. Ada empat bagian penting dalam kurikulum meliputi : tujuan, isi/materi, strategi pembelajaran, dan evaluasi. Keempat bagian/komponen kurikulum ini saling berkaitan dan berinteraksi untuk mencapai perilaku yang diinginkan/dicita-citakan oleh tujuan pendidikan nasional. Kaitan antara empat komponen tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Tujuan yang jelas akan memberi petunjuk yang jelas pula dalam memilih isi/materi yang harus dikuasai, strategi yang akan digunakan serta bentuk dan alat evaluasi yang tepat untuk mengukur ketercapaian kurikulum.
- 2) Hierarki perumusan tujuan kurikulum dimulai dari tujuan umum pendidikan, kemudian tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional.
- 3) Materi kurikulum menurut Saylor dan Alexander adalah fakta-fakta, observasi, data, persepsi, penginderaan, pemecahan masalah yang berasal dari pikiran manusia dan pengalamannya yang diatur dan diorganisasikan dalam bentuk konsep, generalisasi, prinsip, dan pemecahan masalah.
- 4) Strategi pembelajaran berkaitan dengan bagaimana menyampaikan isi/materi kurikulum agar tujuan tercapai dan komponen evaluasi kurikulum adalah untuk menilai apakah tujuan kurikulum telah tercapai. Hasil dari evaluasi kurikulum adalah berupa umpan balik apakah kurikulum ini akan direvisi atau tidak (<http://massofa.wordpress.com/2009/11/02/pengembangan-kurikulum-dan-pembelajaran-pkn/>).

f. Cara Mengembangkan Kurikulum

1) Menentukan Tujuan

Rumusan tujuan dibuat berdasarkan analisis terhadap berbagai tuntutan, kebutuhan dan harapan. Tujuan dibuat dengan mempertimbangkan faktor-faktor kebutuhan masyarakat dan siswa.

2) Menentukan Isi

Isi kurikulum merupakan materi yang akan diberikan kepada siswa selama mengikuti proses pendidikan/proses pembelajaran. Materi ini dapat berupa mata pelajaran untuk masalah yang berhubungan dengan kehidupan yang perlu dipelajari untuk mencapai tujuan.

3) Merumuskan Kegiatan Pembelajaran

Hal ini mencakup penentuan metode dan keseluruhan proses pembelajaran yang diperlukan untuk mencapai tujuan.

4) Mengadakan Evaluasi

Evaluasi sangat tergantung pada tujuan yang akan dicapai. Evaluasi sangat penting dilakukan agar memperoleh balikan/*feedback* guna mengadakan perbaikan. Evaluasi terus diadakan baik terhadap hasil maupun proses belajar.

g. Pembaharuan Kurikulum

Banyak faktor yang mendorong pembaharuan kurikulum yaitu :

- 1) Pengembangan tuntutan kebutuhan dan kondisi masyarakat.
- 2) Didasari oleh pemikiran-pemikiran dan terarah pada pencapaian nilai-nilai filosofis terutama negara (Nana Syaodih, 2005: 103).

Langkah-langkah pembaharuan menurut Nana Sudjana (2005: 148) adalah sebagai berikut :

- 1) Mengenal dan mengidentifikasi kebutuhan perubahan kurikulum.
- 2) Mobilisasi suatu perubahan kurikulum.
- 3) Studi tentang masalah dan kebutuhan masyarakat
- 4) Studi tentang karakteristik dan kebutuhan anak didik.

- 5) Formulasi tujuan pendidikan
- 6) Menetapkan aktivitas belajar dan mata pelajaran
- 7) Mengorganisasikan pengalaman belajar dan perencanaan unit-unit pelajaran.
- 8) Pelaksanaan kurikulum .
- 9) Evaluasi dan revisi kurikulum.

2. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

a. Pengertian Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan merupakan pedoman bagi pelaksanaan pendidikan untuk mengembangkan sektor pendidikan (pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi) dalam seluruh jenjang dan jalur pendidikan, khususnya jalur pendidikan sekolah. Hal tersebut berkaitan dengan upaya pemerintah dan praktisi pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan yang lebih baik. Salah satunya yang dilakukan pemerintah adalah memperbaharui dalam bidang kurikulum di sekolah dari tingkat dasar hingga menengah. Dengan perubahan ini, pemerintahan berharap mampu meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia yang berkualitas.

Menurut Joko Susilo (2007: 94-95), Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan merupakan hasil penegasan dari atau sejalan dengan kebijakan desentralisasi. Ini merupakan sebuah konsep yang indah karena memberikan peluang yang sebesar-besarnya kepada daerah yang berkembang. Dengan ini seluruh potensi setempat diharapkan dapat didayagunakan demi pengembangan setempat.

Penekanan dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada aspek kompetensi dan peluang menghadapi dunia kerja yang merupakan perpaduan

dari pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi mencakup tugas, keterampilan, sikap dan apresiasi yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk dapat melaksanakan tugas-tugas pembelajaran sesuai dengan pekerjaan tertentu. Dengan demikian terdapat hubungan antara tugas-tugas yang dipelajari dengan kemampuan yang diperlukan di dunia kerja. Untuk hal tersebut kurikulum menuntut kerjasamanya dengan baik antara lembaga pendidikan dengan lembaga tenaga kerja, terutama dalam hal ini analisis kompetensi yang perlu diajarkan pada peserta didik di sekolah.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dapat diartikan sebagai konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan keterampilan peserta didik dalam menghadapi perkembangan dunia kerja dan mampu melakukan tugas-tugas dengan standar performansi tertentu (*competency*) atau cakap, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik, berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu (Mulyasa. 2005: 39).

Jadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah konsep kurikulum tertuju pada suatu pengembangan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, kemampuan, pandangan sikap, nilai, dan minat peserta didik sehingga peserta didik mampu melakukan kegiatan yang berbentuk keterampilan dan juga kompetensi-kompetensi yang lainnya.

b. Konsep Dasar Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Dalam Standar Nasional Pendidikan (Pasal 1, ayat 15) dikemukakan bahwa Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan dan berdasarkan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan merupakan strategi pengembangan kurikulum untuk mewujudkan sekolah yang efektif, produktif, dan berprestasi. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan merupakan paradigma baru pengembangan kurikulum, yang memberikan otonomi luas pada setiap satuan pendidikan, dan pelibatan masyarakat dalam rangka mengefektifkan proses belajar mengajar di sekolah. Otonomi diberikan agar setiap satuan pendidikan dan sekolah memiliki keleluasaan dalam mengelola sumber daya, sumber dana, sumber belajar, dan mengalokasikannya sesuai prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat.

c. Tujuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Secara umum tujuan diterapkannya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah untuk memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan (otonomi) kepada lembaga pendidikan dan mendorong

sekolah untuk melaksanakan pengambilan keputusan secara partisipatif dalam pengembangan kurikulum.

Secara khusus menurut Mulyasa (2006: 22) tujuan diterapkannya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia.
- 2) Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama.
- 3) Meningkatkan kompetisi yang sehat antar satuan pendidikan tentang kualitas pendidikan yang akan dicapai.

d. Komponen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Menurut Masnur Muslich (2010: 12-16), Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan terdapat empat komponen, yaitu:

- 1) Tujuan Pendidikan Tingkat Satuan Pendidikan
 - a) Tujuan Pendidikan Dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
 - b) Tujuan Pendidikan Menengah adalah meningkatkan kecerdasan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
 - c) Tujuan Pendidikan Menengah Kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.

2) Struktur dan Muatan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Struktur kurikulum tingkat satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dan menengah tertuang dalam Standar Isi, yang dikembangkan dari kelompok mata pelajaran sebagai berikut :

- a) Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia.
- b) Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian
- c) Kelompok mata pelajaran pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.
- d) Kelompok mata pelajaran estetika.
- e) Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.

3) Kalender Pendidikan

Satuan pendidikan dapat menyusun kalender pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah, karakteristik sekolah, kebutuhan peserta didik, dan masyarakat, dengan memperhatikan kalender pendidikan sebagaimana tercantum dalam Standar Isi.

4) Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pengajaran

Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Berdasarkan silabus inilah guru bisa mengembangkannya menjadi Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran yang akan diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar bagi siswanya.

e. Karakteristik Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Karakteristik Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan bisa diketahui dari bagaimana sekolah dan satuan pendidikan dapat mengoptimalkan kinerja, proses pembelajaran, pengelolaan sumber belajar, profesionalisme tenaga kependidikan, serta sistem penilaian. Beberapa karakteristik Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan sebagai satuan pendidikan, partisipasi masyarakat dan orang tua yang tinggi, kepemimpinan yang demokratis, dan profesional, serta team-kerja yang kompak dan transparan (Mulyasa. 2006: 190).

f. Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Pengembangan kurikulum untuk setiap satuan pendidikan, yang dilakukan pada tahap ini antara lain, yaitu:

- 1) Menganalisis dan mengembangkan standar kompetensi lulusan, dan Standar Isi.
- 2) Merumuskan visi dan misi, serta merumuskan tujuan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- 3) Berdasarkan standar kompetensi lulusan, standar isi, visi, dan misi, serta tujuan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan di atas selanjutnya dikembangkan mata pelajaran yang akan diberikan untuk merealisasikan tujuan tersebut.
- 4) Mengembangkan dan mengidentifikasi tenaga-tenaga kependidikan (guru dan non guru) sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan, dengan berpedoman pada standar tenaga kependidikan yang ditetapkan Badan Standar Nasional Pendidikan.
- 5) Mengidentifikasi fasilitas pembelajaran yang diperlukan untuk memberi kemudahan belajar, sesuai dengan standar sarana dan prasarana pendidikan yang ditetapkan Badan Standar Nasional Pendidikan (Mulyasa. 2006: 149)

g. Prinsip Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Menurut permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah dikembangkan oleh sekolah dan komite sekolah berpedoman pada standar kompetensi lulusan dan standar isi serta panduan penyusunan kurikulum yang dibuat oleh Badan Standar Nasional Pendidikan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Berpusat pada potensi, perkembangan, serta kebutuhan peserta didik dan lingkungannya.
Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab.
- 2) Beragam dan Terpadu
Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, dan jenjang serta jenis pendidikan, tanpa membedakan agama, suku, budaya, dan adat istiadat, serta status sosial ekonomi dan gender.
- 3) Tanggapan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berkembang secara dinamis, dan oleh karena itu semangat dan isi kurikulum mendorong peserta didik untuk mengikuti, dan memanfaatkan secara tepat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- 4) Relevansi dengan Kebutuhan
Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan hidup dan dunia kerja.
- 5) Menyeluruh dan Berkesinambungan
Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antarsemua jenjang pendidikan.
- 6) Belajar sepanjang hayat

- Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- 7) Seimbang antara kepentingan global, nasional, dan lokal.

h. Landasan Pengembangan Kurikulum

Landasan pengembangan kurikulum pada hakikatnya merupakan faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan pada waktu mengembangkan suatu kurikulum lembaga pendidikan, baik di lingkungan sekolah maupun luar sekolah. Secara umum terdapat tiga aspek pokok yang mendasari pengembangan kurikulum tersebut yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, dan landasan sosiologis.

Landasan filosofis berkaitan dengan pentingnya filsafat dalam membina dan mengembangkan kurikulum pada suatu lembaga pendidikan. Filsafat ini menjadi landasan utama bagi landasan lainnya. Perumusan tujuan dan isi kurikulum pada dasarnya bergantung pada pertimbangan-pertimbangan filosofis. Pandangan filosofis yang berbeda akan mempengaruhi dan mendorong aplikasi pengembangan kurikulum yang berbeda pula. Berdasarkan landasan filosofis ini ditentukan tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan bidang studi, dan tujuan instruksional.

Landasan psikologis terutama berkaitan dengan psikologi/teori belajar (*psychology/theory of learning*) dan psikologi perkembangan (*developmental psychology*). Psikologi belajar memberikan kontribusi dalam hal bagaimana kurikulum ini disampaikan kepada siswa dan bagaimana pula siswa harus

mempelajarinya. Jadi dengan kata lain, psikologi belajar berkenaan dengan penentuan strategi kurikulum, sedangkan psikologi perkembangan diperlukan terutama dalam menentukan isi kurikulum yang diberikan kepada siswa agar tingkat keluasan dan kedalamannya sesuai dengan taraf perkembangan siswa tersebut.

Landasan sosiologi dijadikan sebagai salah satu aspek yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum karena pendidikan selalu mengandung nilai atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Di samping itu, keberhasilan suatu pendidikan dipengaruhi oleh lingkungan kehidupan masyarakat, dengan segala karakteristik dan kekayaan budayanya yang menjadi dasar dan acuan bagi pendidikan/kurikulum. Ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai produk kebudayaan diperlukan dalam pengembangan kurikulum sebagai upaya menyelaraskan isi kurikulum dengan perkembangan dan kemajuan yang terjadi dalam dunia iptek (<http://massofa.wordpress.com/2009/11/02/pengembangan-kurikulum-dan-pembelajaran-pkn/>).

3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

a. Pengertian Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Menurut Mulyasa (2006: 213), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran pada hakekatnya merupakan perencanaan jangka pendek untuk memperkirakan atau memproyeksikan apa yang akan dilakukan dalam pembelajaran. Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran merupakan upaya untuk memperkirakan tindakan yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar. Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik (Permendiknas No 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses)

Menurut Masnur Muslich (2010: 41-46), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah rancangan pembelajaran mata pelajaran per unit yang akan diterapkan guru dalam pembelajaran di kelas. Namun sebelum Rencana Pelaksanaan Pembelajaran disusun ada beberapa tahapan kegiatan yang harus dilakukan guru agar Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang disusun bisa efektif dan efisien yaitu sebagai berikut :

- 1) Melakukan pemetaan kompetensi dasar per unit.

Pemetaan kompetensi dasar per unit adalah penataan semua kompetensi dasar yang tertuang dalam silabus mata pelajaran ke dalam unit-unit pembelajaran. Pengetahuan terhadap porsi waktu setiap unit akan memudahkan

guru dalam pengembangan materi pembelajaran ketika menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.

Hal yang harus diperhatikan guru dalam pemetaan kompetensi dasar per unit adalah sebagai berikut :

- a) Pengurutan kompetensi dasar sesuai dengan prinsip keilmuan, pendidikan (pengajaran), dan kadar kesulitan/kedalaman.
- b) Penyatuan kompetensi dasar yang sejenis.
- c) Pemberian jumlah waktu/jam pelajaran setiap unit dengan melihat hasil pengembangan silabus.
- d) Pembagian jumlah waktu/jam pelajaran yang tersedia (dalam satu tahun atau satu semester) ke semua unit secara proporsional.

2) Melakukan analisis alokasi waktu.

Analisis alokasi waktu adalah pelacakan jumlah minggu dalam semester/tahun pelajaran terkait dengan pemanfaatan waktu pembelajaran pada mata pelajaran tertentu.

Hal yang perlu diperhatikan guru dalam analisis alokasi waktu adalah sebagai berikut :

- a) Penentuan jumlah minggu pada setiap bulan dalam semester/tahun pelajaran dengan melihat kalender umum.
- b) Penentuan jumlah minggu yang tidak efektif pada setiap bulan dalam semester/tahun pelajaran dengan melihat kalender pendidikan.

- c) Penentuan jumlah minggu yang efektif pada setiap bulan dalam semester/tahun pelajaran dengan melihat kalender pendidikan.
- d) Penyebaran jumlah jam pelajaran pada setiap unit pelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
- e) Pengalokasian jam pelajaran untuk ulangan harian (kalau ada), ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester.
- f) Pembagian jumlah waktu/jam pelajaran efektif (dalam satu tahun atau satu semester) ke semua unit secara proporsional dan semua jenis ulangan.

3) Menyusun program tahunan dan/atau program semester.

Program tahunan dan program semester adalah rencana umum pembelajaran mata pelajaran setelah diketahui kepastian jumlah jam pelajaran efektif dalam satu tahun/semester. Penyusunan program tahunan dan program semester ini berdasarkan hasil analisis alokasi waktu yang ditetapkan sebelumnya dan hasil pemetaan kompetensi dasar per unit.

Hal yang patut dilakukan guru dalam penyusunan program tahunan dan program semester adalah sebagai berikut:

- a) Mendaftar kompetensi dasar pada setiap unit berdasarkan hasil pemetaan kompetensi dasar per unit yang telah disusun.
- b) Mengisi jumlah jam pelajaran setiap unit berdasarkan hasil analisis alokasi waktu yang telah disusun.

- c) Menentukan materi pembelajaran pokok pada setiap kompetensi dasar, yang didapatkan dari pengembangan silabus yang telah disusun atau dari kreativitas guru.
- d) Membagi habis jumlah jam pelajaran efektif (dalam satu tahun atau satu semester) ke semua unit pembelajaran dan semua jenis ulangan berdasarkan pengalokasian waktu yang terdapat dalam hasil analisis alokasi waktu yang telah disusun.

4) Menyusun Rencana Pelaksanaan pembelajaran.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah rancangan pembelajaran mata pelajaran per unit yang akan diterapkan guru dalam pembelajaran di kelas. Langkah yang patut dilakukan guru dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah sebagai berikut :

- a) Mengambil satu unit pembelajaran yang akan diterapkan dalam pembelajaran.
- b) Menulis standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat dalam unit tersebut.
- c) Menentukan indikator untuk mencapai kompetensi dasar tersebut.
- d) Menentukan alokasi waktu yang diperlukan untuk mencapai indikator tersebut.
- e) Merumuskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran tersebut.
- f) Menentukan materi pembelajaran yang akan diberikan/dikenakan kepada siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan.
- g) Memilih metode pembelajaran yang dapat mendukung sifat materi dan tujuan pembelajaran.
- h) Menyusun langkah-langkah kegiatan pembelajaran pada setiap satuan rumusan tujuan pembelajaran, yang bisa dikelompokkan menjadi kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.
- i) Jika alokasi waktu untuk mencapai satu kompetensi dasar lebih dari 2 (dua) jam pelajaran, maka membagi langkah-langkah pembelajaran menjadi lebih

dari satu pertemuan. Pembagian setiap jam pertemuan bisa didasarkan pada satuan tujuan pembelajaran atau sifat/tipe/jenis materi pembelajaran.

- j) Menyebutkan sumber/media belajar yang akan digunakan dalam pembelajaran secara kongkret dan untuk setiap bagian/unit pertemuan.
- k) Menentukan teknik penilaian, bentuk dan contoh instrumen penilaian yang akan digunakan untuk mengukur ketercapaian kompetensi dasar atau tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan.

Jadi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah rancangan pembelajaran mata pelajaran yang diterapkan guru di dalam pembelajaran di kelas. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ini sebagai pedoman guru dalam melaksanakan pembelajaran.

b. Fungsi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Menurut Mulyasa (2006: 217-218), terdapat dua fungsi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.

1) Fungsi Perencanaan

Fungsi perencanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran hendaknya dapat mendorong guru lebih siap melakukan kegiatan pembelajaran dengan perencanaan yang matang.

2) Fungsi Pelaksanaan

Dalam pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, rencana pelaksanaan pembelajaran harus disusun secara sistematis, utuh dan menyeluruh, dengan beberapa kemungkinan penyesuaian dalam situasi pembelajaran yang

aktual. Rencana pelaksanaan pembelajaran berfungsi untuk mengefektifkan proses pembelajaran sesuai dengan apa yang direncanakan.

c. Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Menurut Mulyasa, (2006: 151), berdasarkan standar kompetensi dan standar isi dalam silabus yang telah diidentifikasi dan diurutkan sesuai dengan tingkat pencapaiannya pada setiap bidang studi, selanjutnya dikembangkan program-program pembelajaran, menyusun dan mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau persiapan mengajar.

Pelaksanaan merupakan bagian penting yang harus diperhatikan dalam implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, yang akan menentukan kualitas pembelajaran secara keseluruhan dan menentukan kualitas pendidikan serta kualitas sumber daya manusia, baik di masa sekarang maupun di masa depan. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dalam hal ini merupakan perencanaan jangka pendek untuk memperkirakan dan memproyeksikan tentang apa yang akan dilakukan guru dalam pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran merupakan upaya untuk memperkirakan tindakan yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Upaya tersebut perlu dilakukan untuk mengkoordinasikan komponen-komponen pembelajaran, yakni kompetensi dasar, materi standar, indikator hasil belajar, dan Penilaian Berbasis Kelas. Kompetensi dasar berfungsi mengembangkan potensi peserta didik, materi standar berfungsi memberi makna terhadap

kompetensi dasar, indikator hasil belajar berfungsi menunjukkan keberhasilan pembentukan kompetensi. Penilaian berbasis kelas berfungsi mengukur pembentukan kompetensi, dan menentukan tindakan yang harus dilakukan apabila kompetensi dasar belum berbentuk atau belum tercapai (Mulyasa. 2009: 153-155).

d. Prinsip Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran harus memperhatikan perhatian dan karakteristik peserta didik terhadap materi standar yang dijadikan bahan kajian.

Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran dalam menyukseskan implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, sebagai berikut :

- 1) Kompetensi yang dirumuskan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran harus jelas, makin konkrit kompetensinya makin mudah diamati dan makin tepat kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk membentuk kompetensi tersebut.
- 2) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran harus sederhana dan fleksibel,serta dapat dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran, dan pembentukan kompetensi peserta didik.

- 3) Kegiatan yang disusun dan dikembangkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran harus menunjang, dan sesuai dengan kompetensi dasar yang akan diwujudkan.
- 4) Rencana pelaksanaan pembelajaran yang dikembangkan harus utuh dan menyeluruh, serta jelas pencapaiannya.
- 5) Harus ada koordinasi antar komponen pelaksanaan program di sekolah, terutama apabila pembelajaran dilaksanakan secara tim (*team teaching*) atau dilaksanakan di luar kelas, agar tidak mengganggu jam-jam pelajaran yang lain (Mulyasa 2006: 218-219).

e. Cara Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Cara Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dalam garis besarnya dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Mengisi kolom identitas
- 2) Menentukan alokasi waktu yang dibutuhkan untuk pertemuan yang telah ditetapkan
- 3) Menentukan standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta indikator yang akan digunakan yang terdapat pada silabus yang telah disusun.
- 4) Merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta indikator yang telah ditentukan.
- 5) Mengidentifikasi materi standar berdasarkan materi pokok/pembelajaran yang terdapat dalam silabus.
- 6) Menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan
- 7) Merumuskan langkah-langkah pembelajaran yang terdiri dari kegiatan awal, inti, dan akhir.
- 8) Menentukan sumber belajar yang digunakan
- 9) Menyusun kriteria penilaian, lembar pengamatan, contoh soal, dan teknik penskoran (Mulyasa, 2006: 222-223).

B. Tinjauan Umum tentang Pendidikan Kewarganegaraan

1. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Menurut National Council of Social studies (NCSS) Amerika Serikat yang dikutip oleh Cholisin (2000: 6)

Pendidikan Kewarganegaraan adalah proses yang meliputi semua pengaruh positif yang dimaksudkan untuk membentuk pandangan seorang warga Negara dalam peranannya di masyarakat. Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya sebagai sekedar bidang studi saja seperti halnya mata pelajaran yang lain. Tetapi mata Pendidikan Kewarganegaraan mengambil dari pengaruh positif dari keluarga, sekolah dan masyarakat. Melalui Pendidikan Kewarganegaraan generasi muda dibantu untuk memahami cita-cita nasional, hal-hal yang baik diakui oleh umum, proses pemerintahan sendiri dan dibantu untuk memahami arti kemerdekaan untuk mereka dan untuk semua manusia dan untuk individu dan kelompok, dalam bidang kepercayaan, perdagangan, pemilu dan dalam tingkah laku sehari-hari. Mereka juga dibantu untuk memahami bermacam-macam hak kemerdekaan warga negarayang dijamin dalam konstitusi dan peraturan-peraturan lainnya, dan tanggung jawab atas apa yang telah dicapainya.

Menurut Seminar Nasional Pengajaran dan Pendidikan *Civics* di Tawangmangu, Surakarta 1972, Pendidikan Kewarganegaraan yaitu suatu program pendidikan yang tujuan utamanya membina warga negara yang lebih baik menurut syarat-syarat, kriteria, ukuran, ketentuan-ketentuan Pembukaan UUD 1945, dan UUD 1945 (Cholisin, 2000: 7).

Menurut Nu'man Somantri, Pendidikan Kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik, yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, *positive influence* pendidikan sekolah, masyarakat, orang tua, yang semua itu diproses untuk melatih pelajar-pelajar

berpikir kritis, analitis, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis dengan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 (Cholisin, 2000: 7).

Menurut Cholisin (2000: 9), Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bentuk pengajaran politik atau pendidikan politik. Sebagai pendidikan politik berarti fokusnya lebih menekankan bagaimana membina warga Negara yang lebih baik (memiliki kesadaran politik dan hukum) lewat suatu proses belajar mengajar. Dalam proses ini karakter ilmu politik sangat berpengaruh secara dominan baik dalam mengembangkan materi maupun strategi pengajarannya.

Jadi Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang bertujuan membentuk karakteristik warga negara dalam hal terutama membangun bangsa dan negara dengan mengandalkan pengetahuan dan kemampuan dasar dari pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan materi peranan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan.

2. Karakteristik Pendidikan Kewarganegaraan

Materi keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan mencakup dimensi pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan nilai (*values*). sejalan dengan ide pokok mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yaitu membantu terwujudnya warga negara yang ideal yaitu warga negara yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan karakter sesuai dengan konsep dan prinsip pendidikan Kewarganegaraan. Pada gilirannya, warga negara yang

baik tersebut dapat membantu terwujudnya masyarakat demokratis konstitusional.

Secara lebih terperinci, materi pengetahuan kewarganegaraan meliputi pengetahuan tentang prinsip-prinsip dan proses demokrasi, lembaga pemerintah dan non pemerintah, identitas nasional, pemerintahan berdasar hukum (*rule of law*) dan pengadilan yang bebas dan tidak memihak, konstitusi, sejarah nasional, hak dan tanggung jawab warga negara, hak asasi manusia, hak sipil, dan hak politik yang mencakup percaya diri, komitmen penguasaan atas nilai religius, norma dan moral luhur, nilai keadilan, demokratis, toleransi, kebebasan berserikat dan berkumpul, perlindungan terhadap minoritas, dan sebagainya. Dalam kaitannya dengan nilai keterampilan, keterampilan partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk keperluan pengembangan silabus berbasis kemampuan dasar, karakteristik suatu mata pelajaran perlu diidentifikasi. Struktur keilmuan suatu mata pelajaran menyangkut dimensi standar kompetensi, kompetensi dasar, dan materi atas struktur keilmuan mata pelajaran tersebut. Hasil identifikasi karakteristik mata pelajaran tersebut bermanfaat sebagai acuan dalam mengembangkan silabus dan rencana pembelajaran.

Menurut Branson dalam CCE (center for Civics Education) pada tahun 1994 dalam national standardz of civics and government, ketiga komponen

pokok Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic dispositions* (Cholisin, 2008: 2-6).

a. Pengetahuan Kewarganegaraan

Pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) merupakan materi substansi yang harus diketahui oleh warga negara. Pada prinsipnya pengetahuan yang harus diketahui oleh warga negara berkaitan dengan hak-kewajiban/peran sebagai warga negara dan pengetahuan yang mendasar tentang struktur dan sistem politik, pemerintahan dan sistem sosial yang ideal sebagaimana terdokumentasi dalam Pancasila dan UUD 1945, maupun yang telah menjadi konvensi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta nilai-nilai universal dalam masyarakat demokratis serta cara-cara kerjasama untuk mewujudkan kemajuan bersama dan hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat internasional. Hal ini dapat dinyatakan aspek-aspek tersebut pada dasarnya merupakan pengetahuan yang berkaitan dengan peran warga negara dalam hidup berbangsa dan bernegara yang demokratis.

b. Ketrampilan Kewarganegaraan

Ketrampilan kewarganegaraan (*civic skills*), merupakan ketrampilan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan, agar pengetahuan yang diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna, karena dapat dimanfaatkan dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. *Civic skills* mencakup *intellectual skills* (ketrampilan intelektual) dan

participation skills (keterampilan partisipasi). Keterampilan intelektual yang terpenting bagi terbentuknya warga negara yang berwawasan luas, efektif dan bertanggung jawab antara lain adalah keterampilan berpikir kritis. Keterampilan berpikir kritis meliputi mengidentifikasi, menggambarkan/mendeskripsikan, menjelaskan, menganalisis, mengevaluasi, menentukan dan mempertahankan pendapat yang berkenaan dengan masalah-masalah publik. Keterampilan intelektual tampak ada upaya diakomodasi Kurikulum Berbasis Kompetensi Kewarganegaraan (2004) yang secara eksplisit dinyatakan dalam praktik Pembelajaran Kewarganegaraan diharuskan adanya pengembangan dan penerapan cara berpikir kritis, rasional, dan kreatif untuk mendukung kompetensi dasar. Juga dapat ditemui pada indikator, meskipun belum memadai bahkan masih ada kemampuan “menyebutkan” sebagai sesuatu kemampuan yang sangat rendah dan tidak termasuk dalam kategori berpikir kritis masih digunakan.

Tabel 1. Komponen Keterampilan Kewarganegaraan

KETRAMPILAN INTELEKTUAL	KETRAMPILAN PARTISIPASI
<p>1. Mengidentifikasi, (menandai/menunjukkan) dibedakan menjadi keterampilan: Membedakan Mengelompokkan/men- gklasifikasi Menentukan bahwa sesuatu itu asli.</p> <p>2. Menggambar, (memberikan uraian/ ilustrasi),</p>	<p>1. Berinteraksi (termasuk berkomunikasi tentunya) terhadap obek yang berkaitan dengan masalah-masalah publik, yang termasuk dalam keterampilan ini, antara lain: Bertanya, menjawab, berdiskusi dengan sopan santun Menjelaskan artikulasi kepentingan</p>

<p>misalnya tentang: Proses, Lembaga, Fungsi, Alat, Tujuan, Kualitas.</p> <p>3. Menjelaskan, (mengklasifikasi/menafsirkan), misalnya tentang: Sebab-sebab terjadinya suatu peristiwa Makna dan pentingnya peristiwa atau ide, Alasan bertindak</p> <p>4. Menganalisis, Misalnya tentang kemampuan menguraikan: Unsur-unsur komponen-komponen ide (gagasan), proses politik, institusi- institusi; Konsekuensi dari ide proses politik, institusi-institusi Memilah mana yang merupakan cara dengan tujuan, mana yang merupakan fakta dengan pendapat, mana yang merupakan tanggung jawab pribadi dan mana yang merupakan tanggung jawab publik.</p> <p>5. Mengevaluasi pendapat/posisi: Menggunakan kriteria atau standart untuk membuat keputusan tentang: Kekuatan dan kelemahan isu/pendapat</p>	<p>Membangun koalisi, negosiasi, kompromi Mengelola konflik secara damai Mencari konsensus</p> <p>2. Memantau/memonitor masalah politik dan pemerintahan terutama dalam penanganan persoalan- persoalan publik, yang termasuk kecerampilan ini antara lain: Menggunakan berbagai sumber informasi seperti perpustakaan, surat kabar, TV dan lain-lain untuk mengetahui persoalan- persoalan publik. Upaya mendapatkan informasi tentang persoalan publik dari kelompok- kelompok kepentingan pejabat pemerintah, lembaga-lembaga pemerintah. Misalnya dengan cara menghadiri berbagai pertemuan publik seperti: pertemuan organisasi siswa, komite sekolah, dewan sekolah, pertemuan desa/ BPD, pertemuan wali kota, LSM, dan organisasi.</p> <p>3. Mempengaruhi proses politik, pemerintah baik secara formal maupun informal, yang termasuk keterampilan ini antara lain: Melakukan simulasi tentang kegiatan: kampanye, pemilu, dengar pendapat, di DPR/DPRD, pertemuan wali kota, lobi, peradilan Memberikan suara dalam</p>
--	--

<p>Menciptakan pendapat baru</p> <p>6. Mengambil pendapat/posisi: Dari hasil seleksi berbagai posisi Membuat pilihan baru</p> <p>7. Mempertahankan pendapat/posisi: Mengemukakan argumentasi berdasarkan asumsi atas posisi yang dipertahankan/diambil/dibela Merespon posisi yang tidak disepakati</p>	<p>suatu pemilihan, Membuat petisi Melakukan pembicaraan/ memberi kesaksian di hadapan lembaga publik. Bergabung atau bekerja dalam lembaga advokasi untuk memperjuangkan tujuan bersama atau pihak lain Meminta atau menyediakan diri untuk menduduki jabatan tertentu.</p>
---	--

Sumber : Diolah dari Center For Civic Education (1994). Nasional Standart for Civics and Government, p.p 1-5;127-135

c. Karakter Kewarganegaraan

Karakter kewarganegaraan (*civic dispositions*), merupakan sifat-sifat yang harus dimiliki setiap warga negara untuk mendukung efektivitas partisipasi politik, berfungsinya sistem politik yang sehat, berkembangnya martabat dan harga diri, dan kepentingan umum. Karakter kewarganegaraan didalam Kurikulum Berbasis Kompetensi Kewarganegaraan (2004) belum dikembangkan secara baik dan lengkap. Dikatakan demikian, karena karakter kewarganegaraan belum terumuskan pada setiap kompetensi dasar, hasil belajar maupun indikator. Begitu pula meskipun telah isentuh karakter publik (misalnya : mematuhi perundang-undangan nasional, mengapresiasi dinamika politik Indonesia) namun karakter publik yang kritis terhadap undang-undang maupun terhadap sistem politik maupun rejim tampak kurang diperhatikan padahal hal ini sangat penting

dalam masyarakat demokratis. Supaya segala produk undang-undang sejalan dengan aspirasi dan di bawah control masyarakat. Sehingga misalnya dalam praktik pembelajaran kewarganegaraan perlu dimasukkan karakter publik yang berupa “Mengembangkan fungsi demokrasi konstitusional yang sehat”.

Karakter privat dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi juga nasibnya sama dengan karakter publik. Misalnya, karakter privat ini dapat dipahami dengan rumusan “membiasakan diri mengemukakan pendapat secara benar dan bertanggung jawab”, “membiasakan diri melaksanakan budidaya demokrasi di lingkungan masyarakat”. Kehidupan berbangsa dan bernegara berada dalam kondisi transisional dan sangat dinamis, dimana antara fakta dan isu; benar dan salah cenderung berkembang menjadi kabur (*absurd*) atau “dikaburkan”. Ciri-ciri watak/karakter privat (pribadi) dan karakter publik (kemasyarakatan) yang utama meliputi :

1) Menjadi masyarakat yang *independen* (mandiri)

Karakter ini merupakan kepatuhan secara sukarela terhadap peraturan yang berlaku dan bertanggungjawab atas segala konsekuensi yang timbul dari perbuatannya serta menerima kewajiban moral dan legal dalam masyarakat demokratis.

2) Memenuhi tanggung jawab personal kewarganegaraan di bidang ekonomi dan politik, yang termasuk karakter ini antara lain :

- a) Mengurus diri sendiri
- b) Member nafkah/menopang keluarga

- c) Merawat, mengurus dan mendidik anak
- d) Mengikuti informasi tentang issue-isue publik
- e) Memberikan suara (*voting*)
- f) Membayar pajak
- g) Menjadi saksi di pengadilan
- h) Memberikan pelayanan kepada masyarakat
- i) Melakukan tugas kepemimpinan sesuai dengan bakat dan kemampuan sendiri/masing-masing.

3) Menghormati harkat dan martabat kemanusiaan tiap individu, yang termasuk

karakter ini antara lain :

- a) Mendengarkan pendapat orang lain
- b) Berperilaku santun (bersikap sopan)
- c) Menghargai hak dan kepentingan sesama warganegara
- d) Memenuhi prinsip aturan mayoritas, namun tetap menghargai hak minoritas untuk berbeda pendapat

4) Berpartisipasi dalam urusan-urusan kewarganegaraan secara bijaksana dan efektif

Karakter ini menghendaki pemilikan informasi yang luas sebelum memberikan suara (*voting*) atau berpartisipasi dalam debat publik, keterlibatan dalam diskusi yang santun dan serius, dan memegang kendali kepemimpinan yang sesuai. Hal ini juga menghendaki kemampuan membuat evaluasi kapan saatnya kepentingan pribadi sebagai warga negara dikesampingkan demi kepentingan umum dan kapan seseorang karena kewajibannya atau prinsip-prinsip konstitusional untuk menolak tuntutan-tuntutan kewarganegaraan tertentu. Sifat-sifat warganegara yang dapat menunjang karakter berpartisipasi dalam urusan-urusan kewarganegaraan (publik) diantaranya :

- a) Keberadaan (civilly), yang termasuk sifat ini antara lain : menghormati orang lain, menghormati pendapat orang lain meskipun tidak sepaham, mendengarkan pandangan orang lain, dan menghindari argument yang bermusuhan, sewenang-wenang, emosional dan tidak masuk akal.
- b) Menghormati hak-hak orang lain, yang termasuk sifat ini antara lain : menghormati hak orang lain bahwa mereka memiliki suara yang sama dalam pemerintahan dan sama di mata hukumnya, dan menghormati hak orang lain untuk memegang dan mengajukan gagasan yang bermacam-macam dan bekerjasama dalam suatu asosiasi untuk memajukan pandangan-pandangan mereka.
- c) Menghormati hukum, yang termasuk sifat ini antara lain : berkemauan mematuhi hukum, bahkan ketika ia tidak menyepakatinya, dan berkemauan melakukan tindakan dengan cara-cara damai dan legal untuk mengubah hukum yang tidak arif dan adil.
- d) Jujur : berkemauan untuk memelihara dan mengekspresikan kebenaran.
- e) Berpikir terbuka : yaitu mempertimbangkan pandangan orang lain.
- f) Berpikir kritis : yaitu kehendak hati untuk mempertanyakan keabsahan/kebenaran berbagai macam posisi termasuk posisi dirinya.
- g) Bersedia melakukan negoisasi dan berkompromi : yaitu kesediaan untuk membuat kesepakatan dengan orang lain meskipun terdapat perbedaan yang sangat tajam/mendalam, sejauh hal itu dinilai rasional dan adanya pembenaran secara moral.
- h) Ulet/tidak mudah putus asa : yaitu kemauan untuk mencoba berulang-ulang untuk meraih suatu tujuan.
- i) Berpikiran kewarganegaraan : yaitu memiliki perhatian dan kepedulian terhadap urusan-urusan publik/kemasyarakatan.
- j) Kekaruan/memiliki perasaan kasihan : yaitu mempunyai kepedulian agar orang lain hidupnya lebih baik, khususnya terhadap mereka yang tidak beruntung.
- k) Patriotism : memiliki loyalitas terhadap nilai-nilai demokrasi konstitusional
- l) Keteguhanhati : kuat untuk tetap pada pendiriannya, ketika kata hati menuntutnya.
- m) Toleran terhadap ketidakpastian : yaitu kemampuan untuk menerima ketidakpastian yang muncul, karena ketidak cukupan pengetahuan atau pemahaman tentang isu-isu yang kompleks atau tentang ketegangan antara nilai-nilai fundamental dengan prinsip-prinsip.

5) Mengembangkan fungsi demokrasi konsttusionel yang sehat

Karakter ini mengarahkan warga negara agar bekerja dengan cara-cara damai dan legal dalam rangka mengubah undang-undang yang dianggap tidak adil dan bijaksana, yang termasuk dalam karater ini antara lain :

- a) Sadar informasi dan kepekaan terhadap urusan-urusan publik
- b) Melakukan penelaahan terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip konstitusional
- c) Memonitor keputusan para pemimpin politik dan lembaga-lembaga publik dalam penerapan nilai-nilai dan prinsip-prinsip konstitusional dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila terhadap kekurangannya.

Jadi karakteristik Pendidikan Kewarganegaraan mencakup komponen pokok yang terdiri dari *civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), *civic skills* (ketrampilan kewarganegaraan), dan *civiv depositions* (karakter kewarganegaraan). Pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) merupakan materi substansi yang harus diketahui oleh warga negara. Pada prinsipnya pengetahuan yang harus diketahui oleh warga negara berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara, pengetahuan tentang struktur dan sistem poitik dan pemerintahan, nilai-nilai universal dalam masyarakat demokratis, cara-cara kerja sama untuk mewujudkan kemajuan bersama, serta hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat internasional. Keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) merupakan keterampilan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan agar pengetahuan yang diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna karena dapat dimanfaatkan dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. *Civic skills* mencakup *intellectual skills*

(keterampilan intelektual) dan *participation skills* (keterampilan partisipasi). Karakter kewarganegaraan (*civic dispositions*) merupakan sifat-sifat yang harus dimiliki setiap warga negara untuk mendukung efektivitas partisipasi politik, berfungsinya sistem politik yang sehat, berkembangnya martabat dan harga diri serta kepentingan umum.

3. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah mendidik warga negara yang baik, yakni sebagai berikut :

- a. Peka terhadap informasi baru yang dijadikan pengetahuan dalam kehidupannya.
- b. Warga negara yang berketerampilan: peka dalam menyerap informasi, mengorganisasi dan menggunakan informasi, dan membina pola hubungan interpersonal dan partisipasi sosial.
- c. Warga negara yang memiliki komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi, yang diisyaratkan dalam membangun suatu tatan masyarakat yang demokratis dan beradab, maka setiap warga negara haruslah memiliki karakter atau jiwa yang demokratis yang meliputi:
 - 1) Rasa hormat dan tanggungjawab terhadap sesama warga terutama dalam konteks adanya pluralitas masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai etnis, suku, ras, keyakinan agama, dan ideologi politik. Selain itu, sebagai warga negara yang demokrat, seorang warga negara juga dituntut untuk turut bertanggung jawab menjaga keharmonisan hubungan antara etnis serta keteraturan dan ketertiban negara yang berdiri di atas pluralitas tersebut.
 - 2) Bersikap kritis terhadap keyakinan empiris (realitas sosial, budaya, dan politik) maupun terhadap kenyataan supra empiris (agama, mitologi, kepercayaan). Sikap kritis yang harus ditujukan pada diri sendiri. Sikap kritis pada diri sendiri itu tentu disertai sikap kritis terhadap pendapat yang berbeda. Tentu saja sikap kritis ini harus didukung oleh sikap yang bertanggungjawab terhadap apa yang dikritik.
 - 3) Membuka diskusi dan dialog yakni perbedaan dan pandangan serta perilaku merupakan realitas empirik yang pasti terjadi di tengah komunitas warga negara, apalagi di tengah komunitas masyarakat yang plural dan multi-etnik. Untuk meminimalisasi konflik yang ditimbulkan dari perbedaan tersebut, maka membuka ruang untuk berdiskusi dan berdialog merupakan salah satu solusi yang digunakan. Oleh karenanya, sikap membuka diri untuk dialog dan diskusi merupakan salah satu ciri sikap warga negara yang demokrat.

- 4) Bersikap terbuka yang merupakan bentuk penghargaan terhadap kebebasan sesama manusia, termasuk rasa menghargai terhadap hal-hal yang mungkin asing. Sikap terbuka yang didasarkan atas kesadaran akan pluralisme dan keterbatasan diri akan melahirkan kemampuan untuk menahan diri dan tidak secepatnya menjatuhkan penilaian dan pilihan.
- 5) Rasional yaitu memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara bebas dan rasional adalah sesuatu hal yang harus dilakukan. Keputusan-keputusan yang diambil secara rasional akan mengantarkan sikap yang logis yang ditampilkan oleh warga negara. Sementara, sikap dan keputusan yang diambil secara rasional akan mengantarkan sikap yang logis yang ditampilkan oleh warga negara. Sementara, sikap dan keputusan yang diambil secara tidak rasional akan membawa implikasi emosional dan cenderung egois. Masalah-masalah yang terjadi di lingkungan warga negara, baik persoalan politik, sosial, budaya, dan sebagainya, sebaiknya dilakukan dengan keputusan-keputusan yang rasional.
- 6) Adil adalah menempatkan sesuatu secara proporsional. Tidak ada tujuan baik yang patut diwujudkan dengan cara-cara yang tidak adil. Penggunaan cara-cara yang tidak adil adalah bentuk pelanggaran hak asasi dari orang yang diperlakukan tidak adil. Dengan semangat keadilan, maka tujuan-tujuan bersama bukanlah suatu yang didiktekan tetapi ditawarkan. Mayoritas suara bukanlah ditur tetapi diperoleh.
- 7) Jujur yaitu memiliki sikap dan sifat yang jujur bagi warga negara merupakan suatu yang niscaya. Kejujuran merupakan kunci bagi terciptanya keselarasan diri keharmonisan hubungan antar warga negara. Sikap jujur bisa diterapkan di segala sektor, baik politik, sosial, dan sebagainya (<http://Lpmpjogja.diknas.go.id>).

Menurut Lampiran Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia. Kesadaran dan wawasan termasuk wawasan kebangsaan, jiwa dan patriotisme bela negara, penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, demokrasi, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum,

ketaatan membayar pajak, dan sikap serta perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Adapun tujuan Pendidikan Kewarganegaraan menurut Badan Standar Nasional Pendidikan (2006: 217), agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:

- 1) Berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
- 2) Berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 3) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat Indonesia agar hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.
- 4) Berinteraksi secara langsung dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Jadi tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah membentuk warga Negara yang baik, yang memiliki karakter antara lain memiliki rasa kesadaran sebagai warga negara, memiliki rasa tanggung jawab terhadap masyarakat, dan berpartisipasi terhadap pembangunan.

4. Kompetensi dari Pendidikan Kewarganegaraan

Menurut E. Kus Eddy Sartono (2000: 12), kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab, yang harus dimiliki oleh seseorang sebagai syarat untuk dapat dianggap mampu melakukan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan tertentu. Kompetensi yang diharapkan setelah menempuh pendidikan kewarganegaraan adalah dimilikinya seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dari seorang warga negara dalam

berhubungan dengan negara serta mampu turut serta dalam memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, bangsa, dan negara sesuai dengan profesi dan kapasitas masing-masing. Sifat cerdas yang dimaksud tampak dalam kemahiran, ketepatan, dan keberhasilan dalam bertindak, sedangkan sifat tanggung jawab diperlihatkan sebagai kebenaran tindakan ditinjau dari nilai agama, moral, etika, dan budaya.

Kompetensi yang diharapkan dapat dikuasai peserta didik setelah menempuh Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 1 ayat 4, bahwa standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

Standar kompetensi lulusan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan meliputi:

- a. Memahami hakikat bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Menganalisis sikap positif terhadap penegakan hukum, peradilan nasional dan tindakan anti korupsi.
- c. Menganalisis pola-pola pada partisipasi aktif dalam pemajuan, penghormatan serta penegakan Hak Asasi Manusia baik di Indonesia maupun di luar negeri.
- d. Menganalisis peran dan hak warga Negara dan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Menganalisis budaya politik demokrasi, konstitusi, kedaulatan Negara, keterbukaan dan keadilan di Indonesia.
- f. Mengevaluasi hubungan internasional dan sistem hukum internasional
- g. Mengevaluasi sikap berpolitik dan bermasyarakat madani sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945

- h. Menganalisis peran Indonesia dalam politik dan hubungan internasional, regional dan kerjasama global lainnya.
- i. Menganalisis sistem hukum internasional, timbulnya konflik internasional, dan mahkamah internasional (PP No 19 Tahun 2005).

Standar Kompetensi kelompok Mata Pelajaran dikembangkan berdasarkan tujuan dan cakupan muatan, dan kegiatan setiap kelompok mata pelajaran, di mana untuk kelompok mata pelajaran Kewarganegaraan dan kepribadian bertujuan membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Jadi kompetensi yang harus dimiliki melalui Pendidikan Kewarganegaraan adalah warganegara mampu memahami, menganalisis, serta menjawab berbagai masalah yang dihadapi masyarakat, bangsa, dan negara secara tepat, rasional, konsisten, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dalam rangka mencapai tujuan nasional. Menjadi warga negara yang tahu hak dan kewajibannya, menguasai ilmu dan teknologi serta seni, namun tidak kehilangan jati diri (tidak tercerabut dari akar budaya bangsanya).

5. Ruang Lingkup Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagaimana diatur di dalam lampiran Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Persatuan dan kesatuan bangsa meliputi: hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, sumpah pemuda, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, partisipasi dalam pembelaan negara, sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, keterbukaan dan jaminan keadilan.

- b. Norma, hukum, dan peraturan meliputi: tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional.
- c. Hak asasi manusia meliputi: hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM, pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM.
- d. Kebutuhan warga negara meliputi: hidup gotong royong, harga diri sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warga negara.
- e. Konstitusi Negara meliputi: proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan dasar negara dengan konstitusi.
- f. Kekuasaan dan Politik meliputi: pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintah pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem pemerintahan, pers dalam masyarakat demokrasi.
- g. Pancasila meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka.
- h. Globalisasi meliputi: globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional dan organisasi internasional, dan mengevaluasi globalisasi.

C. Pelaksanaan Pembelajaran Berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

1. Pengertian Pelaksanaan Pembelajaran

Menurut Mulyasa (2006: 255) pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan kearah yang lebih baik. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi dalam interaksi tersebut, baik faktor internal yang datang dari dalam diri individu, maupun faktor eksternal yang datang dari lingkungan. Tugas guru

yang paling utama dalam pembelajaran adalah mengkondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku dari peserta didik.

Pelaksanaan pembelajaran menurut Permendiknas No. 41 Tahun 2007 tentang Standar Isi merupakan implementasi dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup.

Jadi pelaksanaan pembelajaran adalah operasionalisasi dari perencanaan pembelajaran, sehingga tidak lepas dari perencanaan pengajaran/pembelajaran/pemelajaran yang sudah dibuat. Oleh karenanya dalam pelaksanaannya akan sangat tergantung pada bagaimana perencanaan pembelajaran sebagai operasionalisasi dari sebuah kurikulum.

2. Kegiatan dalam Pelaksanaan Pembelajaran

Menurut Mulyasa (2006: 255-258) pelaksanaan pembelajaran berbasis Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan mencakup tiga hal, yaitu:

a. Pre Tes (tes awal)

Pre tes memiliki banyak kegunaan dalam menjajaki proses pembelajaran yang akan dilaksanakan, karena itu pre tes memegang peranan yang cukup penting dalam proses pembelajaran.

Fungsi pre tes antara lain:

- 1) Untuk menyiapkan peserta didik dalam proses belajar, karena dengan pre tes maka pikiran mereka akan terfokus pada soal-soal yang harus mereka kerjakan.
- 2) Untuk mengetahui tingkat kemajuan peserta didik sehubungan dengan proses pembelajaran yang dilakukan.
- 3) Untuk mengetahui kemampuan awal yang telah dimiliki oleh peserta didik mengenai kompetensi dasar yang akan dijadikan topik dalam proses pembelajaran.
- 4) Untuk mengetahui darimana seharusnya proses pembelajaran dimulai, kompetensi dasar yang mana yang telah dikuasai peserta didik, serta kompetensi dasar mana yang perlu mendapat penekanan dan perhatian khusus.

b. Pembentukan Kompetensi

Pembentukan kompetensi merupakan kegiatan inti dari pelaksanaan proses pembelajaran, yakni bagaimana kompetensi dibentuk pada peserta didik, dan bagaimana tujuan-tujuan belajar direalisasikan. Proses pembentukan kompetensi dikatakan efektif apabila seluruh peserta didik terlibat secara aktif, baik mental, fisik maupun sosialnya.

Kualitas pembentukan kompetensi dapat dilihat dari segi proses dan segi hasil. Dilihat dari segi proses, pembentukan kompetensi dapat dikatakan

berhasil dan berkualitas apabila seluruhnya atau setidaknya sebagian besar (75%) peserta didik terlibat aktif, baik mental, fisik maupun sosial dalam proses pembentukan kompetensi dasar. Kemudian dari segi hasil, proses pembentukan kompetensi dapat dikatakan berhasil apabila terjadi perubahan perilaku yang positif pada diri peserta didik seluruhnya atau setidaknya sebagian besar (75%) sesuai dengan kompetensi dasar.

Proses pembentukan kompetensi dapat dikatakan berhasil dan berkualitas apabila masukan merata, menghasilkan output yang banyak dan bermutu tinggi, serta sesuai dengan kebutuhan, perkembangan masyarakat, dan pembangunan.

c. Post Tes

Pelaksanaan pembelajaran diakhiri dengan post tes yang memiliki banyak kegunaan, terutama dalam melihat keberhasilan pembelajaran dan pembentukan kompetensi.

Fungsi post tes antara lain:

- 1) Untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditentukan, baik secara individu maupun kelompok.
- 2) Untuk mengetahui kompetensi dan tujuan-tujuan yang dapat dikuasai oleh peserta didik, serta kompetensi dan tujuan-tujuan yang belum dikuasai.

- 3) Untuk mengetahui peserta didik yang perlu mengikuti kegiatan remedial, dan yang perlu mengikuti kegiatan pengayaan, serta untuk mengetahui tingkat kesulitan belajar yang dihadapi.
- 4) Sebagai bahan acuan untuk melakukan perbaikan terhadap kegiatan pembelajaran dan pembentukan kompetensi yang telah dilaksanakan, baik terhadap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi.

Menurut Permendiknas No 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup.

a. Kegiatan Pendahuluan

Guru dalam kegiatan pendahuluan, antara lain:

- 1) menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran.
- 2) mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari
- 3) menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai
- 4) menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus.

b. Kegiatan Inti

Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai Kompetensi Dasar yang dilakukan secara interaktif, inspiratif,

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

Kegiatan inti menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran, yang dapat meliputi proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi.

1) Eksplorasi

Eksplorasi adalah kegiatan pembelajaran yang digunakan untuk membuat rencana untuk membangun pengetahuan dasar siswa. Guru dalam kegiatan eksplorasi,:

- a) melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik/tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam takambang jadi guru dan belajar dari aneka sumber.
- b) menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar lain.
- c) memfasilitasi terjadinya interaksi antarpeserta didik serta antara peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya.
- d) melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran.
- e) memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, studio, atau lapangan.

2) Elaborasi

Elaborasi adalah kegiatan inti pembelajaran. Guru dalam kegiatan elaborasi :

- a) membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna.
- b) memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis.
- c) memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut.
- d) memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif.
- e) memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan prestasi belajar.
- f) memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang dilakukan baik lisan maupun tertulis, secara individual maupun kelompok.
- g) memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja individual maupun kelompok.
- h) memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, turnamen, festival, serta produk yang dihasilkan.
- i) memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik.

3) Konfirmasi

Konfirmasi merupakan tahap akhir dari pembelajaran. Pada bagian ini guru memberikan *feedback* terhadap para peserta didik. Kegiatan konfirmasi, guru:

- a) memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik.
- b) memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik melalui berbagai sumber.
- c) memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan.
- d) memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna dalam mencapai kompetensi dasar: berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan, dengan menggunakan bahasa yang baku dan benar, membantu menyelesaikan masalah, memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan hasil eksplorasi, memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh dan memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum berpartisipasi aktif.

c. Kegiatan Penutup

Guru dalam kegiatan penutup:

- 1) bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran.
- 2) melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram.
- 3) umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.
- 4) merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik.
- 5) menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.

Jadi kegiatan dalam pelaksanaan pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti (eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi), dan kegiatan penutup.

D. Kerangka Pikir

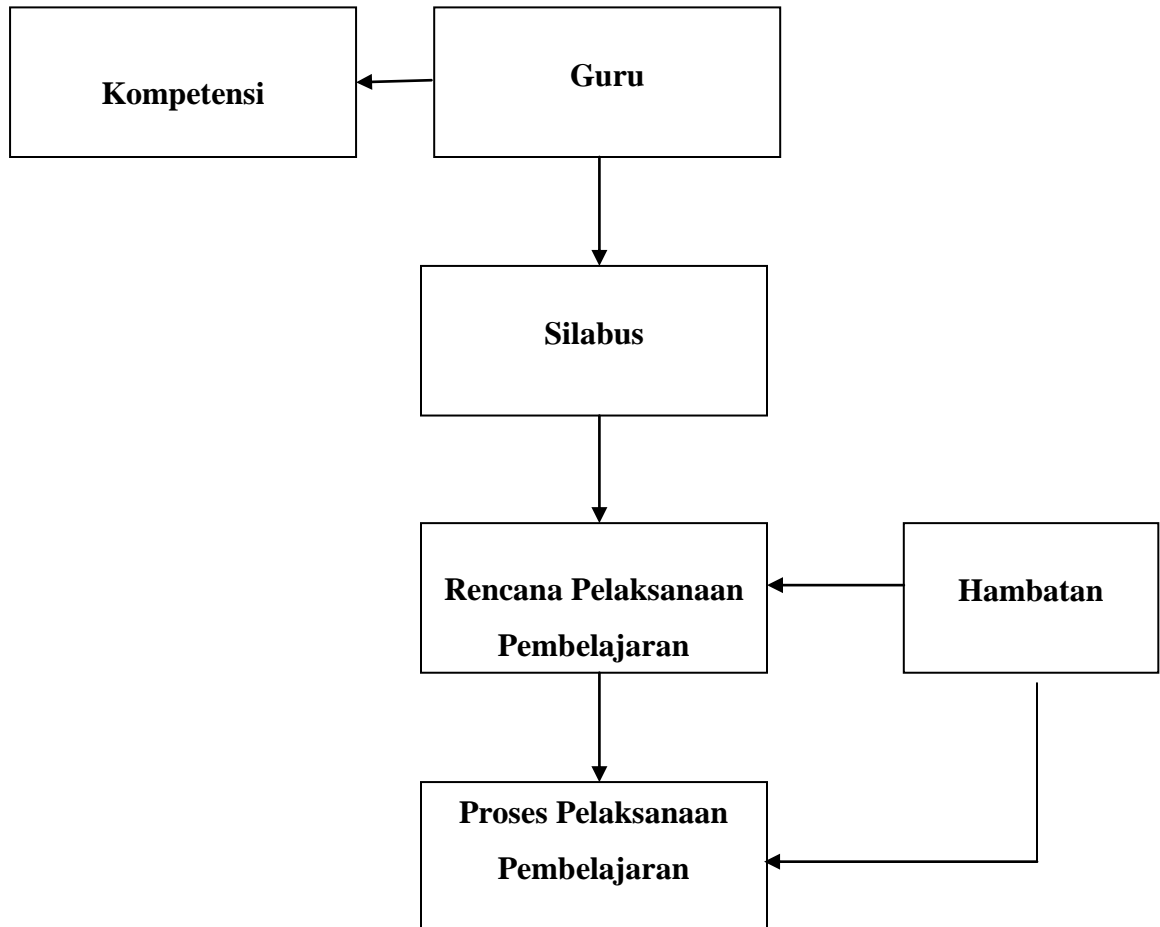
Pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Perencanaan merupakan kegiatan paling awal dari keseluruhan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya pelaksanaan yang merupakan proses kegiatan belajar mengajar sesuai dengan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang sebelumnya telah disusun oleh guru mata

pelajaran. Kemudian evaluasi di mana siswa dinilai sesuai dengan standar nasional yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran pada hakekatnya merupakan perencanaan jangka pendek untuk memperkirakan atau memproyeksikan apa yang akan dilakukan dalam pembelajaran. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran merupakan upaya untuk memperkirakan tindakan yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Upaya tersebut perlu dilakukan untuk mengoordinasikan komponen-komponen pembelajaran, yakni kompetensi dasar, materi standar, indikator hasil belajar, dan penilaian berbasis kelas.

Pelaksanaan pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan menurut Permendiknas No. 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses merupakan implementasi dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Pembelajaran pada hakekatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan kearah yang lebih baik. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi dalam interaksi tersebut, baik faktor internal yang datang dari dalam diri individu, maupun faktor eksternal yang datang dari lingkungan. Terkait dengan pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran maupun pelaksanaannya di dalam pembelajaran, diduga para guru masih ada yang mengalami kesulitan.

Untuk memperoleh kualitas pendidikan yang baik perlu adanya peningkatan/pengembangan komponen-komponen tersebut, sehingga penting sekali untuk dilakukan penelitian terhadap hambatan guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam skema kerangka-kerangka berpikir berikut :

BAGAN

Gammmbar 1. Kerangka Pikir

E. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan kajian teoritik dan kerangka berpikir di atas, dapat diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apa saja hambatan yang dihadapi guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat ?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam pelaksanaan pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat ?
3. Upaya apa saja yang dilakukan guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat ?

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Suharsimi Arikunto (1998: 25) penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keadaan sesuatu mengenal apa dan bagaimana, seberapa banyak, sejauh mana dan sebagainya.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang prosedur pemecahan masalah diselidiki dengan menggambarkan atau menuliskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya yang meliputi interpretasi data dan analisis data (Hadari Nawawi, 2002: 63). Penelitian deskriptif ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan bulan April 2012 sampai Juni 2011 di SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat, yaitu SMA N 1 Godean, SMA N 1 Minggir, SMA N 1 Seyegan, SMA Budi Mulia Minggir, SMA N 1 Gamping, dan SMA Islam 1 Gamping.

C. Penentuan Subyek Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto, (2002:66), subyek dalam penelitian adalah benda, keadaan, atau orang tempat data melekat dan di permasalahan. Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah guru dan siswa. Penentuan subyek penelitian tersebut menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* digunakan untuk memilih guru sebagai sumber data berdasarkan alasan tertentu. Alasan yang digunakan adalah bahwa orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan atau dapat memudahkan peneliti menjelajahi obyek/ situasi yang diteliti.

Subyek dalam penelitian ini adalah orang-orang yang karena posisinya memiliki pengetahuan, pengalaman, dan informasi mengenai data-data yang dibutuhkan oleh peneliti. Subyek dalam penelitian ini adalah guru Pendidikan Kewarganegaraan SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat, yaitu: SMA N 1 Godean, SMA N 1 Minggir, SMA N 1 Seyegan, SMA Budi Mulia Minggir, SMA N 1 Gamping, dan SMA Islam 1 Gamping. Daftar nama sekolah dan subyek penelitian dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. Nama Sekolah dan Nama Guru

No.	Nama Sekolah	Nama Guru
1.	SMA Budi Mulia Minggir	Drs. H.Y. Suparlan (SPL)
2.	SMA Negeri I Seyegan	Drs. Subarno (SBN)
		Sunaryo, S.Pd. (SNY)
3.	SMA Negeri I Minggir	Drs. Zainal Makmur (ZNM)
		Dra. Sukapti (SKT)
4.	SMA Islam 1 Gamping	Drs. Kaswadi (KWD)
		Siti Hidayati, BA. (STH)
5.	SMA Negeri I Godean	Erni Widiarti. S.H. (ENW)
		Drs. Widyatmono (WDM)
6.	SMA Negeri 1 Gamping	Dra. Titik Rusbiwati (TTR)

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga metode yaitu :

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam (M. Iqbal Hasan, 2002: 85). Bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu (Deddy Mulyana, 2004: 180). Percakapan dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut (Lexy J. Moleong, 2006: 186).

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tak terstruktur yang dilaksanakan menggunakan petunjuk umum wawancara (pedoman wawancara) yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Responden terdiri dari mereka yang terpilih saja karena sifat-sifatnya yang khas. Biasanya mereka memiliki pengetahuan dan mendalami situasi dan mereka lebih mengetahui informasi yang diperlukan (Lexy J. Moleong, 2006: 191).

Metode ini dilakukan untuk memperoleh data secara langsung dari subyek penelitian melalui serangkaian tanya jawab, sehingga dapat mengetahui apa saja hambatan guru Pendidikan Kewarganegaran dalam mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat dan apa saja solusi yang dilakukan oleh guru tersebut dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapinya.

2. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan khusus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya (M. Iqbal Hasan, 2002: 87). Metode ini digunakan untuk memperoleh data berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dalam bentuk silabus, Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran, program tahunan, program semester, rincian minggu efektif, dan lain-lainnya yang tercantum dalam perangkat pembelajaran. Dari data tersebut dapat diketahui apakah ada hambatan bagi guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran mereka.

3. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian (Hadari Nawawi, 2001 : 193). Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian terkait dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diambil tidak terlalu besar.

Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi *participant observation* (observasi berperan serta) dan *non participant observation* (observasi non partisipasi). Selanjutnya dari segi instrumentasi yang digunakan, maka observasi dapat dibedakan menjadi observasi terstruktur, dan tidak terstruktur. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipasi dan observasi terstruktur. Observasi non partisipasi, dimana peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. Observasi terstruktur adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang akan diamati, kapan dan dimana

tempatnyanya. Jadi observasi tertentu dilakukan apabila peneliti telah tahu dengan pasti tentang variabel apa yang diamati.

Observasi ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembelajaran di kelas. Apakah sudah sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Proses pelaksanaan pembelajaran mencakup tujuan pembelajaran, pencapaian materi, penggunaan metode yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang dapat meliputi proses eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi, media dan evaluasi. Selain itu juga untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi guru dalam proses pembelajaran di dalam kelas.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara disusun sebagai media untuk menelusuri lebih lanjut tentang hal-hal yang tidak dapat diketahui melalui dokumentasi dan juga untuk menguatkan apa yang ada dalam dokumen. Selain itu juga memudahkan peneliti melakukan tanya jawab tentang hambatan guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, dan pelaksanaan pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.

Wawancara ini dilakukan guna mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, dan pelaksanaan pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat dan bagaimana upaya yang dilakukan guru tersebut dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi.

2. Pedoman Observasi

Pedoman observasi ini sebagai media untuk menguatkan apa yang ada dalam wawancara. Dalam observasi, indra manusia terbatas kemampuannya untuk dapat mengamati segala macam gejala yang dihadapi. Oleh karena itu dalam mengadakan observasi sebaiknya peneliti mempunyai konsep lebih dulu. Konsep tersebut tentang hal-hal apa saja yang diperlukan untuk diamati bagian-bagian mana yang diperlukan, seberapa banyak yang dibutuhkan.

Observasi ini dilakukan untuk memperoleh bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran, apakah sudah sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran, yang berupa tujuan pembelajaran, pemahaman siswa terhadap materi ajar, metode pembelajaran, eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi, dan evaluasi. Selain itu juga untuk mengetahui hambatan-hambatan guru selama proses pembelajaran di dalam kelas. Instrumen penelitiannya berupa pedoman observasi.

F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk mendapatkan data yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dari data-data yang ada terlebih dahulu dilakukan teknik pemeriksaan keabsahan data. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut (Lexy J. Moelong, 2006: 330).

Sub-teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi teknik. Menurut Sugiyono (2010: 274), triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara kemudian dicek dengan observasi, dokumentasi atau kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda. Jadi pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil observasi dan isi suatu dokumen yang berkaitan.

G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis induktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang khusus kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat-sifat umum (Sustrino Hadi, 1997: 42). Adapun langkah-langkah dalam melakukan analisis data adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pencarian, pemilihan, pemfokusan, dan penyederhanaan data yang relevan dengan masalah yang diteliti. Data yang dihasilkan dari dokumen dan wawancara merupakan data yang masih kompleks. Peneliti melakukan pemilihan data yang sesuai atau relevan dan bermakna dengan permasalahan penelitian yaitu mengenai hambatan yang dihadapi guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat. Untuk itu data yang dihasilkan harus disederhanakan kemudian dicari makna yang mendasar.

2. Unitisasi dan Kategorisasi

Data yang telah disederhanakan kemudian disusun secara sistematis ke dalam unit dengan sifatnya masing-masing data dengan menonjolkan hal-hal yang bersifat pokok dan penting yaitu tentang hambatan yang dihadapi guru

Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, dan pelaksanaan pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat. Unit-unit yang telah terkumpul kemudian dipilih dan dikelompokkan sesuai kategori yang ada sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dari hasil penelitian.

3. Display Data

Display data adalah penyajian data ke dalam sejumlah matriks yang sesuai. Tahap ini mempunyai tujuan untuk memberi kemudahan dalam mengkonstruksikan, menginterpretasikan dan menyimpulkan data yang telah dipilih. Bentuk penyajian laporannya adalah deskriptif analitik dan logis karena penyajian laporan ini berusaha mengarah pada kesimpulan.

Data yang dihasilkan dalam bentuk narasi berupa informasi mengenai hambatan yang dihadapi guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat.

4. Kesimpulan dan Verifikasi Data

Data yang telah diproses kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode induktif. Kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang sifatnya masih bersifat sementara. Kesimpulan tersebut kemudian

diverifikasi selama penelitian berlangsung, dengan cara melihat kembali pada reduksi data maupun pada display data, sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari permasalahan penelitian yang mencakup hambatan yang dihadapi guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini berupa gambaran umum, deskripsi data, dan pembahasan hambatan guru pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di SMA se Kabupaten Sleman Barat, dan upaya-upaya apa saja yang dilakukan guru pendidikan kewarganegaraan untuk menghadapi hambatan tersebut untuk mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan Pelaksanaan Pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat.

A. Gambaran Umum

1. SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat

a. SMA Negeri I Seyegan

SMA Negeri 1 Seyegan sebuah sekolah yang terletak di daerah pinggiran Kota Yogyakarta, tepatnya di wilayah Sleman bagian barat, beralamat di Desa Tegal Gentan Margoagung Seyegan Sleman, yang menempati areal tanah seluas 3, 05 hektar. SMA Negeri 1 Seyegan didirikan sejak tahun 1983, tepatnya 1 Juli 1983.

Dari tingkat kepercayaan pemerintah/akreditasi sekolah, sejak tahun 2004 sampai sekarang berpredikat A. Pada perkembangan selanjutnya oleh lembaga penjaminan mutu / LPMP DIY pada awal tahun 2011 SMA Negeri 1 Seyegan ditunjuk dan ditetapkan sebagai sekolah Model Penjaminan Mutu. untuk tingkat SMA bersama-sama dengan SMA N 1 Pleret.

b. SMA Negeri I Minggir

SMA Negeri 1 Minggir diresmikan pada tanggal 27 April 1993 oleh Drs. Soetopo Sahib (Kakanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan) saat itu. Status menjadi sekolah negeri diberikan pada tanggal 5 Oktober 1993 dan tanggal ini dijadikan sebagai tanggal ulang tahun SMA Negeri 1 Minggir.

Pertama kali SMA Negeri 1 Minggir meluluskan siswa sebagai alumni dari tahun 1996. Jika dihitung dari tahun 1996 sampai 2010 ini SMA Negeri 1 Minggir sudah meluluskan sebanyak lima belas kali kelulusan. Untuk mampu bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain maka SMA Negeri 1 Minggir telah memiliki Akreditasi A sejak tahun 2007. Sebagai sekolah yang berpotensi tinggi untuk memajukan bangsa indonesia ini maka SMA Negeri 1 Minggir berusaha untuk menjadikan sekolah yang masuk dalam SSN (Sekolah Standar Nasional), dan pada akhirnya SMA Negeri 1 Minggir telah ditetapkan sebagai Sekolah Standar Nasional (SSN) dari awal bulan Desember 2010.

c. SMA Negeri I Godean

SMA N 1 Godean berdiri pada tanggal 22 Desember 1986 yang beralamat di Jl. Sidokarto No. 5 Godean, Sleman, Yogyakarta seluas \pm 9865 m. Lembaga pendidikan tersebut disahkan berdasarkan SK dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0087/0/1986 tanggal 22 Desember 1986.

d. SMA Negeri 1 Gamping

SMA Negeri 1 Gamping, Sleman berdiri tahun 1992 dan langsung menerima siswa baru, ketika itu masih berafiliasi dengan SMA Negeri 1 Godean. Setahun kemudian, pada tahun 1993 resmi menjadi sekolah negeri dengan nama SMA Negeri 1 Gamping, Sleman yang beralamat di Tegalyoso, Banyuraden, Gamping, Sleman. SMA Negeri 1 Gamping mempunyai luas lahan kira-kira 0.8 ha.

e. SMA Budi Mulia Minggir

SMA Budi Mulia pada mulanya merupakan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) yang diselenggarakan oleh Yayasan Budi Mulia. Karena kebijakan pemerintah mulai tahun 1995 SPG Budi Mulia beralih fungsi menjadi SMA Budi Mulia. Sejak tahun 1996 SMA Budi Mulia diserahkan kepada Yayasan Winayaka Yogyakarta sebagai pengelola SMA Budi Mulia sampai saat ini. SMA Budi Mulia Sleman beralamat di Jl. Kebonagung Km. 24, Sendangagung, Minggir, Sleman, Yogyakarta.

f. SMA Islam 1 Gamping

Sekolah ini didirikan tahun 1962 dengan nama SMA HMI (Himpunan Mahasiswa Islam). HMI merupakan sebuah organisasi terbesar dan tertua yang dahulu telah memiliki beberapa sekolah lanjutan tingkat atas.

Pada saat SMA Islam berkembang pesat dan maju, khususnya SMA Islam 1 Gamping, yang berlokasi di desa Pelemgurih, kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta yang sebelumnya dinamakan Kampung Harjoniwatan, Yogyakarta telah berkembang dengan pesatnya dan kini mempunyai gedung sendiri.

2. Profil Guru SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat

Guru Pendidikan Kewarganegaraan dari SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat pada umumnya memiliki latar belakang pendidikan yang berasal dari jurusan Pendidikan Kewarganegaraan. Hal tersebut dapat dilihat pada uraian berikut :

Tabel 3. Latar Belakang Pendidikan Guru

No.	Nama Sekolah	Nama Guru	Latar belakang Pendidikan
1.	SMA Budi Mulia Minggir	SPL	PKn
2.	SMA Negeri I Seyegan	SBN	PKn
		SNY	PKn
3.	SMA Negeri I Minggir	ZNM	PKn
		SKT	PKn
4.	SMA Islam 1 Gamping	KWD	PKn
		STH	PKn
5	SMA Negeri I Godean	ENW	Hukum
		WDM	PKn
6.	SMA Negeri 1 Gamping	TTR	PKn

B. Deskripsi Data

Hasil penelitian mengenai hambatan guru pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dapat dideskripsikan sebagai berikut :

1. Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

a. Sistematika Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Sistematika Rencana Pelaksanaan Pembelajaran guru SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat dapat dilihat dalam hasil dokumentasi sebagai berikut :

Tabel 4. Komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Komponen	Nama Guru									
	ERW	SKP	STH	TTR	SBN	KWD	SNY	SPL	WDM	ZNM
Identitas Mata Pelajaran	Ada	ada	Ada	ada	ada	Ada	ada	ada	ada	ada
Standar Kompetensi	Ada	ada	Ada	ada	ada	Ada	ada	ada	ada	ada
Kompetensi Dasar	Ada	ada	Ada	ada	ada	Ada	ada	ada	ada	ada
Indikator Pencapaian Kompetensi	Ada	ada	Ada	ada	ada	Ada	ada	ada	ada	ada
Materi Ajar	Ada	ada	Ada	ada	ada	Ada	ada	tidak	ada	ada
Alokasi Waktu	Ada	ada	Ada	ada	ada	Ada	ada	ada	ada	ada
Metode Pembelajaran	Ada	ada	Ada	ada	ada	Ada	ada	ada	ada	ada
Kegiatan Pembelajaran	Ada	ada	Ada	ada	ada	Ada	ada	ada	ada	ada

Penilaian Hasil Belajar	Ada	ada	Ada	ada	ada	Ada	ada	ada	ada	ada
Sumber Belajar	Ada	ada	Ada	ada	ada	Ada	ada	ada	ada	ada

Menurut Permendiknas No 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses, sistematika Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah sebagai berikut :

- 1) Identitas mata pelajaran
- 2) Standar kompetensi
- 3) Kompetensi dasar
- 4) Indikator pencapaian kompetensi
- 5) Tujuan pembelajaran
- 6) Materi ajar
- 7) Alokasi waktu
- 8) Metode pembelajaran
- 9) Kegiatan pembelajaran
- 10) Penilaian hasil belajar
- 11) Sumber belajar

Berdasarkan hasil dokumentasi tentang sistematika Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dari guru-guru SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat sudah mengacu pada Permendiknas No 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses, sehingga sistematika Rencana Pelaksanaan Pembelajaran telah sesuai dengan yang ada di dalam Permendiknas No 41 Tahun 2007. Hal ini juga dikarenakan mereka menggunakan sistematika yang diterapkan oleh Musyawarah Guru Mata Pelajaran yang berpedoman pada Permendiknas No 41 Tahun 2007.

b. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Pada penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, guru berpedoman pada model Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang dibuat semua guru melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran, bahkan ada guru yang langsung menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dengan mengisi kolom-kolom yang sudah disediakan oleh Musyawarah Guru Mata Pelajaran.

Hasil penelitian melalui wawancara dengan responden guru pendidikan kewarganegaraan mengenai penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, dapat disajikan sebagai berikut:

Narasumber ERW dalam wawancara pada tanggal 21 Mei 2011 yang terkait dengan penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan mengemukakan bahwa menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, disesuaikan dengan silabus, pertama-tama mengambil satu unit pembelajaran yang akan diterapkan dalam pembelajaran, kemudian menulis standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat dalam unit tersebut yang di ambil dari silabus, menentukan indikator untuk mencapai kompetensi dasar tersebut, menentukan alokasi waktu yang diperlukan untuk mencapai indikator tersebut, merumuskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran tersebut, menentukan materi pembelajaran yang akan

diberikan/dikenakan kepada siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan, memilih metode pembelajaran yang dapat mendukung sifat materi dan tujuan pembelajaran, dan menyusun langkah-langkah kegiatan pembelajaran pada setiap satuan rumusan tujuan pembelajaran, yang bisa dikelompokkan menjadi kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Jika alokasi waktu untuk mencapai satu kompetensi dasar lebih dari 2 (dua) jam pelajaran, maka membagi langkah-langkah pembelajaran menjadi lebih dari satu pertemuan, di mana pembagian setiap jam pertemuan bisa didasarkan pada satuan tujuan pembelajaran atau sifat/tipe/jenis materi pembelajaran. Setelah itu menyebutkan sumber/media belajar yang akan digunakan dalam pembelajaran secara kongkret dan untuk setiap bagian/unit pertemuan dan menentukan teknik penilaian, bentuk dan contoh instrumen penilaian yang akan digunakan untuk mengukur ketercapaian kompetensi dasar atau tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan.

Narasumber SKP dalam wawancara pada tanggal 14 Mei 2011 yang terkait dengan penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan mengemukakan bahwa menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yaitu menulis standar kompetensi dan kompetensi dasar yang diambil dari silabus, kemudian merumuskan indikator untuk mencapai kompetensi dasar tersebut, menentukan alokasi waktu yang diperlukan, merumuskan tujuan pembelajaran, menentukan materi pembelajaran yang

akan diajarkan kepada siswa, memilih metode pembelajaran, dan menyusun langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang bisa dikelompokkan menjadi kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Setelah itu menyebutkan sumber/media belajar dan menentukan teknik penilaian, bentuk dan contoh instrumen penilaian yang akan digunakan baik itu tes maupun non tes.

Menurut narasumber lainnya seperti narasumber STH dalam wawancara pada tanggal 19 Mei 2011, narasumber TTR dalam wawancara pada tanggal 31 Mei 2011, narasumber SBN dalam wawancara pada tanggal 14 Mei 2011, narasumber KWD dalam wawancara pada tanggal 21 Mei 2011, narasumber SNY dalam wawancara pada tanggal 09 Mei 2011, narasumber SPL dalam wawancara pada tanggal 10 Mei 2011, narasumber WDM dalam wawancara pada tanggal 24 Mei 2011, dan narasumber ZNM dalam wawancara pada tanggal 11 Mei 2011 yang terkait dengan penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan sama dalam melaksanakan langkah-langkah penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran tersebut.

Sedangkan bagaimana penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang dilakukan oleh guru SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat dapat dilihat dalam hasil dokumentasi sebagai berikut :

Tabel 5. Langkah-langkah Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Nama	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ERW	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
SKP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
STH	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
TTR	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
SBN	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
KWD	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
SNY	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
SPL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
WDM	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
ZNM	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Keterangan :

- 1) Mengambil satu unit pembelajaran yang akan diterapkan dalam pembelajaran.
- 2) Menulis standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat dalam unit tersebut.
- 3) Menentukan indikator untuk mencapai kompetensi dasar tersebut.
- 4) Menentukan alokasi waktu yang diperlukan untuk mencapai indikator tersebut.
- 5) Merumuskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran tersebut.
- 6) Menentukan materi pembelajaran yang akan diberikan/dikenakan kepada siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan.
- 7) Memilih metode pembelajaran yang dapat mendukung sifat materi dan tujuan pembelajaran.
- 8) Menyusun langkah-langkah kegiatan pembelajaran pada setiap satuan rumusan tujuan pembelajaran, yang bisa dikelompokkan menjadi kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.
- 9) Jika alokasi waktu untuk mencapai satu kompetensi dasar lebih dari 2 (dua) jam pelajaran, maka membagi langkah-langkah pembelajaran menjadi lebih dari satu pertemuan. Pembagian setiap jam pertemuan bisa didasarkan pada satuan tujuan pembelajaran atau sifat/tipe/jenis materi pembelajaran.
- 10) Menyebutkan sumber/media belajar yang akan digunakan dalam pembelajaran secara kongkret dan untuk setiap bagian/unit pertemuan.
- 11) Menentukan teknik penilaian, bentuk dan contoh instrumen penilaian yang akan digunakan untuk mengukur ketercapaian kompetensi dasar atau tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan.

Berdasarkan dokumentasi yang penulis lihat pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran guru-guru Pendidikan Kewarganegaraan se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat, diketahui bahwa :

1) SMA N I Minggir

a) Narasumber SKP telah memasukan *civics knowledge* dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, hal tersebut terlihat dari komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran materi pembelajaran yang telah mencakup materi substansi yang telah diketahui oleh warga negara. Narasumber SKP juga telah memasukkan komponen *civics skill* dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran metode pembelajaran yaitu diskusi yang secara lebih lanjut dijabarkan dalam komponen langkah-langkah pembelajaran. Metode pembelajaran diskusi memuat *civics skill* yaitu *intellectual skill* (ketrampilan intelektual) yaitu berpikir kritis dan *participation skill* (ketrampilan partisipasi). Pada komponen indikator Rencana Pelaksanaan Pembelajaran juga telah memuat unsur keterampilan intelektual warga negara yaitu mengidentifikasi dan menggambarkan. Selain itu dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran juga telah memuat unsur keterampilan partisipasi warga negara yaitu berinteraksi yang terlihat dalam komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran metode pembelajaran yaitu diskusi. Namun narasumber SKP tidak memasukkan *civics dispositions* (karakter

kewarganegaraan). Hal ini terlihat dari tidak adanya komponen karakter yang harus dimunculkan dalam pembelajaran. Selain itu komponen indikator dan tujuan pembelajarannya tidak mencakup pembentukan sikap. Pada komponen penilaian, narasumber SKP juga tidak menyantumkan penilaian afektif.

b) Narasumber ZNM sudah memasukan *civics knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan) dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Hal tersebut dapat terlihat dalam komponen materi pembelajarannya yang telah mencakup materi substansi yang harus diketahui oleh warga Negara. Selain itu narasumber ZNM juga telah memasukkan *civics skills* dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Hal tersebut terlihat dalam komponen *life skill* dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajarannya. Pada komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran metode pembelajaran juga terlihat bahwa narasumber ZNM juga memasukkan *civics skills* dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang mencakup intelektual skill yaitu ketrampilan berpikir kritis. Metode pembelajaran tersebut adalah tanya jawab atau berpikir kritis, pemberian tugas, *discoveri* dengan studi pustaka, dan presentasi. Selain itu dalam komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran langkah-langkah kegiatan pembelajaran pada kegiatan inti juga terlihat bahwa narasumber ZNM telah memasukkan intelektual skill yaitu dengan meminta siswa melakukan tanya jawab, presentasi, dan penyimpulan hasil *discoveri*. Pada keterampilan intelektual juga dapat dilihat pada komponen Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran indikator Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Komponen indikator Rencana Pelaksanaan Pembelajaran narasumber ZNM telah mencakup unsur keterampilan intelektual warga negara yaitu mengidentifikasikan. Selain itu narasumber ZNM juga memasukkan *civics skill* yaitu *participation skill* (ketrampilan partisipasi) yaitu dengan menggunakan metode pembelajaran diskusi dan kerja kelompok. Narasumber ZNM juga telah memasukkan unsur keterampilan partisipasi warga negara yaitu berinteraksi terhadap objek-objek yang berkaitan dengan masalah publik dengan bertanya jawab dan diskusi. Narasumber ZNM juga memasukkan *civics depositions* dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, hal tersebut dapat dilihat dari komponen indikator. Komponen indikator yaitu agar siswa menunjukkan perilaku atau sikap dan berperan aktif dalam berpolitik. Walaupun begitu narasumber ZNM tidak mencantumkan komponen karakter yang harus dimunculkan dalam pembelajaran. Namun dalam komponen penilaian narasumber ZNM telah memasukan penilaian afektif

2) SMA N 1 Godean

Pada penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran narasumber ERW telah mencantumkan *civics knowledge*, yang dapat dilihat dalam komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran materi pembelajaran yang telah mencakup materi substansi yang harus diketahui oleh warga negara.

Narasumber ERW juga telah memasukan *civics skills*, hal tersebut terlihat dari komponen metode pembelajaran yaitu kerja mandiri, eksplorasi, diskusi, dan presentasi yang secara lebih lanjut dijelaskan dalam langkah-langkah pembelajaran. Metode pembelajaran tersebut telah mencakup *civics skills* yaitu *intellectual skill* (ketrampilan intelektual) yaitu berpikir kritis dengan metode kerja mandiri, eksplorasi, dan presentasi. Selain itu metode diskusi yang terlihat dalam komponen metode pembelajaran narasumber ERW juga telah mencakup *civics skills* yaitu *participation skill* (keterampilan partisipasi). Pada indikator Rencana Pelaksanaan Pembelajaran juga telah mencakup unsur keterampilan intelektual yaitu menjelaskan, mengidentifikasi dan menggambarkan. Metode pembelajaran diskusi juga telah mengandung unsur keterampilan partisipasi warga negara yaitu berinteraksi. Narasumber ERW juga telah memasukan *civics depositions*, hal ini terlihat dalam komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran langkah-langkah pembelajaran yaitu pada kegiatan inti terdapat karakter yang diinginkan oleh guru dalam pembelajaran. Selain itu dalam penilaian guru narasumber ERW juga telah mencantumkan penilaian afektif. Hal ini juga sama dengan penyusunan yang dilakukan oleh narasumber WDM yang menggunakan pedoman yang sama.

3) SMA N 1 Seyegan

Pada penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran narasumber SNY telah memasukan *civics knowledge*, hal tersebut terlihat pada komponen

indikator dan tujuan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yaitu agar siswa dapat mengetahui materi-materi substansi yang harus diketahui warga negara. Hal ini juga terlihat pada materi pembelajarannya yang sudah mencakup pengetahuan-pengetahuan kewarganegaraan. Pada penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran juga telah memasukkan *civics skills*, hal tersebut terlihat dari metode yang digunakan oleh narasumber SNY berupa eksplorasi, diskusi dan presentasi. Secara lebih lanjut juga terlihat dalam komponen langkah-langkah pembelajaran pada kegiatan inti yaitu siswa menjawab pertanyaan yang diajukan guru, menguraikan materi dan membuat kesimpulan. Pada berbagai metode tersebut guru mengembangkan keterampilan dari pengetahuan kewarganegaraan, sehingga siswa dapat memanfaatkannya untuk mengatasi masalah-masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan metode tersebut narasumber SNY juga telah memberikan ketrampilan kewarganegaraan termasuk *intellectual skill* (ketrampilan intelektual) meliputi ketrampilan berpikir kritis, di mana siswa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru, menguraikan, dan membuat kesimpulan materi. Namun narasumber SNY tidak memasukkan *civics dispositions* dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Hal tersebut terlihat dari tidak adanya komponen nilai-nilai karakter yang dimunculkan dalam pembelajaran. Selain itu tidak ada point pembentukan sikap dalam indikator dan tujuan pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh guru.

Walaupun begitu dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran terdapat kriteria penilaian afektif. Hal ini juga sama dengan penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran narasumber SBN karena narasumber SBN menggunakan Rencana Pelaksanaan yang sama dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran narasumber SNY.

4) SMA Islam 1 Gamping

Pada penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran narasumber KWD telah memasukkan *civics knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan) yaitu pada komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran materi pembelajaran. Materi-materi pembelajaran yang tercantum pada narasumber KWD telah mengandung materi substansi yang harus diketahui oleh warga negara sesuai dengan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan. Narasumber KWD juga telah memasukkan *civics skills*. Hal tersebut dapat dilihat dari metode pembelajaran yang digunakan oleh narasumber KWD yaitu diskusi, latihan dan penugasan. Selain itu hal tersebut juga dapat dilihat dari komponen langkah-langkah pembelajaran pada kegiatan inti di mana guru menugaskan siswa untuk memberikan contoh terhadap materi yang diberikan dan menganalisis materi yang sudah diberikan. Semua itu menunjukkan bahwa narasumber KWD telah memasukkan ketrampilan kewarganegaraan dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, sehingga siswa dapat memanfaatkannya untuk menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara. *Civics skills* yang tercakup dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran narasumber KWD mengandung *intellectual skill* (ketrampilan intelektual) yang mencakup ketrampilan berpikir kritis yaitu ketrampilan mencontohkan dan menganalisis yang terkait dengan masalah-masalah publik. Metode yang digunakan narasumber KWD juga mengembangkan dan menerapkan cara berpikir kritis, rasional, dan kreatif untuk mendukung kompetensi dasar. Selain itu dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran narasumber KWD juga menyantumkan *civics skills* yang mencakup ketrampilan partisipasi (*participation skill*) meliputi berinteraksi yang terlihat dalam metode yang digunakan oleh narasumber KWD yaitu diskusi dan penugasan. Narasumber KWD juga sudah mencantumkan *civics depositions* (karakter kewarganegaraan) dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Hal tersebut dapat dilihat dari komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran indikator dan tujuan pembelajaran, narasumber KWD yaitu menginginkan agar siswa dapat memiliki sikap-sikap warga Negara yang mendukung efektivitas partisipasi politik. Hal ini juga sama dengan penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang dibuat oleh narasumber STH, di mana mereka menggunakan pedoman yang sama.

5) SMA N 1 Gamping

Dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran narasumber TTR telah memasukan *civics knowledge*, yang terlihat dari komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajarannya yaitu materi pembelajaran yang mengandung materi substansi yang harus diketahui oleh warga negara. Narasumber TTR juga telah memasukan *civics skills* yang dapat dilihat di dalam metode pembelajaran yang sudah tercantum *intellectual skill* (ketrampilan intelektual) dengan berpikir kritis dan *participation skill* (ketrampilan partisipasi). Di mana di dalam metode pembelajarannya terdapat tanya jawab, presentasi, penugasan, dan diskusi. Begitu juga dalam di dalam unsure *civics skills* juga mencakup *intellectual skill* dan *participation skill* yang terdapat dalam indikator, tujuan, dan metode pembelajarannya. Namun narasumber TTR tidak memasukkan *civics depositions* dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, hal tersebut terlihat dari tidak adanya komponen nilai-nilai karakter yang dimunculkan dalam pembelajaran.

6) SMA Budi Mulia Minggir

Pada penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran narasumber SPL telah memasukkan *civics knowledge* terlihat dari indikator dan tujuan pembelajarannya yang menginginkan agar siswa memiliki materi substansi yang harus diketahui oleh warga negara. Narasumber SPL juga telah memasukkan *civics skill*, hal tersebut terlihat pada metode pembelajarannya

yaitu diskusi yang kemudian secara lebih lanjut dijelaskan dalam langkah-langkah pembelajaran. Metode diskusi ini telah mencakup unsur ketrampilan partisipasi yaitu berinteraksi. Selain itu ketrampilan kewarganegaraan dapat dilihat dari indikator dan tujuan pembelajaran yang telah memuat unsur ketrampilan intelektual yaitu menganalisis dan menggambarkan. Narasumber SPL juga telah memasukkan *civics depositions*, yang dapat dilihat dari langkah-langkah pembelajaran yaitu pada kolom aspek karakter yang dikembangkan.

Berdasarkan dokumentasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran tentang proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi di dalam kegiatan inti pembelajaran, dapat diketahui bahwa semua Rencana Pelaksanaan Pembelajaran tidak mencantumkan proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara, sebagai berikut :

Menurut narasumber ERW, hal tersebut dikarenakan guru kurang paham tentang proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, di mana mereka masih berpikir komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran seperti yang tercantum di dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Kemudian menurut narasumber SNY bahwa eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi sudah terinternalisasi dalam seluruh kegiatan pembelajaran di Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Jadi intinya sudah ada meskipun tidak tercantum secara langsung eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi di dalam Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran. Hampir semua guru Pendidikan Kewarganegaraan SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat berpendapat seperti itu, bahkan ada guru yang tidak mengetahui sama sekali apa yang dimaksud dengan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi.

Kemudian dalam penilaian hasil belajar di dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, sebagian guru menggunakan teknik penilaian tes tertulis (isian, benar salah, menjodohkan, pilihan ganda, uraian dan unjuk kerja) dan nontes (panduan observasi, kuesioner, panduan wawancara, dan rubrik). Guru menggunakan skor penilaian dalam penentuan nilainya. Guru sering menggunakan bentuk instrumen pilihan ganda dan uraian untuk penilain tertulis, di mana dalam penskoran untuk pilihan ganda bobot nilainya antara soal yang satu dengan yang lain sama sedangkan untuk uraian penskoran nilai bobotnya berbeda tergantung pertanyaanya.

Jadi berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran belum sesuai dengan langkah-langkah penyusunan yang harus dilakukan oleh guru terutama dalam perumusan indikator dan proses kegiatan inti eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi. Hal ini dapat dilihat dari langkah-langkah penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran di atas.

Perumusan indikator dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran guru SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat sudah

mencakup *civics knowledge*, *civics skills*, dan *civics dispositions*, meskipun ada beberapa guru yang di dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran belum mencantumkan semuanya seperti adanya beberapa guru tidak mencantumkan *civics dispositions* yaitu nilai-nilai karakter dalam Pendidikan Kewarganegaraan di dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.. Kemudian dalam kegiatan pembelajaran dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran juga tidak dicantumkan tentang eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Guru dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran tidak secara eksklusif mencantumkan tentang proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, namun sudah mengandung eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi di dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.

2. Pelaksanaan Pembelajaran

Hasil penelitian mengenai pelaksanaan pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat yang diperoleh melalui observasi yang dapat dideskripsikan sebagai berikut :

a. SMA Negeri I Seyegan

Tanggal 14 Mei 2011 Kelas XI (IPS I) dan XI (IPA II)

1) Proses Kegiatan Belajar Mengajar Kelas XI (IPS 1)

Berdasarkan hasil observasi yang diketahui Kegiatan Belajar Mengajar dalam kegiatan pendahuluan diawali dengan salam, berdoa dan

menyampaikan materi yang akan dipelajari. Guru memberi pertanyaan untuk menggali pengetahuan awal siswa. Hal ini sesuai dengan yang ada di Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Pada kegiatan inti guru menggunakan metode ceramah dan tanya jawab tanpa media pendukung yang digunakan dalam pembelajaran. Metode ceramah dapat memberikan landasan bagi pembangunan pengetahuan siswa. Metode dan tanya jawab dapat memfasilitasi interaksi antara peserta didik dan guru. Metode tanya jawab juga membuat peserta didik aktif dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa guru telah melakukan proses eksplorasi dengan menggunakan beragam pendekatan pembelajaran untuk membangun pengetahuan dasar siswa. memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencatat dengan memberi keterangan mana yang perlu dicatat. Kemudian guru juga telah melakukan proses elaborasi, hal tersebut dapat dilihat dari guru yang memberi kesempatan siswa untuk berpikir dan menganalisis soal dalam tanya jawab. Proses konfirmasi juga dilakukan oleh guru dengan melakukan umpan balik kepada siswanya dalam bentuk lisan dan tertulis. Hal ini sesuai dengan kegiatan inti yang ada di Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, dimana guru melakukan tanya jawab seputar materi yang disampaikan dan menjelaskan materi tersebut, kemudian menyuruh siswanya untuk menguraikan materi tersebut melalui tanya jawab.

Kegiatan penutup tidak berjalan sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Di mana guru tidak memberi kesimpulan di akhir pembelajaran. Tetapi langsung memberi salam penutup. Sumber pembelajarannya berupa Lembar Kegiatan Siswa saja, padahal di dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran menggunakan berbagai macam sumber belajar dari buku sampai internet.

Berdasarkan hasil wawancara kegiatan penutup tidak dapat dilakukan sesuai dengan yang ada di Rencana Pelaksanaan Pembelajaran karena terbatasnya waktu yang dimiliki oleh guru, di mana guru tidak sempat memberikan kesimpulan dan tindak lanjut. Untuk sumber belajar dari berbagai buku, internet dan lain-lainnya itu sebagai bahan acuan bagi guru, tetapi di dalam kelas yang digunakan hanya Lembar Kegiatan Siswa karena siswa hanya memiliki Lembar Kegiatan Siswa saja.

Jadi kesimpulan Pelaksanaan Pembelajaran tidak sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, di mana guru tidak menarik kesimpulan di akhir pembelajaran dan melakukan tindak lanjut.

2) Proses Kegiatan Belajar Mengajar di Kelas XI (IPA 2)

Berdasarkan hasil observasi, dikarenakan materi sudah habis, maka pada pertemuan kali ini hanya mengerjakan soal. Guru dalam kegiatan pendahuluan mengawali dengan memberi salam, berdoa, dan menanyakan soal-soal mana yang belum tahu jawabannya.

Kegiatan inti diisi dengan mengerjakan soal-soal dengan sumber belajar dari Lembar Kegiatan Siswa. Pada proses eksplorasi guru melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik/tema materi yang akan dipelajari dan belajar dari aneka sumber. Guru juga melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap pembelajaran. Guru dalam proses elaborasi memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, dan menyelesaikan masalah dengan menyuruh siswa mengerjakan soal-soal dari Lembar Kegiatan Siswa. Kemudian setelah mengerjakan soal, guru melakukan umpan balik dengan memberikan penjelasan kepada siswa jawaban yang benar (proses konfirmasi)

Pada kegiatan penutup, guru menarik kesimpulan selama pembelajaran, kemudian memberi tugas rumah/pekerjaan rumah untuk mengerjakan soal-soal Lembar Kegiatan Siswa yang belum dibahas. Guru memberikan salam penutup.

Berdasarkan hasil wawancara karena materinya sudah habis maka untuk pelaksanaan pembelajaran kali ini diisi membahas dan mengerjakan Lembar Kegiatan Siswa dan melakukan tanya jawab saja.

Jadi berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dalam pelaksanaan pembelajarannya tidak mengacu pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.

b. SMA Negeri 1 Minggir

Tanggal 11 Mei 2011 di kelas X3 dan tanggal 14 Mei 2011 di kelas X4

1) Proses kegiatan belajar mengajar di kelas X3

Berdasarkan hasil observasi, dapat diketahui, kegiatan pendahuluan dibuka dengan guru mengawali salam, melakukan presensi dan menyampaikan materi yang akan dipelajari. Guru kemudian menggali pengetahuan siswa dengan melakukan tanya jawab. Hal ini sudah sesuai dengan yang ada di dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.

Pada kegiatan inti guru tidak selalu melakukan metode pembelajaran sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran yang di dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran seharusnya menggunakan metode diskusi, untuk pelaksanaan di kelas sering berubah menggunakan metode yang digunakan adalah ceramah dan tanya jawab tanpa media pendukung. Jadi dalam kegiatan inti guru menggunakan ceramah dan tanya jawab. Pada eksplorasi guru menjalin komunikasi aktif dengan siswanya dengan melakukan tanya jawab dulu, hal ini untuk mengetahui kemampuan pemahaman muridnya.. Kemudian dalam elaborasi guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mencatat dengan memberi waktu untuk mencatat hal-hal yang penting. Kemudian guru memberikan kesempatan siswa untuk berpikir dan menganalisis soal dengan melakukan tanya jawab. Proses konfirmasi

guru melakukan umpan balik dengan menyimpulkan dari kegiatan tanya jawab. Sumber belajar guru menggunakan berbagai buku, tetapi siswanya hanya memakai Lembar Kegiatan Siswa dan buku paket yang dipinjam dari perpustakaan.

Penutup guru memberi soal dan pernyataan untuk dijabarkan (dicontohkan) sebagai pekerjaan rumah. Kemudian memberikan salam penutup.

Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan pembelajaran adalah hal metode pembelajaran tidak sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran karena siswa lebih mudah memahami materi yang diajarkan jika menggunakan metode ceramah, maka dalam pelaksanaannya yang seharusnya menggunakan metode diskusi berubah menjadi metode ceramah dan tanya jawab.

Jadi kesimpulan dari hasil observasi dan hasil wawancara dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembelajaran tidak sesuai dengan yang ada di Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.

2) Pada kegiatan belajar mengajar di kelas X4

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa kegiatan pendahuluan dibuka dengan guru mengawali pelajaran dengan salam, berdoa dan menyampaikan indikator yang dicapai dengan ditulis di papan tulis sehingga siswa tahu apa yang akan dicapai. Guru menggali pengetahuan siswa

dengan tanya jawab. Hal ini sesuai dengan yang ada di Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.

Pada kegiatan inti menggunakan metode yang digunakan adalah ceramah, diskusi dan tanya jawab tanpa ada media pendukung yang digunakan. Pelaksanaan pembelajaran diisi dengan diskusi, tetapi sebelumnya dalam proses eksplorasi guru memberi ceramah dan tanya jawab supaya siswa dapat memahami materi yang diajarkan. Hal ini untuk membangun pengetahuan dasar siswa. Siswa. Pada elaborasi guru memfasilitasi peserta didik melalui diskusi untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis. Guru memberikan kesempatan siswa untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan masalah dan bertindak tanpa rasa takut. Kemudian memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif. Guru memfasilitasi peserta didik berkompetensi secara sehat untuk meningkatkan peserta didik. Metode diskusi dengan guru membuat siswa berkelompok dan memberi tugas yang harus dikerjakan berkelompok. Jadi guru membimbing siswa dalam kelompok dengan menentukan kelompok dan menjelaskan apa yang akan didiskusikan. Setelah selesai diskusi, guru memberi kesempatan kelompok untuk mempresesntasikan hasil diskusi. Satu kelompok mempresentasikan dan kemudian kelompok lain (3 kelompok lainnya) membahas yaitu menanyakan, mengkritik dan memberi saran, hal ini berurutan dari satu kelompok ke kelompok lainnya. Di sini guru memberi

kesempatan siswa untuk mengutarakan pendapat. Kemudian proses konfirmasi, guru merespon dan menanggapi jalannya diskusi di mana guru mengkonfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi. Guru memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan maupun tertulis. Pelaksanaannya ada beberapa siswa yang ramai, malahan ada beberapa siswa yang sampai ketiduran. Media pembelajarannya di dalam Rencana Pelaksanaan adalah skema sistem politik di Indonesia. Sumber belajar yang digunakan oleh siswa adalah Lembar Kegiatan Siswa.

Pada kegiatan penutup, guru memberikan kesimpulan apa yang diperoleh dari hasil diskusi tersebut. Kemudian guru memberikan salam penutup.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui pelaksanaan pembelajaran tidak sesuai dengan Rencana Pelaksanaan, di mana kegiatan inti dalam menggunakan metode diskusi tidak berjalan lancar dikarenakan murid yang ramai sehingga diskusi tidak selesai sesuai dengan waktunya. Hal ini menyebabkan dalam pelaksanaan pembelajaran tidak jadi menggunakan media pembelajaran berupa skema sistem politik di Indonesia karena waktu yang sudah habis.

Jadi dari hasil observasi dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembelajaran tidak sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.

c. SMA Negeri 1 Godean

Tanggal 16 Mei 2011 Kelas XI IPS 1

Berdasarkan hasil observasi, dapat diketahui bahwa dalam kegiatan pendahuluan guru mengawali pelajaran dengan salam, doa dan menyampaikan materi apa yang akan diajarkan. Guru menyuruh siswa untuk membaca ulang materi pelajaran untuk menggali pengetahuan awal siswa. Hal ini sesuai dengan yang ada di Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.

Kegiatan inti tidak berjalan sesuai dengan yang ada di Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, di mana metode atau strategi yang digunakan adalah permainan (tanya jawab) tanpa menggunakan media pendukung dalam proses pembelajaran. Hal ini dikarenakan sekolah sedang mengadakan acara perpisahan bagi siswa kelas tiga sehingga kondisi sekolah yang kurang kondusif dan pelaksanaan pembelajaran tidak sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran di mana metode pembelajaran berubah. Guru mengawali proses eksplorasi guru melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik/tema materi yang akan dicapai. Guru memfasilitasi terjadinya interaksi antara peserta didik dengan gurunya. Pada permainan ini guru menerangkan dan menyuruh siswanya untuk membentuk lingkaran, kemudian menyanyikan lagu nasional sambil memutar pulpen. Kemudian proses elaborasi guru memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, di mana saat guru bilang *stop*, maka siswa yang memegang pulpen

harus mengambil undian soal dan lalu memberikan jawaban. Guru memberikan kesempatan kepada siswanya untuk berpikir, menganalisis, dan menyelesaikan masalah. Guru kemudian melakukan konfirmasi, guru memberikan umpan balik dengan membenarkan/menanggapi apakah jawabannya salah atau benar. Guru menanggapi dengan memberi pertanyaan lagi supaya dijawab dengan lebih rinci. Apabila siswa tersebut tidak bisa menjawab, maka guru memberi kesempatan siswa lain untuk menjawab. Guru memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna dalam mencapai kompetensi dasar, berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan, dengan menggunakan bahasa yang baku dan benar, membantu menyelesaikan masalah, memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan hasil eksplorasi, memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh dan memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum berpartisipasi aktif. Sumber belajar yang digunakan siswa adalah buku paket dan Lembar Kegiatan Siswa.

Pada kegiatan penutup, guru menutup dengan salam. Namun sebelumnya memberi kesimpulan terlebih dahulu.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembelajaran tidak sesuai dengan yang ada di Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, seperti sekarang ini karena minggu jam pelajarannya tidak

efektif dengan adanya acara perpisahan bagi kelas 3 maka metode berubah tidak sesuai dengan yang ada di Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, metode yang digunakan yaitu metode dengan menggunakan permainan tanya jawab. Siapa yang ditunjuk guru, harus menjawab pertanyaan dari guru.

Jadi dapat disimpulkan dari hasil observasi dan hasil wawancara bahwa pelaksanaan pembelajaran tidak sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.

d. SMA Negeri 1 Gamping

Tanggal 28 Mei 2011 di kelas XC

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa kegiatan pendahuluan diawali dengan guru memberikan salam, berdoa dan menyampaikan materi yang akan diajarkan.

Kegiatan inti ini menggunakan metode ceramah dan tanya jawab, tanpa menggunakan media pendukung. Kegiatan intinya diawali dengan proses eksplorasi dengan memfasitasi terjadinya interaksi antara peserta didik dengan gurunya. Guru memberikan catatan di papan tulis, kemudian ditenangkan dan dijelaskan apa yang ditulis di papan tulis, dan dilanjutkan dengan melibatkan peserta didik secara aktif melalui tanya jawab. Pada elaborasi guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mencatat yang ada di papan tulis dan merangkum materi dari buku paket. Guru membiasakan peserta didik membaca dan menulis. Pada pelaksanaan pembelajaran banyak

waktu yang terbuang dengan sia-sia. Hal ini dikarenakan siswa yang pasif dan ramai sendiri. Waktu terbuang hanya untuk mengatur siswa dan mengingatkan siswa agar tidak ramai. Selain itu dalam pelaksanaannya saat siswa diberikan tugas untuk merangkum, guru meninggalkan kelasnya sehingga pelaksanaan pembelajaran tidak konduktif. Kemudian dalam proses konfirmasi guru melakukan umpan balik dengan menjelaskan kembali apa yang tadi dipelajari dari berbagai sumber secara lisan. Sumber belajar yang digunakan dalam pembelajaran yaitu buku paket dan Lembar Kegiatan Siswa.

Kegiatan penutup tidak sesuai dengan yang ada di Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, di mana guru langsung mengucapkan salam tanpa memberikan kesimpulan dahulu.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran untuk kegiatan penutup tidak melakukan tindak lanjut dan menarik kesimpulan. Hal ini dikarenakan waktu yang telah habis, yang disebabkan karena siswanya yang ramai sendiri atau karena materinya yang banyak. Selain itu dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang harusnya untuk satu kali tatap muka bisa menjadi dua kali.

Jadi untuk kesimpulannya menurut hasil observasi dan hasil wawancara dalam pelaksanaan pembelajaran tidak sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran terutama dalam kegiatan penutup. Hal ini dikarenakan waktu yang sudah habis.

e. SMA Budi Mulia Minggir

Tanggal 11 Mei 2011, kelas XI (IPS)

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa proses kegiatan belajar mengajar di dalam kelas berjalan dengan baik meskipun muridnya hanya ada 2 siswa (meskipun jumlah totalnya 4 siswa). Kegiatan pendahuluan diawali dengan salam dan berdoa kemudian dilanjutkan dengan menyampaikan materi yang akan dipelajari (kelanjutan dari materi kemarin). Setelah itu guru langsung melakukan tanya jawab guna menggali pengetahuan siswa. Hal ini sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.

Kegiatan inti yang ditulis dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran menggunakan metode ceramah dan diskusi tapi pada kenyataannya tidak dilakukan diskusi, hanya melakukan metode ceramah dan tanya jawab. Hal ini disesuaikan dengan kondisi siswa yang hanya terdiri dari 2 siswa saja. Guru memberi kesempatan kepada siswanya untuk mencatat, di saat gurunya mencatat di papan tulis. Proses eksplorasi dalam kegiatan inti guru memberi penjelasan dan menyuruh siswa untuk mencatat. Guru memfasilitasi terjadinya interaksi antara peserta didik dengan gurunya. Kemudian untuk elaborasi guru melakukan tanya jawab untuk menggali tentang pemahaman siswa terhadap materi tersebut. Guru memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis. Guru melakukan konfirmasi dengan memberikan umpan balik

dan penguatan dalam bentuk lisan maupun tertulis. Sumber belajar yang digunakan oleh siswa pun hanya sebatas buku paket edisi lama.

Kegiatan penutup seharusnya ada evaluasi dan penugasan, kenyataan tidak dilakukan karena kehabisan waktu, sehingga penugasan latihan dijadikan pekerjaan rumah. Selain itu juga tidak ada kesimpulan materi yang telah diajarkan oleh guru tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran guru menggunakan metode ceramah dan Tanya jawab. Hal ini tidak sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang seharusnya menggunakan metode diskusi. Ketidaksesuaian ini dikarenakan guru dalam melaksanakan pembelajaran menyesuaikan dengan kondisi siswanya. Selain itu karena kehabisan waktu, maka dalam kegiatan penutup tidak sesuai dengan yang ada di Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, di mana guru tidak menarik kesimpulan dan dalam kegiatan tindak lanjut yang seharusnya mengerjakan soal latihan di dalam kelas setelah pembelajaran dijadikan pekerjaan rumah karena waktu sudah habis.

Jadi berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembelajaran tidak sesuai dengan yang ada di Rencana Pelaksanaan Pembelajaran terutama dalam hal metode pembelajaran dan kegiatan penutup.

f. SMA Islam 1 Gamping

Tanggal 19 Mei 2011 di kelas XI IPA dan 21 Mei 2011 di kelas XA

1) Proses kegiatan belajar mengajar di kelas XI IPA

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa kegiatan pendahuluan diawali dengan guru memberi salam dan berdoa. hal ini tidak sesuai dengan yang ada di Rencana Pelaksanaan pembelajaran.

Kegiatan intinya menggunakan metode yang digunakan ceramah, tanpa metode pendukung dalam proses pembelajaran. Tetapi dalam pelaksanaannya hanya pembahasan soal-soal yang ada di dalam Lembar Kegiatan Siswa. Di mana dalam tahap eksplorasi guru melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik/tema materi yang akan dipelajari dan belajar dari aneka sumber. Guru juga melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap pembelajaran. Proses elaborasi, guru memberikan kesempatan siswanya untuk berpikir, menganalisis. Siswa diberi waktu untuk mengerjakan soal yang kemudian soal itu dibahas bersama. Apabila ada soal yang tidak bisa dijawab oleh siswanya, maka gurunya memberikan penjelasan. Kemudian proses konfirmasi guru melakukan umpan balik dan penguatan secara lisan. Untuk tujuan pembelajaran belum tercapai karena siswa belum paham betul dan dalam pelaksanaannya banyak siswa yang ramai sendiri, sehingga pelaksanaan pembelajaran tidak berjalan baik. Sumber belajar yang digunakan adalah buku paket dan Lembar Kegiatan Siswa.

Pada kegiatan penutup, guru hanya mengucapkan salam saja. Guru tidak memberikan kesimpulan dan tindak lanjut.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa dalam kegiatan pendahuluan guru tidak melakukan apresepasi untuk mengulas kembali materi yang telah diajarkan minggu lalu. Hal ini dikarenakan dalam kegiatan inti, guru melakukan pembahasan soal-soal yang ada di dalam Lembar Kegiatan Siswa yang dalam pembahasan tersebut mencakup materi minggu lalu. Kemudian untuk metode yang seharusnya digunakan adalah metode ceramah, tetapi karena sumber belajarnya menggunakan Lembar Kegiatan Siswa, maka metode yang di gunakan adalah tanya jawab saja dengan melakukan pembahasan soal bersama-sama. Kegiatan penutup tidak sesuai dengan yang ada di Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, hal ini dikarenakan waktu yang terbuang sia-sia karena siswanya ramai sehingga waktunya habis untuk menegur siswa supaya tidak ramai.

Jadi kesimpulan berdasarkan hasil observasi dan wawancara adalah pelaksanaan pembelajaran yang tidak sesuai dengan yang ada di Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.

2) Proses kegiatan belajar mengajar di kelas X4

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa kegiatan pendahuluan di sini guru membuka dengan mengucapkan salam dan

dilanjutkan dengan berdoa (membaca Al Qur'an/tadarus), kemudian guru menuliskan materi yang akan dipelajari di kelas.

Pada kegiatan inti menggunakan metode ceramah, dan tidak didukung dengan media pendukung dalam proses pembelajaran. Di mana dalam proses eksplorasi setelah guru menjelaskan materi tersebut, guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mencatat apa yang ditulis gurunya di papan tulis. Hal ini untuk membangun pengetahuan siswanya dengan menfasitasi terjadinya interaksi antara peserta didik dengan gurunya. Kemudian dalam elaborasi guru memfasilitasi peserta didik untuk berpikirdan menganalisis dengan melakukan tanya jawab. Setelah itu melakukan konfirmasi dari tanya jawab tadi, di mana guru melakukan umpan balik secara lisan. Pelaksanaannya banyak muridnya yang ramai sendiri dan ngobrol sendiri. Beberapa kali guru menegur dan mengingatkan siswa untuk tidak ramai, tetapi seringkali di biarkan saja. Jadi untuk tujuan pembelajarannya belum tercapai, masih banyak siswa yang belum paham. Sumber belajar yang digunakan adalah buku paket, modul dan Lembar Kegiatan Siswa.

Kegiatan penutup tidak sesuai dengan yang ada di Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, di mana guru tinggal mengucapkan salam, tidak ada evaluasi atau tindak lanjut.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran tidak sesuai dengan Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran, di mana dalam kegiatan penutup tidak ada kesimpulan dan evaluasi. Hal ini dikarena waktunya yang terbatas atau kurang atau waktu yang telah habis. Sering kali yang direncanakan tidak mungkin bisa terlaksana semua. Jadi dalam pelaksanaan pembelajaran guru tidak terpaku pada rencana dan seringkali keluar dari rencana biasanya.

Jadi berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembelajaran Tidak sesuai dengan yang ada di Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.

Pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara secara keseluruhan belum sesuai dengan proses pembelajaran yang diatur dalam Permendiknan No 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses. Pada kegiatan pembelajaran pendahuluan beberapa guru hanya memberi salam kemudian langsung ke intinya yaitu langsung menyampaikan materi yang akan diajarkan pada waktu itu. Beberapa guru tanpa melakukan absensi siswa, apresepsi untuk mengulas kembali materi yang telah dipelajari minggu kemarin dan melakukan protest (tanya jawab) untuk materi yang lalu.

Kegiatan inti sebagian besar hanya menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Materi yang disampaikan juga tidak sesuai dengan waktu yang ada di Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, yang seharusnya disampaikan dalam satu kali pertemuan tetapi karena keterbatasan waktu dan terlalu

banyaknya materi yang harus disampaikan oleh guru tersebut. Maka Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang seharusnya satu kali pertemuan menjadi dua kali pertemuan. Selain itu juga ada beberapa guru yang dalam pelaksanaan pembelajaran waktunya terbuang sia-sia karena waktu na lebih banyak digunakam untuk mengatur siswanya yang ramai daripada untuk menyampaikan materi. Kemudian untuk tujuan pembelajaran belum tercapai karena masih banyak siswa yang belum paham tentang materi yang diajarkan.

Kemudian untuk kegiatan penutup guru menarik kesimpulan dan setelah itu memberi salam penutup. Tetapi ada beberapa guru yang tanpa memberi kesimpulan langsung menutup pembelajaran. Sumber belajar yang digunakan adalah buku paket dan Lembar Kerja Siswa yang dibuat bersama dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran, namun dalam pelaksanaannya kebanyakan guru hanya menggunakan Lembar Kegiatan Siswa tanpa ada pendukung yang relevan seperti apa yang tercantum di dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.

3. Hambatan dan Upaya dalam Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan Pelaksanaan pembelajaran

a. Hambatan Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Hasil penelitian melalui wawancara dengan responden guru pendidikan kewarganegaraan mengenai hambatan yang terjadi dalam

pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, dapat disajikan sebagai berikut:

Narasumber ERW dalam wawancara pada tanggal 21 Mei 2011 yang terkait dengan hambatan dalam pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran mengemukakan bahwa hambatan pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ada, yaitu urutan atau standar sistematika dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran tiap pengawas kadang berbeda-beda. Kemudian karakteristik siswa IPA dan IPS yang berbeda, di mana untuk materi mungkin harus dicantumkan tapi karena banyak hanya ditulis poinnya saja. Anaknya sama, tapi IPA dan IPS berbeda, mungkin di IPA bisa dilepas, tapi di IPS perlu dipantau dan lebih banyak menjelaskan materinya.

Narasumber SKP dalam wawancara pada tanggal 14 Mei 2011 yang terkait dengan hambatan dalam pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran mengemukakan bahwa pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ada, yaitu materi ajarnya yang banyak namun waktunya yang terbatas. Kadang situasi itu tidak sesuai dengan yang diinginkan, untuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 2 jam kadang-kadang melebihi otomatis pertemuan yang akan datang boleh Kompetensi Dasar sebelumnya. Kelas menyesuaikan kondisi tapi dituntut sesuai waktunya. Contoh : kelas I semester I Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar banyak tapi waktu yang tersedia terbatas.

Narasumber STH dalam wawancara pada tanggal 19 Mei 2011 yang terkait dengan hambatan dalam pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran mengemukakan bahwa hambatan pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yaitu tidak begitu masalah dalam pembuatannya karena sudah mengacu pada model Rencana Pelaksanaan dari Musyawarah Guru Mata Pelajaran.

Narasumber TTR dalam wawancara pada tanggal 31 Mei 2011 yang terkait dengan hambatan dalam pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran mengemukakan bahwa hambatan dalam pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah karakteristik siswa yang bermasalah, hal ini dikarenakan situasi siswa yang merupakan pelarian dari kota, anak-anak kebanyakan bermasalah karena daerah transisi.

Narasumber SBN dalam wawancara pada tanggal 14 Mei 2011 yang terkait dengan hambatan dalam pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran mengemukakan bahwa terdapat hambatan yaitu materi Pendidikan Kewarganegaraan yang menjadi lebih sulit.

Narasumber KWD dalam wawancara pada tanggal 21 Mei 2011 yang terkait dengan hambatan dalam pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran mengemukakan bahwa hambatannya yaitu sulitnya dalam menyesuaikan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dengan karakteristik lingkungan sekolah.

Narasumber SNY dalam wawancara pada tanggal 09 Mei 2011 yang terkait dengan hambatan dalam pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran mengemukakan bahwa hambatan dalam pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yaitu banyaknya Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang sulit dijabarkan dalam indikator (multi tafsir), seperti menghargai Mahkamah Internasional, mendiskripsikan, menunjukkan contoh. Selain itu antara guru satu dengan yang lain indikatornya tidak sama, penjabarannya menimbulkan multi tafsir. Jadi pencapaian berbeda-beda.

Narasumber SPL dalam wawancara pada tanggal 10 Mei 2011 yang terkait dengan hambatan dalam pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran mengemukakan bahwa hambatan dalam pengembangannya yaitu sulitnya untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi siswa di sekolah.

Narasumber WDM dalam wawancara pada tanggal 24 Mei 2011 yang terkait dengan hambatan dalam pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran mengemukakan bahwa banyaknya siswa yang tidak mengikuti perkembangan informasi, sehingga metode studi kasus sulit diterapkan.

Narasumber ZNM dalam wawancara pada tanggal 11 Mei 2011 yang terkait dengan hambatan dalam pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran mengemukakan bahwa hambatan dalam pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran pasti ada yaitu memilih metode

pembelajaran yang sesuai dengan kondisi siswa. Seperti anak-anak dalam diskusi di kelas tidak begitu berjalan lancar dan juga dalam pembahasan pekerjaan rumah, karena siswa lebih cepat mengerti dengan metode tanya jawab.

Jadi dalam mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat masih banyak di temukan hambatan-hambatannya. Hal itu bisa disebabkan oleh siswa, sekolah maupun gurunya sendiri. Hambatan-hambatan tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1) Siswa

Banyaknya guru yang mengaku mengalami hambatan karena karakteristik siswa yang berbeda-beda. Karakter siswa-siswa yang berasal dari kota kebanyakan bermasalah sehingga menjadi hambatan tersendiri bagi pengembang Rencana pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Hal ini juga dapat dilihat dari perbedaan karakter antara siswa IPS dan IPA menjadi pertimbangan dalam pemberian metode pembelajaran. Kebanyakan siswa yang berada di SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat juga kurang mengikuti perkembangan berita sehingga menjadi hambatan dalam penerapan metode studi kasus dan diskusi.

2) Guru

Guru mengalami berbagai kesulitan dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran pengawas memiliki standar yang berbeda dalam urutan penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran sehingga banyak guru yang mengalami kebingungan. Untuk materi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sekarang lebih bersifat ketatanegaraan sehingga banyak guru-guru yang mengalami kesulitan untuk mencari bahan materi. Selain itu banyak Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang sulit dijabarkan karena multi tafsir
- b) Dalam pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, guru juga mengalami kesulitan dalam menyesuaikan jam pembelajarann karena waktu yang tersedia sangat terbatas.

b. Hambatan dalam Pelaksanaan Pembelajaran

Hasil penelitian melalui wawancara dengan responden guru pendidikan kewarganegaraan mengenai hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, dapat disajikan sebagai berikut:

Narasumber ERW dalam wawancara pada tanggal 21 Mei 2011 yang terkait dengan hambatan dalam pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran mengemukakan bahwa hambatan dalam pelaksanaan Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran yaitu kondisi dan karakteristik siswa yang berbeda-beda, sehingga penerapan metodenya harus memperhatikan hal tersebut. siswa yang menjawab asal bunyi (salah total) tidak benar), tapi IPS/IPA tidak semua seperti itu. Kadang karena capek/ngantuk atau jam terakhir. Untuk pelaksanaan disesuaikan dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, bisa atau tidak bisa melenceng, yang penting materi berurutan tapi metode bisa berubah.

Narasumber SKP dalam wawancara pada tanggal 14 Mei 2011 yang terkait dengan hambatan dalam pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran mengemukakan bahwa hambatan pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yaitu siswa tidak memiliki media yang cukup untuk pembelajaran atau kurangnya media pembelajaran yang dimiliki oleh siswa. Di mana siswa buka internet atau cari buku lain dan Undang-Undang Dasar harus selalu dibawa. Tapi media tidak lengkap dan kadang siswanya tidak membawa Undang-Undang Dasat.

Narasumber STH dalam wawancara pada tanggal 19 Mei 2011 yang terkait dengan hambatan dalam pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran mengemukakan sarana dan prasarana yang tidak lengkap untuk mengajar, di mana dalam mengajar lebih menggunakan gambar/Koran atau melihat Televisi karena penggunaan LCD tidak begitu bisa.

Narasumber TTR dalam wawancara pada tanggal 31 Mei 2011 yang terkait dengan hambatan dalam pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran mengemukakan bahwa hambatan dalam pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yaitu teknik pelaksanaan dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran tidak sesuai. Sarana dan prasarana dalam mengajar yang kurang. Siswa yang bermasalah dan kondisi ekonomi siswa yang kekurangan.

Narasumber SBN dalam wawancara pada tanggal 14 Mei 2011 yang terkait dengan hambatan dalam pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran mengemukakan bahwa hambatan dalam pelaksanaan yaitu sarana dan prasarana yang kurang mendukung pembelajaran, di mana media belum berjalan semua kelas. Metode ceramah, mungkin mulai tahun depan akan ada beberapa kelas menggunakan LCD. Kalau sekarang masih menggunakan ceramah. Kegiatan sehari-hari selalu dikaitkan dalam materi seperti adat istiadat yang terpenting tahu materi ini terkait dengan itu (dikaitkan dengan tradisi).

Narasumber KWD dalam wawancara pada tanggal 21 Mei 2011 yang terkait dengan hambatan dalam pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran mengemukakan bahwa hambatan dalam pelaksanaannya terdapat padakurangnya sarana dan prasarana seperti LCD hanya ada 2 jadi jadi sering gentian tidak bisa selalu menggunakan, pegangan lebih ke Lembar

Kegiatan Siswa, buku untuk siswa terasa berat (masalah biaya). Selain itu juga karakteristik siswa yang bermasalah.

Narasumber SNY dalam wawancara pada tanggal 09 Mei 2011 yang terkait dengan hambatan dalam pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran mengemukakan bahwa hambatan dalam pelaksanaan relatif berbeda tiap sekolah, hambatan yang dihadapi disini adalah motivasi siswa agak rendah karena nem untuk menengah, daya pikirnya rendah dan berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu. Membeli buku pelajaran sangat sulit karena masalah biaya.

Narasumber SPL dalam wawancara pada tanggal 10 Mei 2011 yang terkait dengan hambatan dalam pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran mengemukakan bahwa kurang tersedia fasilitas sarana dan prasarana seperti LCD. Sehingga media yang digunakan hanya dari buku paket dan Koran.

Narasumber WDM dalam wawancara pada tanggal 24 Mei 2011 yang terkait dengan hambatan dalam pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran mengemukakan bahwa hambatannya berasal dari kondisi dan situasi kelas yang ramai.

Narasumber ZNM dalam wawancara pada tanggal 11 Mei 2011 yang terkait dengan hambatan dalam pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran mengemukakan bahwa sulitnya menyesuaikan metode

pembelajaran dengankarakteristik siswanya dan kurangnya waktu untuk pelaksanaan pembelajaran. Di mana siswa susah untuk berdiskusi dan waktu yang tidak sesuai dengan rencana.

Jadi dalam melaksanakan pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Se-kabupaten Sleman Wilayah Barat juga masih banyak di temukan hambatan-hambatannya. Sama seperti dalam pengembangan hal itu bisa disebabkan oleh siswa, sekolah maupun gurunya sendiri. Hambatan-hambatan tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1) Siswa

Reaksi siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran yang berlangsung kadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan guru. Hal tersebut karena banyaknya siswa yang sudah capek/mengantuk pada jam-jam terakhir. Selain itu motivasi siswa SMA yang rendah membuat kebanyakan siswa jadi kurang memperhatikan pelajaran. Daya pikir siswa yang kurang juga menjadi kendala tersendiri dalam melaksanakan pembelajaran. Selain itu kondisi ekonomi siswa SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat yang berasal dari keluarga yang kurangn mampu membuat kebanyakan siswanya tidak dapat membeli buku pelajaran. Hal tersebut kemudian menjadi hambatan tersendiri bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran.

2) Waktu

Banyak guru yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan pelaksanaan pembelajaran dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran karena terbatasnya waktu.

3) Media

Ketidaklengkapan media di SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat menjadi hambatan guru. Selain itu kurangnya pengetahuan guru terhadap penggunaan media seperti LCD membuat banyak guru memilih menggunakan gambar dan Koran. Kurang lengkapnya media pembelajaran di sekolah juga berefek pada guru yang memilih metode ceramah dan diskusi.

4. Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Hambatan dalam Mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan Pelaksanaan Pembelajaran

a. Upaya dalam Mengatasi Hambatan dalam Mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Hasil penelitian melalui wawancara dengan responden guru pendidikan kewarganegaraan mengenai upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran berdasar Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, dapat disajikan sebagai berikut:

Narasumber ERW dalam wawancara pada tanggal 21 Mei 2011 yang terkait dengan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran berdasarkan Kurikulum

Tingkat Satuan Pendidikan mengemukakan bahwa upaya dalam mengatasi permasalahan tentang standar sistematika Rencana Pelaksanaan Pembelajaran tiap pengawas yang berbeda-beda dan karakteristik siswa IPA dan IPS yang berbeda yaitu membuat Rencana Pembelajaran dengan standar sistematika menurut pengawas masing-masing dan untuk karakteristik siswa yang berbeda dengan menggunakan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi siswa.

Narasumber SKP dalam wawancara pada tanggal 14 Mei 2011 yang terkait dengan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan mengemukakan bahwa upaya dalam mengatasi hambatan tentang materi pembelajaran yang banyak namun waktunya terbatas dengan mengalokasikan semaksimal mungkin, tetapi jika waktunya kurang yang dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya.

Narasumber STH dalam wawancara pada tanggal 19 Mei 2011 yang terkait dengan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan mengemukakan bahwa hambatan yang terjadi tidak terlalu bermasalah karena sudah mengacu pada Musyawarah Guru Mata Pelajaran, jadi pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dengan mengikuti pedoman dari Musyawarah Guru Mata Pelajaran.

Narasumber TTR dalam wawancara pada tanggal 31 Mei 2011 yang terkait dengan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan mengemukakan bahwa upaya dalam mengatasi hambatan tentang karakteristik siswa yang bermasalah yaitu melakukan koordinasi dengan guru mata pelajaran secara administrasi, menyamakan langkah, berdiskusi dengan sesama guru mata pelajaran, dan juga melakukan koordinasi melalui forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran.

Narasumber SBN dalam wawancara pada tanggal 14 Mei 2011 yang terkait dengan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan mengemukakan bahwa upaya untuk mengatasi hambatan tentang materi Pendidikan Kewarganegaraan yaitu dalam metode pembelajaran menggunakan metode yang sesuai dengan materi pelajaran, sehingga dalam menyampaikan materi tidak dianggap sulit.

Narasumber KWD dalam wawancara pada tanggal 21 Mei 2011 yang terkait dengan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan mengemukakan bahwa upaya dalam mengatasi hambatan tentang sulitnya menyesuaikan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

dengan karakteristik yaitu dalam pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran disesuaikan dengan lingkungan sekolah.

Narasumber SNY dalam wawancara pada tanggal 09 Mei 2011 yang terkait dengan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan mengemukakan bahwa upaya dalam mengatasi hambatan tentang kata kerja operasional dari pengawas yang tumpang tindih (terjadi multi tafsir) yaitu membahas masalah tersebut di forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau menyesuaikan dengan pengawas masing-masing.

Narasumber SPL dalam wawancara pada tanggal 10 Mei 2011 yang terkait dengan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan mengemukakan bahwa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tentang sulitnya dalam menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi siswa di sekolah yaitu dalam metode pembelajaran memilih penyampaian materinya yang bisa dipahami oleh siswanya. Hal ini di sesuaikan dengan kondisi siswa dan sekolah.

Narasumber WDM dalam wawancara pada tanggal 24 Mei 2011 yang terkait dengan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan mengemukakan bahwa upaya yang dilakukan

dalam mengatasi hambatan tentang banyaknya siswa yang tidak mengikuti perkembangan informasi, sehingga metode studi kasus sulit diterapkan yaitu materi dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran berdasarkan fakta yang ada dan mengikuti perkembangan informasi saat ini.

Narasumber ZNM dalam wawancara pada tanggal 11 Mei 2011 yang terkait dengan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan mengemukakan bahwa upaya untuk mengatasi hambatan tentang memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi siswa yaitu menggunakan metode yang di sesuaikan dengan siswanya yang aktif dan tidak. Di mana untuk siswa yang aktif bisa menggunakan metode diskusi untuk yang tidak aktif menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Jadi upaya yang dilakukan oleh guru mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam mengatasi hambatan dalam mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah sebagai berikut :

1) Siswa

Banyaknya guru yang mengaku mengalami hambatan karena karakteristik siswa yang berbeda-beda. Karakter siswa-siswa yang berasal dari kota kebanyakan bermasalah sehingga menjadi hambatan tersendiri bagi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Hal ini juga dapat dilihat dari perbedaan karakter antara siswa IPS dan IPA menjadi

pertimbangan dalam pemberian metode pembelajaran. Kebanyakan siswa yang berada di SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat juga kurang mengikuti perkembangan berita sehingga menjadi hambatan dalam penerapan metode studi kasus dan diskusi.

Upaya yang dilakukan oleh guru dalam mengatasi hambatan yaitu dalam pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran disesuaikan dengan lingkungan sekolahnya terutam dengan kondisi siswanya. Untuk perbedaan karakteristik siswa, siswa diberi tugas terstruktur dan tidak terstruktur. Kemudian siswa diajak membahas soal dengan *open book* dari modul jika sewaktu-waktu diadakan ulangan (*close book*) maka siswa dapat mengerjakan. Selain itu dalam penggunaan metode pembelajaran menggunakan metode yang penyampaian materinya tidak dianggap sulit oleh siswanya.

2) Guru

Banyaknya guru yang mengalami berbagai kesulitan dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Pengawas dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran memiliki standar yang berbeda dalam urutan penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran sehingga banyak guru yang mengalami kebingungan. Untuk materi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

sekarang lebih bersifat ketatanegaraan sehingga banyak guru-guru yang mengalami kesulitan untuk mencari bahan materi. Selain itu banyak Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang sulit dijabarkan karena multi tafsir.

b) Guru dalam pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran juga mengalami kesulitan dalam menyesuaikan jam pembelajarann karena waktu yang tersedia sangat terbatas

Upaya yang dilakukan oleh guru dalam mengatasi hambatan tersebut adalah berpegang pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran selama tidak lepas dari Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar. Untuk materi selain dari modul atau buku pelajaran guru dapat menambahkan materi dari buku-buku lainnya. Dalam pengembangannya, untuk kata kerja operasional dari pengawas yang masih tumpang tindih dan multi tafsir, guru mengembangkannya dengan menyesuaikan pengawas masing-masing. Selain itu dalam mengatasi hambatan pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yaitu melakukan koordinasi dengan guru mata pelajrsan secara administrasi, menyamakan langkah, berdiskusi dengan sesama guru mata pelajaran . dalam pembelajaran menggunakan sumber belajat dari lembar kegiatan siswa untuk menyamakan langkah sampai tingkat evaluasinya.

b. Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Pembelajaran

Hasil penelitian melalui wawancara dengan responden guru pendidikan kewarganegaraan mengenai upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran, dapat disajikan sebagai berikut:

Narasumber ERW dalam wawancara pada tanggal 21 Mei 2011 yang terkait dengan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan mengemukakan bahwa upaya dalam mengatasi hambatan tentang kondisi dan karakteristik anak yang berbeda-beda sehingga penerapan metodenya harus memperhatikan hal tersebut yaitu dengan menggunakan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi siswa dan sekolah, dimana untuk IPA menggunakan diskusi dan untuk IPS lebih sering ceramah. Walaupun metode pembelajarannya berbeda yang terpenting materinya berurutan.

Narasumber SKP dalam wawancara pada tanggal 14 Mei 2011 yang terkait dengan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan mengemukakan bahwa upaya untuk mengatasi hambatan tentang siswa yang tidak memiliki media yang cukup untuk pembelajaran atau kurangnya media yang dimiliki oleh siswa adalah dengan penugasan tugas praktik, misalnya dalam masalah hukum, siswa disuruh

mengamati pengendara motor, dan mencatat siapa saja yang tertib/tidak (terjun langsung ke lapangan). Selain itu di parkir, siswa disuruh melihat guru dan siswa berapa yang tertib dan hal ini bisa dilaporkan ke Kepala Sekolah sebagai laporan.

Narasumber STH dalam wawancara pada tanggal 19 Mei 2011 yang terkait dengan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan mengemukakan bahwa upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tentang tidak lengkapnya sarana dan prasarana untuk mengajar yaitu untuk alat bantu yang dapat menggunakan buku paket atau Koran, dan lebih banyak menggunakan metode ceramah dan tanya jawab.

Narasumber TTR dalam wawancara pada tanggal 31 Mei 2011 yang terkait dengan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan mengemukakan bahwa upaya dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran tentang sarana prasarana yang kurang dan kondisi siswa yang bermasalah serta kondisi ekonomi siswa yang kekurangan yaitu bersama-sama dengan wakil kepala kesiswaan dan kurikulum yang sesama guru Pendidikan Kewarganegaraan melakukan koordinasi bersama untuk mengatasi masalah bersama dan tentang siswa. Untuk pribadi, seperti sekolah tidak kondusif

kelas(secara umum) maka bersifat umum penyelesaiannya. Untuk siswa bermasalah (secara khusus), sering tidak masuk/diam dll maka penyelesaiannya secara khusus. Untuk sarana prasarana yang kurang yang menggunakan sesuai dengan fasilitas yang ada di sekolah.

Narasumber SBN dalam wawancara pada tanggal 14 Mei 2011 yang terkait dengan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan mengemukakan bahwa upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tentang sarana dan prasarana yang kurang mendukung pembelajaran yaitu dengan menggunakan fasilitas seadanya. Pembelajaran di dalam pelaksanaan pembelajaran lebih dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari misalnya adat istiadat, sehingga tidak memerlukan banyak fasilitas dan siswa dapat lebih kritis dalam menganalisis.

Narasumber KWD dalam wawancara pada tanggal 21 Mei 2011 yang terkait dengan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan mengemukakan bahwa upaya untuk mengatasi hambatan tentang sarana dan prasarana yang kurang memadai dan karakteristik siswa yang bermasalah yaitu membenahi siswanya dengan menyelesaikan masalahnya dahulu. Kemudian untuk sarana menggunakan fasilitas yang ada di sekolah.

Narasumber SNY dalam wawancara pada tanggal 09 Mei 2011 yang terkait dengan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan mengemukakan bahwa upaya dalam mengatasi hambatan tentang karakteristik siswa yang motivasinya rendah, daya pikirnya rendah dan berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu yaitu dalam pelaksanaan pembelajaran harus ada unsur untuk membangkitkan motivasi, kemudian untuk daya pikir rendah diadakan diklat untuk berlatih terus (pendalaman materi) dan untuk latar belakang ekonomi yang kurang mampu yaitu buku pelajaran disediakan oleh perpustakaan.

Narasumber SPL dalam wawancara pada tanggal 10 Mei 2011 yang terkait dengan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan mengemukakan bahwa upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tentang kurang tersedianya sarana dan prasarana yaitu dalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan sarana yang tersedia, karena tidak ada LCD jadi metode pembelajaran menggunakan ceramah dan tanya jawab.

Narasumber WDM dalam wawancara pada tanggal 24 Mei 2011 yang terkait dengan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran berdasarkan Kurikulum

Tingkat Satuan Pendidikan mengemukakan bahwa upaya dalam mengatasi hambatan tentang kondisi dan situasi kelas yang ramai yaitu menggunakan metode tanya jawab, sehingga siswa ikut berpartisipasi aktif dalam pembelajaran di kelas.

Narasumber ZNM dalam wawancara pada tanggal 11 Mei 2011 yang terkait dengan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan mengemukakan bahwa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tentang sulitnya dalam menyesuaikan metode pembelajaran dengan karakteristik siswa dan kurangnya waktu untuk melaksanakan pembelajaran yaitu dengan memahami karakteristik siswanya terlebih dahulu. Untuk kurangnya waktu disesuaikan dengan pelaksanaannya, kalau belum selesai dilanjutkan pada pertemuan minggu depannya. Jadi upaya yang dilakukan oleh guru mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam mengatasi hambatan dalam melaksanakan pembelajaran adalah sebagai berikut :

1) Siswa

Reaksi siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran yang berlangsung kadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan guru. Hal tersebut karena

banyaknya siswa yang sudah capek/mengantuk pada jam-jam terakhir. Selain itu motivasi siswa SMA yang rendah membuat kebanyakan siswa jadi kurang memperhatikan pelajaran. Daya pikir siswa yang kurang juga menjadi kendala tersendiri dalam melaksanakan pembelajaran. Selain itu kondisi ekonomi siswa SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat yang berasal dari keluarga yang kurang mampu membuat kebanyakan siswanya tidak dapat membeli buku pelajaran. Hal tersebut kemudian menjadi hambatan tersendiri bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran. Upaya yang dilakukan oleh guru dalam mengatasi hambatan ini adalah membangkitkan motivasi, kemudian untuk daya pikir rendah diadakan diklat untuk berlatih terus. Kemudian sesama guru pendidikan kewarganegaraan melakukan koordinasi bersama untuk mengatasi masalah bersama dan tentang siswa.

2) Waktu

Hambatan dari waktu yaitu banyak guru yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan pelaksanaan pembelajaran dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran karena terbatasnya waktu. Upayanya yaitu dalam pelaksanaan tergantung dengan Kompetensi Dasar atau tergantung dengan situasi dan kondisi siswa dan lingkungan sekolah. Jadi dalam pelaksanaan pembelajaran disesuaikan dengan kondisi saat itu. Metode dalam pelaksanaan pembelajaran disesuaikan dengan kondisi siswa dan sekolah asal materinya berurutan saja.

3) Media

Hambatan dari media yaitu ketidaklengkapan media di SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat menjadi hambatan guru. Selain itu kurangnya pengetahuan guru terhadap penggunaan media seperti LCD membuat banyak guru memilih menggunakan gambar dan Koran. Kurang lengkapnya media pembelajaran di sekolah juga berefek pada guru yang memilih metode ceramah dan diskusi. Upaya yang dilakukan yaitu dalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan sarana yang tersedia, karena tidak ada LCD jadi metode menggunakan ceramah dan tanya jawab.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Hambatan yang Dihadapi Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan Pelaksanaan Pembelajaran Berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

a. Hambatan yang Dihadapi Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Berdasarkan hasil dokumentasi tentang sistematika Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dari guru-guru SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat sudah mengacu pada Permendiknas No 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses, sehingga sistematika Rencana Pelaksanaan Pembelajaran telah sesuai dengan yang ada di dalam Permendiknas No 41 Tahun 2007. Hal ini juga dikarenakan mereka menggunakan sistematika yang diterapkan oleh Musyawarah Guru Mata Pelajaran yang berpedoman pada Permendiknas No 41 Tahun 2007.

Guru dalam mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat masih banyak di temukan hambatan-hambatannya. Hambatan-hambatan tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1) Siswa

Hambatan dalam mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah karakteristik dan latarbelakang siswa yang berbeda-beda. Latarbelakang siswa SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat kebanyakan berasal dari kota yang memiliki *mind set* bebas sehingga menjadi hambatan tersendiri bagi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Hal tersebut menyebabkan pembelajaran khususnya dengan metode diskusi membuat kelas sangat gaduh. Hal tersebut juga terjadi pada pembahasan pekerjaan rumah. Siswa di SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat lebih mudah mengerti dengan metode tanya jawab pada metode studi kasus. Namun walaupun begitu tidak semua siswa mengikuti perkembangan informasi padahal dalam pembelajaran dengan metode studi kasus diperlukan pemahaman terhadap informasi terbaru. Perbedaan karakter antara siswa IPS dan IPA yang memiliki kesenjangan dalam kecerdasan menjadi pertimbangan dalam pemberian metode pembelajaran. Kebanyakan untuk IPA proses pembelajarannya dalam metode diskusi bisa dilepas, tapi

di IPS masih perlu dipantau dan lebih banyak menjelaskan dalam pembelajaran. Kebanyakan siswa yang berada di SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat juga kurang mengikuti perkembangan berita sehingga menjadi hambatan dalam penerapan metode studi kasus dan diskusi.

2) Guru

Dilihat dari hasil wawancara dan dokumentasi, guru dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran belum sesuai dengan langkah-langkah penyusunan yang harus dilakukan oleh guru terutama dalam perumusan indikator dan proses kegiatan inti eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi. Langkah-langkah penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, sebagai berikut:

- (1) Mengambil satu unit pembelajaran yang akan diterapkan dalam pembelajaran.
- (2) Menulis standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat dalam unit tersebut.
- (3) Menentukan indikator untuk mencapai kompetensi dasar tersebut.
- (4) Menentukan alokasi waktu yang diperlukan untuk mencapai indikator tersebut.
- (5) Merumuskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran tersebut.
- (6) Menentukan materi pembelajaran yang akan diberikan/dikenakan kepada siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan.
- (7) Memilih metode pembelajaran yang dapat mendukung sifat materi dan tujuan pembelajaran.
- (8) Menyusun langkah-langkah kegiatan pembelajaran pada setiap satuan rumusan tujuan pembelajaran, yang bisa dikelompokkan menjadi kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.
- (9) Jika alokasi waktu untuk mencapai satu kompetensi dasar lebih dari 2 (dua) jam pelajaran, maka membagi langkah-langkah pembelajaran menjadi lebih dari satu pertemuan. Pembagian setiap jam pertemuan bisa

didasarkan pada satuan tujuan pembelajaran atau sifat/tipe/jenis materi pembelajaran.

- (10) Menyebutkan sumber/media belajar yang akan digunakan dalam pembelajaran secara kongkret dan untuk setiap bagian/unit pertemuan.
- (11) Menentukan teknik penilaian, bentuk dan contoh instrumen penilaian yang akan digunakan untuk mengukur ketercapaian kompetensi dasar atau tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan.

Perumusan indikator dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran sudah mencakup *civics knowledge*, *civics skills*, dan *civics depositions*, meskipun ada beberapa guru yang di dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran belum mencantumkan semuanya seperti adanya beberapa guru tidak mencantumkan *civics depositions* yaitu nilai-nilai karakter dalam Pendidikan kewarganegaraan di dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.. Kemudian dalam kegiatan pembelajaran di dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran juga tidak dicantumkan tentang eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Guru dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran tidak secara eksklusif mencantumkan tentang proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, namun sudah mengandung eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi di dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.

Hal tersebut karena guru memiliki pemahaman yang kurang terhadap langkah-langkah penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan komponen-komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Guru dalam penyusunannya Rencana Pelaksanaan Pembelajaran juga memiliki hambatan lainnya. Salah satunya karena pengawas yang memiliki perbedaan

pemahaman mengenai sistematika penyusunannya Rencana Pelaksanaan Pembelajaran sehingga Rencana Pelaksanaan Pembelajaran guru berbeda bila pengawasnya berbeda. Hal tersebut menimbulkan kebingungan bagi guru dan menjadi hambatan dalam pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.

Selain itu kurangnya pemahaman guru terhadap materi Pendidikan Kewarganegaraan karena perkembangan materi Pendidikan Kewarganegaraan yang sulit dipahami juga menjadi salah satu hambatan. Materi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sekarang dinilai lebih sulit karena memiliki banyak teori dan materinya masih baru sehingga banyak guru-guru senior yang mengalami kesulitan untuk mencari bahan materi. Selain itu pengembangan materi Pendidikan Kewarganegaraan sekarang membutuhkan pengetahuan yang *up to date* (sesuai dengan apa yang berkembang di masyarakat). Materi Pendidikan Kewarganegaraan sekarang cenderung mengarahkan agar siswa lebih aktif dan kritis. Siswa diharapkan paham dan dapat menganalisa sendiri masalah-masalah dan fenomena-fenomena yang terjadi dimasyarakat. Namun guru masih belum dapat mendorong siswa untuk aktif saat pembelajaran.

b. Hambatan yang dihadapi guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pelaksanaan Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran di kelas, berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara secara keseluruhan belum sesuai dengan proses pembelajaran yang diatur dalam Permendiknas No 41

Tahun 2007 tentang Standar Proses. Pada kegiatan pembelajaran pendahuluan beberapa guru hanya memberi salam kemudian langsung ke intinya yaitu langsung menyampaikan materi yang akan diajarkan pada waktu itu. Beberapa guru tanpa melakukan absensi siswa, apersepsi untuk mengulas kembali materi yang telah dipelajari minggu kemarin dan melakukan pra tes (tanya jawab) untuk materi yang lalu.

Kegiatan inti sebagian besar hanya menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Materi yang disampaikan juga tidak sesuai dengan waktu yang ada di Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, yang seharusnya disampaikan dalam satu kali pertemuan tetapi karena keterbatasan waktu dan terlalu banyaknya materi yang harus disampaikan oleh guru tersebut. Maka Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang seharusnya satu kali pertemuan menjadi dua kali pertemuan. Selain itu juga ada beberapa guru yang dalam pelaksanaan pembelajaran waktunya terbuang sia-sia karena waktunya lebih banyak digunakan untuk mengatur siswanya yang ramai daripada untuk menyampaikan materi. Kemudian untuk tujuan pembelajaran belum tercapai karena masih banyak siswa yang belum paham tentang materi yang diajarkan.

Kemudian untuk kegiatan penutup guru menarik kesimpulan dan setelah itu memberi salam penutup. Tetapi ada beberapa guru yang tanpa memberi kesimpulan langsung menutup pembelajaran. Untuk sumber belajar yang di gunakan adalah buku paket dan Lembar Kerja Siswa yang dibuat

bersama dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran, namun dalam pelaksanaannya kebanyakan guru hanya menggunakan Lembar Kegiatan Siswa tanpa ada pendukung yang relevan seperti apa yang tercantum di dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.

Kegiatan pembelajaran di kelas tersebut belum sesuai dengan proses pembelajaran yang diatur dalam Permendiknas No 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses karena guru-guru Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Se-kabupaten Sleman Wilayah Barat masih mengalami hambatan-hambatan. Hambatan-hambatan tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1) Siswa

Reaksi siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran yang berlangsung kadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan guru. Hal tersebut karena kondisi fisik siswa yang sudah capek/mengantuk pada jam-jam terakhir. Selain itu motivasi siswa SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat yang rendah membuat kebanyakan siswa jadi kurang memperhatikan pelajaran. Daya pikir siswa yang kurang juga menjadi kendala tersendiri dalam melaksanakan pembelajaran. Selain itu kondisi ekonomi siswa SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat yang berasal dari keluarga yang kurang mampu membuat kebanyakan siswanya tidak dapat membeli buku pelajaran. Hal tersebut kemudian menjadi hambatan tersendiri bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran.

2) Waktu

Banyak guru yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan pelaksanaan pembelajaran dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran karena terbatasnya waktu dalam pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Padahal materi ajar Pendidikan Kewarganegaraan sangat yang banyak, sedangkan waktunya yang tersedia kurang. Jadi dalam pelaksanaan pembelajaran banyak guru yang tidak menyelesaikan materi ajar dalam sekali pertemuan seperti yang tercantum dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Materi ajar yang belum selesai di bahas dalam pelaksanaan pembelajaran akhirnya dilanjutkan dalam pada pertemuan selanjutnya.

3) Media

Ketidaklengkapan media di SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat menjadi hambatan guru. Kurang lengkapnya media pembelajaran di sekolah ini berefek pada guru yang memilih metode ceramah dan diskusi. Guru di SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat lebih banyak guru yang menggunakan metode ceramah, tapi untuk Pendidikan Kewarganegaraan guru juga menggunakan metode diskusi misalnya untuk materi demokrasi. Pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat kurang maksimal karena ketidaktersediaan fasilitas (tidak semua kelas ada LCD) dan pelaksanaan praktik lapangan (misalnya ke pengadilan) belum tercapai.

2. Upaya yang Dilakukan guru pendidikan kewarganegaraan dalam mengatasi hambatan dalam mengembangkan Rencana Pelaksanaan dan Pelaksaaan Pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan

a. Upaya yang dilakukan Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengatasi Hambatan dalam Mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Pengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang mengalami banyak hambatan ini, telah disikapi oleh guru-guru dengan melakukan berbagai upaya-upaya. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah sebagai berikut :

1) Siswa

Salah satu hambatan pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang dialami oleh guru adalah berasal dari siswa yaitu karena latar belakang dan karakteristik siswa yang berbeda-beda. Latar belakang siswa-siswa yang berasal dari kota, memiliki *mind set* bebas berbeda dengan latar belakang siswa disana pada umumnya. Hal tersebut menjadi hambatan tersendiri bagi pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Selain itu perbedaan karakter antara siswa IPS dan IPA menjadi pertimbangan dalam pemberian metode pembelajaran juga menjadi salah satu hambatan. Kebanyakan siswa yang berada di SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat juga memiliki karakteristik kurang mengikuti perkembangan berita sehingga menjadi hambatan dalam penerapan metode studi kasus dan diskusi.

Jadi upaya yang dilakukan oleh guru dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu dalam pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran disesuaikan dengan lingkungan sekolahnya terutama dengan latar belakang siswanya. Selain itu untuk mengatasi perbedaan karakteristik siswa, guru menggunakan metode pembelajaran yang mudah diterima oleh siswa mana pun. Kemudian untuk karakteristik siswa yang kurang mengikuti perkembangan berita, guru melakukan pembelajaran dengan metode *inquiry*, sehingga siswa harus mencari informasi sendiri.

2) Guru

Hambatan dalam pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran juga datang karena faktor guru yaitu kurangnya pemahaman terhadap langkah-langkah penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Upaya yang dilakukan guru untuk mengatasi hambatan tersebut adalah membahas hal-hal yang terkait dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan materi Pendidikan Kewarganegaraan bersama dengan guru lain atau pada forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Selain itu guru-guru juga meningkatkan pengetahuannya dengan mencari materi dari internet dan buku-buku yang lain.

b. Upaya yang Dilakukan Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Pembelajaran

Hambatan-hambatan yang dihadapi guru Pendidikan Kewarganegaraan di SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat dalam melaksanakan pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah siswa, waktu, dan media. Upaya-upaya yang dilakukan oleh guru dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut adalah sebagai berikut :

1) Siswa

Hambatan pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan salah satunya adalah berasal dari faktor siswa. Faktor siswa tersebut yaitu kondisi fisik, kondisi ekonomi, motivasi dan daya pikir siswa. Upaya yang dilakukan oleh guru dalam mengatasi hambatan rendahnya motivasi siswa adalah dengan menggunakan metode tanya jawab untuk memotivasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian pada siswa yang memiliki daya pikir rendah diadakan diklat untuk latihan soal-soal secara terus-menerus. Pada aspek hambatan kondisi fisik siswa yang mengantuk dan kecapekan, guru mengatasinya dengan menggunakan strategi pembelajaran yang menarik. Guru mengatasi hambatan kondisi ekonomi dengan meminjam buku dari perpustakaan sehingga siswa tidak perlu membeli buku pelajaran.

2) Waktu

Faktor waktu juga merupakan salah satu penghambat dalam pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.

Terbatasnya waktu yang tersedia untuk pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sedangkan materi ajar Pendidikan Kewarganegaraan sangat banyak menjadikan guru yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan pelaksanaan pembelajaran dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah waktu yaitu dengan menyesuaikan pelaksanaan pembelajaran dengan waktu yang tersedia. Jadi walaupun pelaksanaan pembelajarannya tidak sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran namun pemberian materi tetap sesuai dengan sistematika materi yang harus diberikan dan semua materi tuntas diberikan.

3) Media

Ketidaklengkapan media di SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat juga menjadi hambatan guru. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah menyesuaikan metode dengan media yang tersedia di sekolah masing-masing atau dengan menggunakan media cetak, dan gambar yang dibawa sendiri. Selain itu guru juga mengantisipasinya dengan lebih banyak menggunakan metode tanya jawab.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari deskripsi hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan mengenai hambatan guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di SMA se-kabupaten Sleman Wilayah Barat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hambatan pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah karena faktor siswa dan guru. Faktor siswa yaitu karakteristik dan latarbelakang siswa yang berbeda-beda. Faktor guru yaitu kurangnya pemahaman terhadap langkah-langkah penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan materi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Sedangkan hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran adalah faktor siswa, waktu, dan media. Faktor siswa yaitu kondisi fisik, kondisi ekonomi, motivasi dan daya pikir siswa. Faktor waktu yang dimaksud disini adalah terbatasnya waktu untuk pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sedangkan materi ajar

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sangat banyak. Faktor media yaitu ketidaklengkapan media.

2. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran untuk faktor siswa yang meliputi karakteristik dan latarbelakang siswa yang berbeda dengan metode pembelajaran yang mudah diterima siswa dan menyesuaikan pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dengan latar belakang siswanya. Faktor guru yang meliputi kurangnya pemahaman terhadap langkah-langkah penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan materi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan membahas hal-hal yang terkait dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan materi Pendidikan Kewarganegaraan bersama dengan guru lain atau pada forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran, serta meningkatkan pengetahuannya dengan mencari materi dari internet dan buku-buku lainnya. Sedangkan upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran yang berasal dari faktor siswa yang meliputi kondisi fisik, kondisi ekonomi, motivasi, dan daya pikir dengan menggunakan strategi pembelajaran yang menarik, meminjam buku dari perpustakaan, menggunakan metode tanya jawab untuk memotivasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar, dan diadakan diklat untuk latihan soal-soal secara terus-menerus. Faktor waktu yaitu terbatasnya waktu untuk pembelajaran

sedangkan materi ajar pembelajaran sangat banyak dengan menyesuaikan pelaksanaan pembelajaran dengan waktu yang tersedia, namun pemberian materi tetap sesuai dengan sistematika materi. Faktor media yang berupa ketidaklengkapan media yaitu dengan menyesuaikan metode dengan kondisi siswa dan media yang tersedia di sekolah masing-masing atau dengan menggunakan media cetak, dan gambar yang dibawa sendiri dan guru mengantisipasinya dengan lebih banyak menggunakan metode tanya jawab.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka diketahui bahwa hambatan guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat belum berjalan dengan baik. Hal tersebut berimplikasi pada siswanya, yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman guru terhadap langkah-langkah penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran berimplikasi pada kurang terstrukturanya kegiatan pembelajaran sehingga siswa kurang memahami apa yang disampaikan.
2. Kurangnya pemahaman guru terhadap materi Pendidikan Kewarganegaraan karena perkembangan materi Pendidikan Kewarganegaraan

yang sulit dipahami juga menjadi salah satu hambatan. Materi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berimplikasi pada kurangnya kualitas materi yang guru sampaikan sehingga siswa jadi kurang mengerti atau kurang paham terhadap materi yang diajarkan oleh guru.

3. Ketidaklengkapannya media di sekolah menyebabkan metode pembelajaran menggunakan ceramah dan tanya jawab saja. Hal ini berimplikasi pada siswanya, di mana siswa di dalam pelaksanaan pembelajaran menjadi bosan dan kurang memperhatikan pelajaran, sehingga siswa kurang aktif yaitu cenderung pasif dan tidak kritis karena media pembelajarannya kurang menarik. Jadi inilah yang menyebabkan reaksi siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran yang berlangsung kadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan guru.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian mengenai hambatan guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di SMA se-kabupaten Sleman Wilayah Barat, maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran yang sekiranya dapat dijadikan bahan masukan atau pertimbangan sebagai berikut :

1. Bagi dinas pendidikan atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran agar memberikan sosialisasi tentang pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran secara teoritis dan praktis kepada guru pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan agar lebih memahami tentang pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
2. Bagi dinas pendidikan atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan agar sosialisasi tentang materi-materi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang baru terhadap guru-guru senior agar paham dengan materi yang akan diajarkan dan dapat meningkatkan pengetahuan guru.
3. Bagi dinas pendidikan atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran agar menambah persediaan buku-buku pelajaran pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan atau buku-buku yang relevan dengan materi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk menambah pengetahuan guru tentang materi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.
4. Bagi pihak sekolah supaya menyediakan kelengkapan sarana dan prasarana khususnya media pembelajaran untuk menunjang pembelajaran demi kemajuan sekolah dan kegiatan belajar mengajar dapat belajar dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asep Herry Hermawan. dkk. 2005. “ *Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran*”. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). 2006. “*Standar Isi Pendidikan Kewarganegaraan SD/MI,SMP/MTs, SMA/MA/MK*”. Jakarta.
- Cholisin. 2000. “ *IKN-PKN*”. Jakarta: Universitas Terbuka.
- _____. 2002. “ *Materi Pokok Ilmu Kewarganegaraan Pendidikan kewarganegaraan*”. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Deddy Mulyana. 2004. “ *Metodologi Penelitian Kualitatif. Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*”. Bandung: Rosdakarya Remaja.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2006). *Panduan Penyusunan KTSP Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta.
- E. Kus Eddy Sartono, dkk. 2002. “ *Penddikan Kewarganegaraan*”. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Hadari Nawawi. 2001. “ *Metode Penelitian Sosial*”. Yogyakarta: UGM Press.
- _____. 2002. “ *Metode Penelitian Bidang Sosial*”. Yogyakarta: UGM Press.
- Husnaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. 2004. “ *Metodologi Penelitian Sosial*”. Jakarta: Bumi Aksara.
- Joko Susilo Muhammad. 2007. “ *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Manajemen Pelaksanaan dan Kesiapan Sekolah Menyongsongnya*”. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Komaruddin Hidayat dan Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA. 2008. “ *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education); Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*”. ICCE UIN Syarif Hidayatullah bekerja sama dengan Penerbit Penada Media Group.
- Lexy J. Moleong. 2006. “ *Metodologi Penelitian Kualitatif*”. Bandung: Rosdakarya Remaja.

- M Iqbal Hasan. 2002. “ *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*”. Jakarta: Ghaha Indonesia.
- Mardalis. 2008. “ *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*”. Jakarta: Bumi Aksara.
- Martinis Yamin. 2007. “ *Desain Pembelajaran Berbasis Tingkat Satuan Pendidikan*”. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Masnur Muslich. 2010. “ *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Dasar Pemahaman dan Pengembangan. Pedoman bagi Pengelola Lembaga Pendidikan, Pengawas Sekolah. Kepala Sekolah, Dewan Sekolah, dan Guru*”. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mohammad Ali. 1984. “ *Guru dalam Proses Belajar Mengajar*”. Bandung: Sinar Baru.
- Mohammad User Usman. 1992. “ *Metode Guru Profesional*”. Bandung: Rosdakarya Remaja.
- Mulyasa. 2005. “ *Konsep, Karakteristik, dan Implementasi*”. Bandung: Rosdakarya Remaja.
- _____. 2006. “ *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*”. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- _____. 2009. “ *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah*”. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nana Sudjana. 1999. “ *Media Pembelajaran (Menyusun dan Pembuatannya)*”. Bandung: sinar Baru
- _____. 2005. “ *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah*”. Jakarta: Sinar Baru Algrasindo.
- Nana Syaodih. 2005. “ *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*”. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Riduwan. 2007. “ *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*”. Bandung: Alfabeta.
- Slamet P. H. (2005). “ *Handout Kapita Selekta Desentralisasi Pendidikan di Indonesia*”. Jakarta: Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama, Depdiknas RI.
- Suciati,dkk. 2005. “ *Belajar dan Pembelajaran*”. Jakarta: Universitas Terbuka.

Sugiyono. 2010. “ *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”. Bandung: Alfabeta.

Suharsimi Arikunto. 1998. “ *Prosedur Penelitian Suatu Pendidikan Praktek (Edisi Revisi V)*”. Jakarta: rineka Cipta.

_____. 2002. “ *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*”. Jakarta: Buma Aksara.

Sukandarrumidi. 2006. “ *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneneliti Pemula*”. Yogyakarta: UGM Press.

Udin S. Winataputra. 2005. “ *Materi dan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan SD*”. Jakarta: Universitas Terbuka.

PERUNDANG-UNDANGAN

Depdiknas. (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Depdiknas. (2005). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Depdiknas. (2005). Peraturan Pemerintah, Nomor 19, Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.

Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses

Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

MAKALAH

Cholisin. (2008). “*Beberapa Pendapat Mengenai Komponen Paradigm Baru Pendidikan Kewarganegaraan*”. Hand Out Makalah Mata Kuliah Ilmu Kewarganegaraan. Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum: FISE UNY.

INTERNET

Artikel di internet. Massofa (2009). “Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran PKn”. <http://massofa.wordpress.com/2009/11/02/pengembangan-kurikulum-dan-pembelajaran-pkn/> diunduh pada tanggal 26 Februari 2011

<http://Lpmpjogja.diknas.go.id>

Wawancara – Guru

1. Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

- a. Jelaskan sistematika pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan?
- b. Bagaimana guru dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada proses pembelajaran?

2. Pelaksanaan Pembelajaran

Bagaimana pelaksanaan pembelajaran di kelas, apakah pelaksanaan pembelajaran dalam metode, media, dan waktu telah sesuai dengan tujuan dan indikator Rencana Pelaksanaan Pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan?

3. Hambatan dalam pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran

- a. Apakah dalam pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran terdapat hambatan ?
- b. Apakah dalam pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran terdapat hambatan?

4. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan
 - a. Upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di sekolah ?
 - b. Upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di sekolah?

Observasi

Nama Sekolah :

Kelas :

No.	Aspek Yang Diamati	Keterangan
1	Menyampaikan kompetensi dan tujuan yang harus dicapai siswa dalam pembelajaran	
2	Menggali pengetahuan awal siswa	
3	Membuat siswa dalam kelompok	
4	Membimbing siswa dalam kelompok	
5	Memberi kesempatan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi	
6	Memberikan kesempatan siswa untuk mengutarakan pendapat	

7	Menanggapi dan merespon pendapat dan pernyataan siswa	
8	Mengarahkan siswa untuk belajar mandiri	
9	Menggunakan media alat peraga yang bervariasi	
10	Memajang karya siswa di madding kelas	
11	Menggunakan metode/strategi yang bervariasi	
12	Memberi kesempatan kepada siswa untuk mencatat	
13	Member soal-soal latihan	
14	Memberikan kesimpulan diakhir pembelajaran	

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

1

SEKOLAH : SMA NEGERI 1 MINGGIR

MATA PELAJARAN: P K N

KELAS/SEMESTER : X / 2

ALOKASI WAKTU : 2 JAM PELAJARAN

I. STANDAR KOMPETENSI

Menganalisa sistim politik Indonesia

II. KOMPETENSI DASAR

Mendiskripsikan upra struktur dan infra struktur politik di Indonesia

III. INDIKATOR

1. Menganalisa pengertian sistim politik
2. Mendiskripsikan supra struktur politik Indonesia
3. Mendiskripsikan infra struktur politik

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Dengan membaca buku sistim politik Indonesia, siswa dapat menjelaskan pengertian sistim politik
2. Dengan membaca buku tentang supra struktur, infra struktur siswa dapat menjelaskan pengertian supra struktur politik Indonesia
3. Dengan Tanya jawab tentang infra struktur siswa dapat m enjelaskan pengertian infra struktur politik Indonesia

B. MATERI PEMBELAJARAN

1. Pengertian sistim politik Indonesia
2. Supra struktur politik Indonesia
3. Infra struktur politik Indonesia

C. METODE PEMBELAJARAN / MEDIA PEMBELAJARAN

1. Metode pembelajaran
 - a. ceramah bervariasi
 - b. Diskusi
2. Media pembelajarn
 - a. Skema sistim politik di Indonesia

D. LANGKAH- LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN

1. Pendahuluan : 5 menit
 - a. orientasi klasikal
 - b. pre tes
 - c. menjelaskan tujuan pembelajaran
 - d. menanyakan kepada siswa lembaga negara dan lembaga masyarakat yang ada di Indonesia
2. kegiatn inti : 80 menit
 - a. Melalui ceramah bervariasi tentang sistim politik Indonesia siswa mempelajari sistim politik Indonesia, supra struktur politik Indonesia Guru inti menjelaskan materi pada siswa yang mengalami kesulitan
 - b. siswa diskusi tentang eksistensi infra atruktur dan supra struktur politik Indonesia, siswa dibagi dalam 8 kelompok, 4 kelompok mempresentasikan, 4 kelompok lainnya sebagai pembahas yang dipandu guru
3. Penutup : 5 menit
 - a. Kesimpulan

Guru bersama dengan siswa menyimpulkan sistim politik Indonesia


E. SUMBER BELAJAR

1. Kewarganegaraan oleh Ahmad husain penerbit Balai Pustaka
2. Pendidikan Kewarganegarn oleh Retno Listyanti 21007 Penerbit Erlangga
3. Pendidikan Kewarganeraaan oleh Tim MGMP PKN 2007

F. PENILAIAN

1. Metode :. Ketramilan proses dengan cara lesan
2. Soal
 - a. Jelaskan pengertian sistim politik Indonesia
 - b. jelaskan Supra struktur Indonesia
 - c. jelaskan infra struktur politik Indonesia
3. Kunci Jawaban
 - a. Sistim politik Indonesia adalah sistim politik yang menunjuk pada suatu sistim yang pernah berlaku di Indonesia, yang sedang berlaku di Indonesia maupun yang berlaku selama eksisitensi Negara Indonesia sampai sekarang.
 - b. Supra struktur politik Indonesia adalah lembaga legislative, eksekutif, yudikatif
 - c. Infra struktur politik Indonesia meliputi :
 1. partai politik
 2. kelompok kepentingan
 3. kelompok penekan
 4. alat komunikasi politik
 5. tokoh politik
4. Pedoman penilaian
 - soal a nilai 3
 - soal b nilai 3
 - soal c nilai 4
 - jumlah nilai 10

Mengetahui
Kepala Sekolah



Dra. Samijo
NIP 19610819-198903 1 007

Minggir, 11 Januari 2010

Guru Bidang study



Dra. Sukapti
NIP 19650906 198412 2

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Sekolah : SMA Negeri 1 Minggir
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas / Program : X (Sepuluh) / Umum
Semester : 2 (Dua)
Standar Kompetensi : 6. Menganalisis sistem politik di Indonesia
6.3. Menampilkan peran serta dalam sistem politik di Indonesia
Alokasi Waktu : 2 (dua) Jam Pelajaran (1 x Pertemuan)

A. Live Skill :

1. Aspek eksistensi diri sebagai makhluk Tuhan, sosial dan lingkungan
2. Kecakapan menggali informasi
3. Kecakapan mengidentifikasi variabel dan hubungan satu dengan yang lain

B. Indikator :

- Mengidentifikasi ciri-ciri masyarakat politik
- Menunjukkan perilaku politik yang sesuai dengan aturan
- Mensimulasikan salah satu kegiatan politik yang diselenggarakan oleh pemerintah (pemilu)
- Berperan serta secara aktif dalam sistem politik di Indonesia

C. Tujuan Pembelajaran (siswa dapat/mampu)

1. Mengidentifikasi ciri-ciri masyarakat politik
2. Menunjukkan perilaku politik yang sesuai dengan aturan
3. Mensimulasikan salah satu kegiatan politik yang diselenggarakan oleh pemerintah (pemilu)
4. Berperan serta secara aktif dalam sistem politik di Indonesia

D. Materi Pembelajaran :

1. Ciri masyarakat politik
2. Menunjukkan perilaku yang sesuai dengan aturan
3. Contoh peran serta dalam sistem politik

@ Ciri-ciri umum sistem politik adalah :

- Semua sistem politik termasuk yang paling sederhana harus mempunyai kebudayaan politik
- Semua sistem politik harus menjalankan fungsinya
- Semua struktur politik walaupun dispesifikasikan dengan berbagai unsur baik pada masyarakat primitif maupun modern , harus melaksanakan banyak fungsi
- Semua sistem politik adalah sistem campuran dalam pengertian kebudayaan

@ Contoh perilaku yang sesuai dengan aturan adalah :

- Menggunakan hak pilih secara benar
- Menyalurkan aspirasi / keinginan melalui saluran yang tersedia
- Mengemukakan pendapat dimuka umum harus mengindahkan rambu-rambu hukum

(@) Kegiatan yang diselenggarakan pemerintah (pemilu) yaitu :

- Pemilihan anggota-anggota MPR / DPR / DPD
- Pemilihan Presiden / Wakil Presiden
- Pemilihan kepala-kepala daerah tingkat I & II

@ Bentuk peran serta aktif dalam sistem politik di Indonesia yaitu orang-orang yang terlibat dan bekerja, baik secara langsung maupun secara tak langsung dalam pemerintahan

@ Manfaat peran serta aktif dalam sistem politik yaitu dapat mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat, karena persoalan politik merupakan persoalan bersama

E. Metoda Pembelajaran :

1. Ceramah bervariasi
2. Pemberian tugas (individu/Kelompok)
3. Tanya Jawab/ Berpikir kritis
4. Discovery dengan study pustaka
5. Kerja kelompok
6. Diskusi kelompok dan Diskusi kelas
7. Presensi

F. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran :

Pertemuan I :

Jenis Kegiatan	Macam Kegiatan	Waktu	Sumber
Kegiatan Awal	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Membuka pelajaran dengan salam dan berdoa ➤ Menciptakan suasana kelas yang kondusif (Presensi dan motivasi siswa) ➤ Menghubungkan dan memberikan gambaran tentang materi sebelumnya dengan materi yang akan dibahas ➤ Memberikan informasi singkat tentang SK, KD dan tujuan pembelajaran ➤ Pre tes : Menyampaikan beberapa pertanyaan secara lisan 	10 menit	
Kegiatan Inti	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menjalani komunikasi aktif dengan ceramah bervariasi, tanya jawab, pembentukan kelompok diskusi, discovery dengan study pustaka ➤ Menjelaskan ciri-ciri masyarakat politik, menunjukkan perilaku politik yang sesuai dengan aturan, mensimulasikan salah satu kegiatan politik yang diselenggarakan oleh pemerintah (pemilu), menjelaskan peran serta secara aktif dalam system politik di Indonesia ➤ Tanya jawab tentang ciri-ciri masyarakat politik, perilaku politik yang sesuai dengan aturan, salah satu kegiatan politik yang diselenggarakan oleh pemerintah (pemilu), peran serta secara aktif dalam system politik di Indonesia ➤ Mendiskusikan tentang perilaku politik yang sesuai dengan aturan ! ➤ Mempresentasikan hasil diskusi kelompok ➤ Menyimpulkan hasil discovery study pustaka dan hasil diskusi-kelompok 	70 menit	*PKn X,Budiyanto,Er langga,Jakarta, 2004 *PKn X,Retno Listyarti,Esis, 2007 *PKn X,Samijo-Samidi,Tiga Serangkai PM,Solo,2008 *PKn X TIM MGMP,Kab.Sleman *UUD1945, Amandemen, 1999-2004
Tugas Mandiri Terstruktur			
Kegiatan penutup	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Secara klasikal membuat kesimpulan tentang materi yang telah dipelajari 	10 menit	

Tugas Mandiri Tak Terstruktur	bersama ➤ Memberikan informasi singkat tentang materi yang akan dibahas minggu depan ➤ Pos tes : Dilakukan secara lisan atau tertulis ➤ Memberikan tugas rumah (PR) : Membuat resume mengenai materi yang dibahas ➤ Pelajaran di akhiri dengan berdoa dan salam		
-------------------------------	---	--	--

G. Alat, Bahan Dan Sumber Belajar :

1. Laptop, LCD, CD / Flas disk
2. Lembar diskusi
3. Soal tes beserta perangkat penilaian
4. Modul / bahan referensi
5. Lingkungan sekolah / halaman
6. PKn kelas X, Budiyanto, Erlangga , Jakarta, 2004.
7. PKn kelas X, Bambang Suteng, Erlangga, Jakarta, 2006.
8. PKn kelas X, Samijo – Samidi, Tiga Serangkai. Pustaka Mandiri, Solo, 2008.
9. PKn kelas X, TIM MGMP , Kabupaten Sleman.
10. UUD 1945 Hasil Amandemen 1 sampai 4 (1999-2002)

H. Penilaian :

- Jenis Penilaian : 1. Non Tes
2. Tugas
3. Tes
- Bentuk instrumen : 1. Tugas individual
2. Tugas Kelompok
3. Tes tertulis Soal Pilihan Ganda & Soal Uraian
- Contoh instrumen :
 1. Lembar refleksi diri
 - Bagaimana proses pembelajaran kali ini menurut anda ?
 - Sejauh mana partisipasi anda selama dalam proses pembelajaran kali ini ?
 - Apakah selama proses pembelajaran anda mempunyai kesempatan untuk bertanya atau mengemukakan pendapat ?
 2. Tugas Individual : Sebutkan salah satu kegiatan politik yang diselenggarakan oleh pemerintah (pemilu) ?
 3. Tugas Kelompok : Diskusikan Peran serta secara aktif dalam sistem politik di indonesia !
 4. Tes Tertulis (Soal Uraian & Soal Pilihan Ganda)

I. Berilah tanda silang a, b, c, d atau e pada jawaban yang benar !

1. Adanya peningkatan partisipasi rakyat dalam berbagai kegiatan organisasi politik, organisasi masyarakat dan kelompok penekan merupakan salah satu ciri
 - a. Masyarakat demokrasi
 - b. Masyarakat elit
 - c. Masyarakat budaya
 - d. Masyarakat madani
 - e. Masyarakat politik

2. Undang-undang yang mengatur tentang asas dan ciri partai politik , tujuan , fungsi hak dan kewajiban partai politik di Indonesia adalah.....
 - a. UU No. 9 tahun 1998
 - b. UU No. 31 tahun 2003
 - c. UUD 1945
 - d. UU No. 12 tahun 2003
 - e. UU No. 23 tahun 2003
3. Proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi secara adil diperankan oleh partai politik sebagai sarana....
 - a. Pendidikan politik
 - b. Sosialisasi politik
 - c. Komunikasi politik
 - d. Rekrutmen politik
 - e. Pencipta iklim politik
4. Aktivitas seseorang atau sekelompok orang untuk belajar tentang politik dan mengembangkan orientasi politiknya secara aktif dalam kehidupan politik dinamakan
 - a. Sistem politik
 - b. Partisipasi politik
 - c. Dinamika politik
 - d. Sosialisasi politik
 - e. Komunikasi politik
5. Aktivitas politik yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi pancasila dalam pengambilan keputusan.....
 - a. Voting atau pengambilan suara terbanyak
 - b. Sesuai dengan kemauan pimpinan sidang
 - c. Kompromi mengenai hal tertentu
 - d. Musyawarah untuk mufakat
 - e. Kekeluargaan dan kebersamaan

II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan benar !

1. Sebutkan ciri-ciri umum sistem politik ?
2. Sebutkan contoh perilaku yang sesuai dengan aturan ?
3. Sebutkan salah satu kegiatan politik yang diselenggarakan pemerintah (pemilu) ?
4. Sebutkan bentuk peran serta aktif dalam sistem politik di Indonesia ?
5. Jelaskan manfaat dari peran serta aktif dalam sistem politik ?

Kunci Jawaban :

I. Jawaban Soal Pilihan Ganda :

1. c 2. b 3. b 4. b 5. e

II. Jawaban Soal Uraian :

1. Ciri-ciri umum sistem politik adalah :
 - a. Semua sistem politik termasuk yang paling sederhana harus mempunyai kebudayaan politik
 - b. Semua sistem politik harus menjalankan fungsinya

- c. Semua struktur politik walaupun dispesifikasikan dengan berbagai unsur baik pada masyarakat primitif maupun modern, harus melaksanakan banyak fungsi
 - d. Semua sistem politik adalah sistem campuran dalam pengertian kebudayaan
2. Contoh perilaku yang sesuai dengan aturan adalah :
 - a. Menggunakan hak pilih secara benar
 - b. Menyalurkan aspirasi / keinginan melalui saluran yang tersedia
 - c. Mengemukakan pendapat di muka umum harus mengindahkan rambu-rambu hukum
 3. Kegiatan yang diselenggarakan pemerintah (pemilu) yaitu :
 - a. Pemilihan anggota-anggota MPR / DPR / DPD
 - b. Pemilihan Presiden / Wakil Presiden
 - c. Pemilihan kepala-kepala daerah tingkat I & II
 4. Bentuk peran serta aktif dalam sistem politik di Indonesia yaitu orang-orang yang terlibat dan bekerja, baik secara langsung maupun secara tak langsung dalam pemerintahan
 5. Manfaat peran serta aktif dalam sistem politik yaitu dapat mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat, karena persoalan politik merupakan persoalan bersama

• Pedoman Penilaian

• Nilai Kognitif :

- Untuk skor soal pilihan ganda berlaku rumus Skor : Untuk setiap jawaban yang benar Skor : 2
- Untuk skor soal uraian berlaku rumus Skor : Untuk setiap jawaban yang benar Skor : 4

A..Jumlah soal pilihan ganda 5 soal.. Skor = 10
 B..Jumlah soal uraian 5 soal. Skor maksimal setiap soal = $5 \times 4 = 20$
 C. Total skor : Skor A + Skor B = $10 + 20 = 30$
 D. Nilai maksimal : $30 : 3 = 10$

• Nilai Tugas / Portofolio dengan nilai maksimal 100, terdiri dari :

- Nilai laporan maksimal = 30
- Nilai presentasi maksimal = 40
- Kedalaman dan keluasan materi maksimal = 30

• Nilai Afektif :

No	Nama	Kerja sama	Partisipasi	Ketepatan menjawab	Keberanian mengemukakan pendapat
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

• Nilai Psikomotorik :

- Diskusi kelompok tentang :

- Berperan serta secara aktif dalam system politik di Indonesia

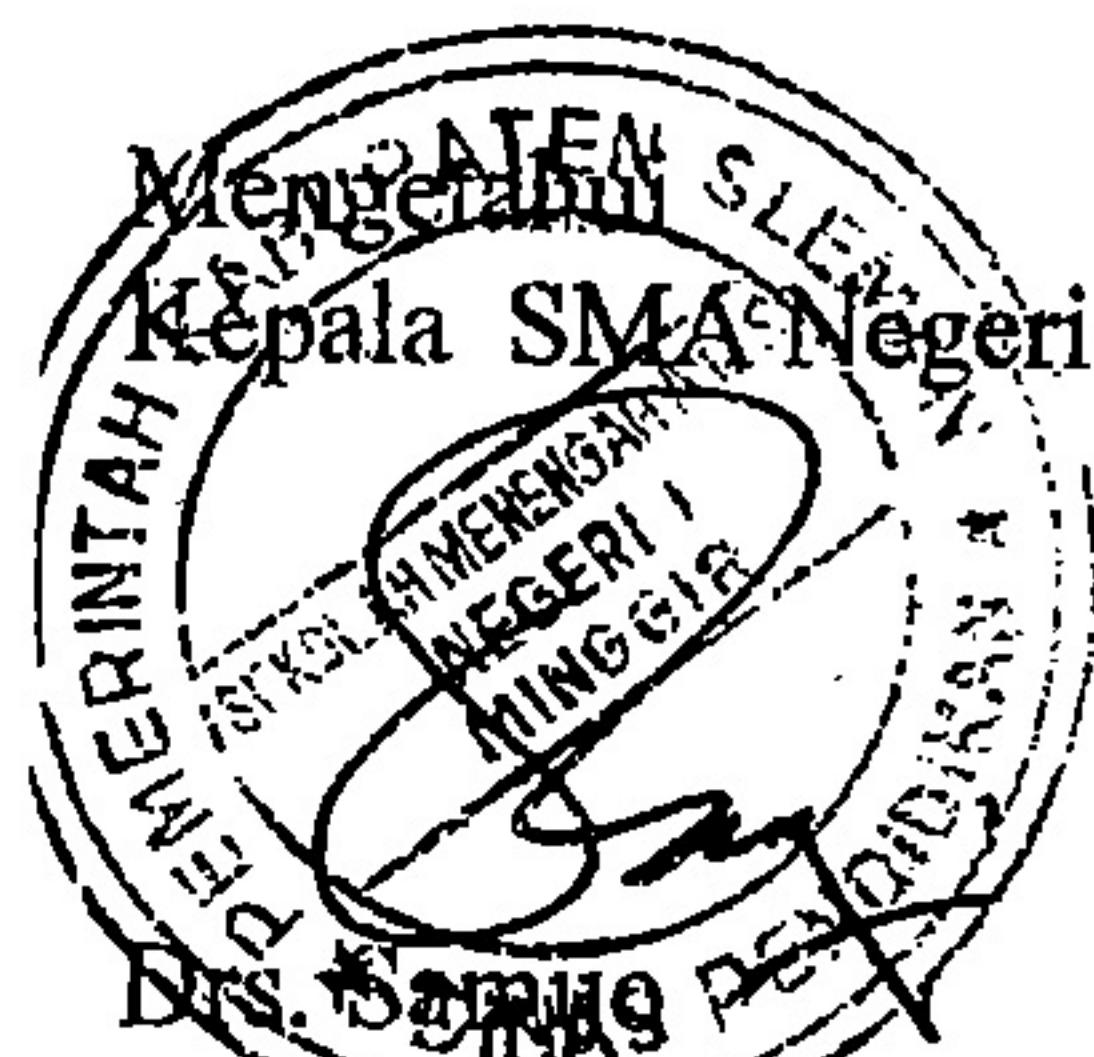
- **Aspek yang dinilai :**

- Kecakapan personal (A) : Kemampuan mengemukakan pendapat dll
- Kecakapan kelompok (B) : Kemampuan dalam memimpin, kerja sama tim, portopolio dll
- Kecakapan hidup sosial (C) : Kemampuan berkomunikasi, menghargai pendapat teman dll

No	Nama	A	B	C	Nilai Psiko
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

- **Nilai Akhir :**

No	Nama	KKM	Nilai Afek	Nilai Kog	Nilai Psiko	Nilai Akhir	Ket.
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							



Drs. Sonno
NIP.19610819 198903 1 007

Depok, 17 Juli 2009

Guru Mata Pelajaran

Drs. Zainal Makmur
NIP.19550126 199412 1 001

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) NO : 5.1

I. Identitas

Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Godean
 Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
 Kelas / Program : XI / IPA
 Semester : 2 (Genap)
 Alokasi waktu : 4 X 45 '(4 JP)
 Standar Kompetensi : Menganalisis Sistem Hukum Internasional dan Peradilan Internasional
 Kompetensi Dasar : Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan internasional
 Indikator :

1. Mengemukakan makna hukum internasional
2. Menjelaskan hakekat hukum internasional
3. Menjelaskan asas-asas hukum internasional
4. Mengidentifikasi sumber-sumber hukum internasional
5. Mengidentifikasi subyek-subyek hukum internasional
6. Mendeskripsikan peranan lembaga peradilan internasional
7. Mengidentifikasi kewenangan mahkamah internasional
8. Mendeskripsikan kendala yang dihadapi mahkamah internasional sebagai lembaga peradilan internasional

II. Tujuan Pembelajaran

Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran siswa dapat :

1. Mengemukakan makna hukum internasional
2. Menjelaskan hakekat hukum internasional
3. Menjelaskan asas-asas hukum internasional
4. Menjelaskan peranan lembaga peradilan internasional
5. Menyebutkan kewenangan mahkamah internasional
6. Menjelaskan kendala yang dihadapi dalam rangka menegakkan hukum internasional

III. Materi Pembelajaran

Hukum dan Peradilan Internasional

✓ Konsep dasar hukum internasional

Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara antara negara dengan negara, negara dengan subyek hukum internasional lainnya yang bukan negara atau subyek hukum satu dengan lainnya.

✓ Asas-asas hukum internasional

- ⊗ Asas persamaan derajat
- ⊗ Asas territorial
- ⊗ Asas kebangsaan
- ⊗ Asas kepentingan umum
- ⊗ Asas keterbukaan

- ⊗ Asas hukum publik internasional
- ✓ Sumber-sumber hukum internasional
 - ⊗ Traktat atau perjanjian internasional
 - ⊗ Hukum kebiasaan internasional
 - ⊗ Keputusan badan-badan penyelesaian sengketa atau yurisprudensi
 - ⊗ Pendapat para sarjana atau doktrin
 - ⊗ Keputusan-keputusan atau resolusi organisasi internasional
- ✓ Subyek-subyek hukum internasional
 - ⊗ Negara
 - ⊗ Organisasi internasional (antar negara atau antar pemerintah)
 - ⊗ Palang Merah Internasional
 - ⊗ Vatikan atau Tahta Suci
 - ⊗ Organisasi pembebas atau bangsa-bangsa yang sedang memperjuangkan hak-haknya
 - ⊗ Kaum belligerensi / kaum pemberontak
 - ⊗ Wilayah perwalian
 - ⊗ Individu
 - ⊗ Organisasi internasional non pemerintah atau non negara
 - ⊗ Perusahaan internasional atau perusahaan multi-nasional
- ✓ Lembaga Peradilan Internasional

Macam-macam peradilan internasional

 - ⊗ Arbitrasi internasional
 - ⊗ Mahkamah peradilan tetap
 - ⊗ Mahkamah pidana internasional
 - ⊗ Mahkamah kriminal internasional untuk bekas Yugoslavia
 - ⊗ Mahkamah kriminal internasional untuk bekas Rwanda

IV. Metode Pembelajaran

- Informasi
- Kerja mandiri
- Eksplorasi
- Diskusi
- Presentasi

V. Langkah-Langkah Pembelajaran

Pertemuan ke 1 : 2 x 45 menit

No	Kegiatan	Alokasi Waktu (menit)	Keterangan
1.	Kegiatan Pendahuluan a. Guru mempersiapkan kelas untuk kegiatan pembelajaran. Guru menjajaki daya ingat siswa tentang hukum Internasional dan peradilan internasional b. Memotivasi Guru memberikan penjelasan tentang tujuan mempelajari Sistem Hukum Internasional dan Peradilan Internasional	10 menit	

2.	Kegiatan Inti a. Siswa memperhatikan peta konsep yang ditampilkan guru. b. Siswa menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan guru seputar hukum internasional c. Siswa mendengar penjelasan guru tentang konsep dasar, asas-asas dan sumber-sumber hukum internasional d. Siswa menganalisis keterkaitan hukum nasional dengan hukum internasional dalam perkara internasional <i>Rasa ingin tahu, tanggungjawab, peduli sosial</i>	65 menit	TM TT
3.	Kegiatan Penutup a. Refleksi Siswa dan guru membuat rangkuman tentang hukum internasional b. Penilaian Guru memberikan penilaian terhadap hasil kerja siswa.	15 menit	

Pertemuan ke 2 : 2 x 45 menit

No	Kegiatan	Alokasi Waktu (menit)	Keterangan
1.	Kegiatan Pendahuluan a. Guru mempersiapkan kelas untuk kegiatan pembelajaran. b. Guru menajaki daya ingat siswa tentang materi sebelumnya	10 menit	
2.	Kegiatan Inti a. Siswa memperhatikan peta konsep yang ditampilkan guru. b. Siswa menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan guru seputar materi yang disampaikan sebelumnya c. Siswa mendengar penjelasan guru tentang subyek-subyek hukum internasional dan peradilan internasional <i>Gemar membaca, cinta tanah air dan semangat kebangsaan</i>	65 menit	TM
3.	Kegiatan Penutup a. Refleksi Siswa dan guru membuat rangkuman tentang sistem hokum dan peradilan internasional b. internasional. c. Penugasan Siswa menganalisis kedudukan individu sebagai subyek hukum internasional	15 menit	KMTT

VI. Sumber Belajar

1. J.G. Starke (2003), Pengantar Hukum Internasional edisi kesepuluh, Jakarta: Sinar Grafika.
2. Bambang Suteng, dkk. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan; untuk kelas XI. Jakarta: Erlangga.
3. Tim MGMP PKn Sleman. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Sinar Pengetahuan.

4. Sri Purwati..2007. Diktat Pendidikan Kewarganegaraan. Sleman: SMA N 1 Kalasan
5. Tiwi Wahyuni. Pendidikan Kwarganegaraan. Jakarta : Graha Pustaka
6. Suprpto. Kewraganegaraan.2005. Jakarta: Bumi Aksara
7. Mochtar Kusumatmadja. Pengantar Hukum Internasional. 2003. Bandung: Alumni
8. I Wayan Parthiana. Pengantar Hukum Internasional. 2003. Bandung: Mondar Maju
9. <http://www.indonesia.go.id>
10. <http://www.wikipedia-indonesia.com>
11. <http://www.voa-indonesia.com>

VII. Penilaian

1. Tehnik Penilaian : Tertulis
2. Bentuk : Uraian

Contoh Soal

1. Sumber hukum internasional berupa keputusan hakim terdahulu yang kemudian dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan pada perkara yang sama dan sejenis dinamakan
 - a. Kebiasaan internasional
 - b. Traktat internasional
 - c. Asas hokum internasional
 - d. Asas rebus sig stantibus
 - e. Yurisprudensi
2. Negara memiliki kewenangan untuk melaksanakan hukum bagi semua orang dan barang yang berada di wilayah negaranya. Pernyataan tersebut adalah pengertian dari asas
 - a. Konstitusi
 - b. Kemerdekaan
 - c. Territorial
 - d. Kebangsaan
 - e. Kepentingan umum
3. Berikut ini termasuk subyek hukum internasional, kecuali
 - a. Organisasi internasional
 - b. Perorangan (individu)
 - c. Pemberontakan dan pihak dalam sengketa
 - d. Tahta suci
 - e. Kekuasaan
4. Mahkamah internasional sebagai pengadilan tertinggi di seluruh dunia berkedudukan di ...
 - a. Belanda
 - b. Inggris
 - c. Perancis
 - d. Amerika Serikat
 - e. Swiss

5. Pada hakikatnya hukum internasional yang berlaku harus mengandung unsur....
- Menciptakan perdamaian
 - Mengatur hubungan secara adil
 - Melindungi kepentingan negara yang bersangkutan serta negara lain
 - Mengatur hubungan antarmasyarakat dan antarnegara secara adil dan damai
 - Memuat yurisdiksi yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan

Jawaban

- E
- C
- E
- A
- E

Kriteria Penilaian

Benar skornya 1 dan salah skornya 0

Format penilaian diskusi kelompok

No	Nama	Aspek Penilaian					Total Nilai	Presentasi
		Sikap	Keaktifan	Wawasan	Kemampuan mengemukakan pendapat	Kerjasama		

Keterangan : nilai maksimal : 20

Lembar Observasi Diskusi Kelompok

No	Nama Siswa	Aspek yang Dinilai						Skor/Jumlah
		1	2	3	4	5	6	

Aspek yang dinilai :

- Kemampuan menyampaikan pendapat
- Kemampuan memberikan argumentasi
- Kemampuan memberikan kritik
- Kemampuan mengajukan pertanyaan
- Kemampuan menggunakan bahasa yang baik
- Kelancaran berbicara

MENGETAHUI,
KEPALA SEKOLAH

Gudean,
Guru MAPEL

NB : MOTON MAAF DILAN MEMFOTO COPY KURANG LEMBARNYA
JADI LEMBAR PENGESAHAN TIDAK TERLOPYKAN

Penskoran :

- | | |
|---------------|--------|
| ▪ Tidak baik | Skor 1 |
| ▪ Kurang baik | Skor 2 |
| ▪ Cukup baik | Skor 3 |
| ▪ Baik | Skor 4 |
| ▪ Sangat baik | Skor 5 |

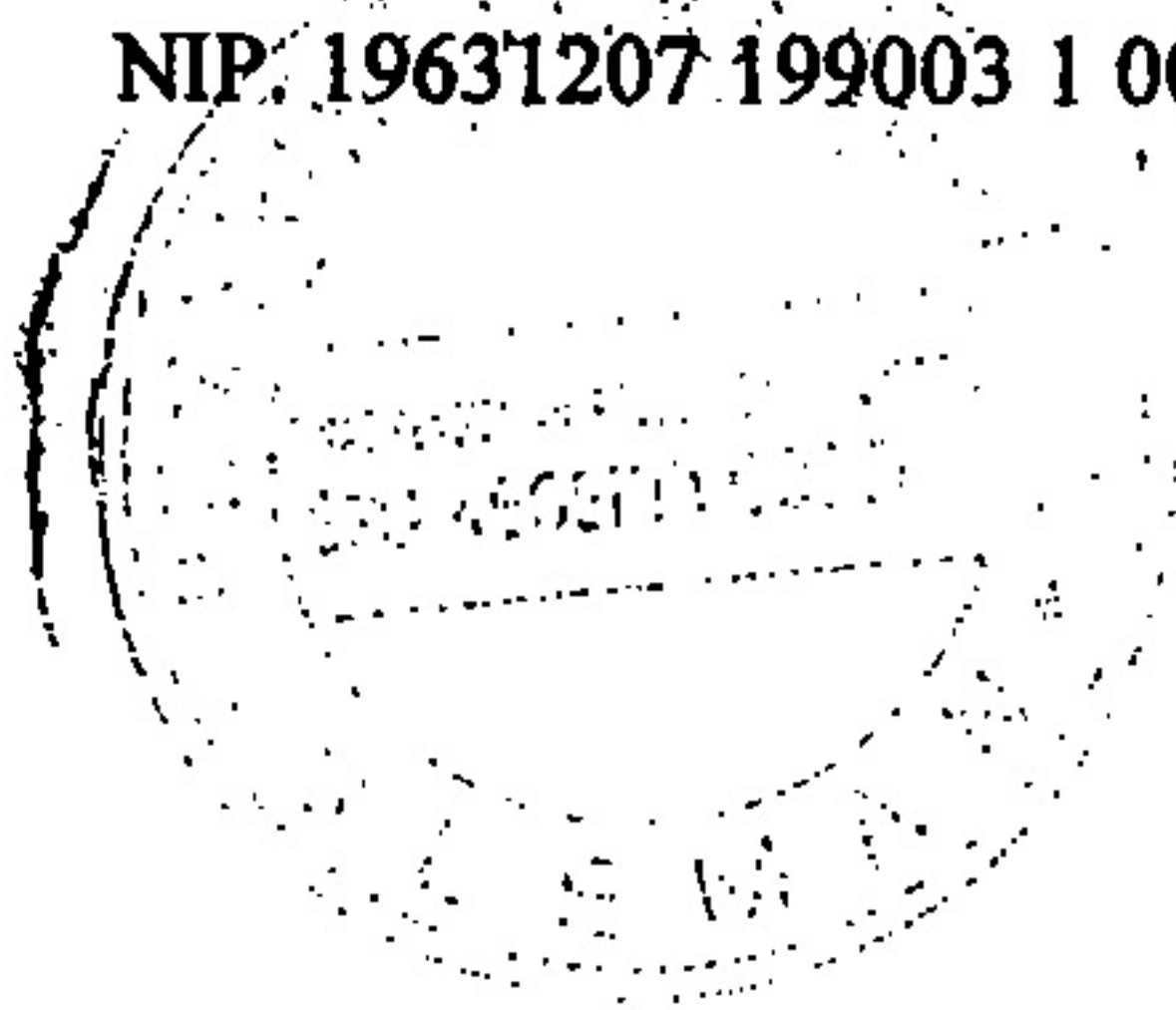
Jumlah Skor

- | | |
|---------|---------------|
| 24 - 30 | = Sangat baik |
| 18 - 23 | = Baik |
| 12 - 17 | = Cukup |
| 6 - 11 | = Kurang |

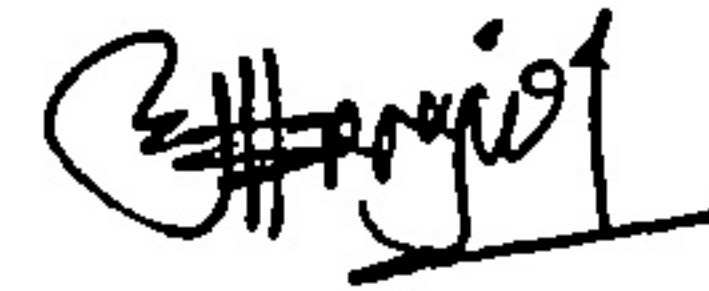
Mengetahui:
Kepala Sekolah



Drs. Shobariman
NIP. 19631207 199003 1 005



Godean, 12 Januari 2011
Guru Mata Pelajaran



Erni Widiarti, SH
NIP. 19741004 200801 2007

Lembar Observasi Diskusi Kelompok

No	Nama Siswa	Aspek yang Dinilai						Skor/ Jumlah
		1	2	3	4	5	6	

Aspek yang dinilai :

- Kemampuan menyampaikan pendapat
- Kemampuan memberikan argumentasi
- Kemampuan memberikan kritik
- Kemampuan mengajukan pertanyaan
- Kemampuan menggunakan bahasa yang baik
- Kelancaran berbicara

Penskoran :

- Tidak baik Skor 1
- Kurang baik Skor 2
- Cukup baik Skor 3
- Baik Skor 4
- Sangat baik Skor 5

198710 1 001

Jumlah Skor

- 24 – 30 = Sangat baik
- 18 – 23 = Baik
- 12 – 17 = Cukup
- 6 – 11 = Kurang

Mengetahui:
Kepala Sekolah

Drs. PAIMAN DARSIH
NIP.19510904 197603 1 004

Seyegan 11 Januari 2010
Guru bidang studi

SUNARYA, SPd.
NIP.19650925 200012 1 001

**RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
NO : 5.2**

I. Identitas

- Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Seyegan
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas / Program : XI / IPA
Semester : 2 (Genap)
Alokasi waktu : 4 X 45 '(4 JP)
Standar Kompetensi : Menganalisis Hubungan Internasional dan Organisasi Internasional
Kompetensi Dasar : Menjelaskan penyebab timbulnya sengketa internasional dan cara penyelesaian oleh Mahkamah Internasional
Indikator :
1. Mengidentifikasi penyebab timbulnya sengketa internasional
2. Menguraikan cara menyelesaikan masalah-masalah (sengketa) internasional

3. Memberikan contoh penyelesaian masalah internasional melalui arbitrase
4. Memberikan contoh penyelesaian masalah internasional melalui konsiliasi

II. Tujuan Pembelajaran

Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran siswa dapat :

1. Mengidentifikasi penyebab timbulnya sengketa internasional
2. Menguraikan cara menyelesaikan masalah-masalah (sengketa) internasional
3. Memberikan contoh penyelesaian masalah internasional melalui arbitrase
4. Memberikan contoh penyelesaian masalah internasional melalui konsiliasi

III. Materi Pembelajaran

Sengketa Internasional

- Sebab-sebab sengketa internasional
 - ❖ Intervensi
 - ❖ Ekstradisi (penyerahan)
 - ❖ Suaka (asylum)
 - ❖ Pelanggaran HAM
- Cara menyelesaikan masalah-masalah (sengketa) internasional
 - a. Damai
 - Peradilan yang terdiri dari Arbitrase dan Mahkamah Internasional
 - Di luar peradilan yang terdiri dari :
 - o Negosiasi
 - o Mediasi
 - o Konsiliasi
 - o Regional
 - b. Kekerasan (paksa)
 - Retorasi
 - Reprisal
 - Blokade damai
 - Embargo
- Mahkamah Internasional

Terdiri dari sekumpulan hakim-hakim yang bebas, dipilih tanpa memandang kewarganegaraan diantara ahli-ahli hukum yang memiliki moral yang tinggi dan kualifikasi yang diperlukan untuk memegang jabatan hukum yang tinggi di negaranya masing-masing atau penasehat-penasehat hukum yang keahliannya telah diakui dalam hukum internasional.

Mahkamah Internasional memiliki wewenangan personal dan wewenang rational material.

IV. Metode Pembelajaran

- Informasi
- Kerja mandiri
- Eksplorasi
- Diskusi
- Presentasi

V. Langkah-Langkah Pembelajaran

Pertemuan ke 1 : 2 x 45 menit

No	Kegiatan	Alokasi Waktu (menit)	Keterangan
1.	Kegiatan Pendahuluan a. Guru mempersiapkan kelas untuk kegiatan	10 menit	

	<p>pembelajaran. Guru menjajaki daya ingat siswa tentang sengketa internasional</p> <p>b. Memotivasi Guru memberikan penjelasan tentang tujuan mempelajari Sengketa internasional</p>		
2.	<p>Kegiatan Inti</p> <p>a. Siswa memperhatikan peta kousep yang ditampilkan guru.</p> <p>b. Siswa menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan guru seputar sengketa internasional</p> <p>c. Siswa mendengar penjelasan guru tentang sebab sengketa internasional dan cara penyelesaiannya oleh mahkamah internasional</p> <p>d. Siswa menguraikan peranan Mahkamah Internasional dalam penyelesaian sengketa internasional.</p> <p>e. Siswa dan guru membuat kesimpulan.</p>	65 menit	TT
3.	<p>Kegiatan Penutup</p> <p>a. Refleksi Siswa dan guru membuat rangkuman tentang sengketa internasional</p> <p>b. Penilaian Guru memberikan penilaian terhadap hasil kerja siswa.</p>	15 menit	

Pertemuan ke 2 : 2 x 45 menit

No	Kegiatan	Alokasi Waktu (menit)	Keterangan
1.	<p>Kegiatan Pendahuluan</p> <p>a. Guru mempersiapkan kelas untuk kegiatan pembelajaran. Guru menjajaki daya ingat siswa tentang materi sebelumnya</p>	10 menit	
2.	<p>Kegiatan Inti</p> <p>a. Siswa memperhatikan peta konsep yang ditampilkan guru.</p> <p>b. Siswa menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan guru seputar materi yang disampaikan sebelumnya</p> <p>c. Siswa mendengar penjelasan guru tentang penyelesaian sengketa internasional di mahkamah interansional</p>	65 menit	TT
3.	<p>Kegiatan Penutup</p> <p>a. Refleksi Siswa dan guru membuat rangkuman tentang sengketa internasional</p> <p>b. Penugasan Siswa menganalisis satu contoh sengketa</p>	15 menit	KMTT

	internasional yang belum selesai sampai saat ini beserta penyelesaiannya		
--	--	--	--

VI. Sumber Belajar

1. Bambang Suteng, dkk. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan; untuk kelas XI. Jakarta: Erlangga.
2. Tim MGMP PKn Sleman. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Sinar Pengetahuan.
3. Sri Purwati..2007. Diktat Pendidikan Kewarganegaraan. Sleman: SMA N 1 Kalasan
4. J.G. Starke (2003), Pengantar Hukum Internasional edisi kesepuluh, Jakarta: Sinar Grafika.
5. Tiwi Wahyuni. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta : Graha Pustaka
6. Suprpto. Kewarganegaraan.2005. Jakarta: Bumi Aksara
7. Mochtar Kusumatmadja. Pengantar Hukum Internasional. 2003. Bandung: Alumni
8. I Wayan Parthiana. Pengantar Hukum Internasional. 2003. Bandung: Mondar Maju
9. <http://www.indonesia.go.id>
10. <http://www.wikipedia-indonesia.com>
11. <http://www.voa-indonesia.com>
12. <http://www.mediaindonesia.com>

VII. Penilaian

1. Tehnik Penilaian : Tertulis
2. Bentuk : Uraian

Contoh Soal

1. Salah satu penyebab timbulnya sengketa internasional adalah faktor politis, yaitu berupa
 - a. Pengaruh ideologi
 - b. Batas wilayah
 - c. Kewarganegaraan
 - d. Faktor ekonomi
 - e. Lingkungan hidup
2. Penyelesaian sengketa internasional melalui jalur di luar peradilan adalah sbagai berikut, kecuali
 - a. Negosiasi atau perundingan
 - b. Perantara, mediasi atau jasa baik
 - c. Konsiliasi dalam arti luas
 - d. Penyelesaian yang diadakan dibawah pimpinan PBB
 - e. Peperangan
3. Zona bebas, damai, dan netral dari segala macam bentuk nuklir yang berada dikawasan ASEAN disebut dengan
 - a. SEATO
 - b. ZOPFAN
 - c. NATO
 - d. ANZUS
 - e. AFTA
4. Konflik antarbangsa umumnya disebabkan oleh sengketa internasional yang lebih dikenal dengan istilah

- a. Internasional disputes
 - b. Internasional kontrol
 - c. Internasionalisme
 - d. Keterlibatan Negara-negara tetangga
 - e. Diskriminasi
5. Apabila perkara atau masalah yang menjadi sengketa diajukan oleh salah satu pihak saja (unilateral) maka Mahkamah Internasional memiliki
- a. Kewenangan / yurisdiksi hukum
 - b. Hak meminta pihak yang lain
 - c. Hak menunggu pihak yang lain
 - d. Mendingkan saja
 - e. Kewenangan relatif

Jawaban

1.B

2.E

3.B

4.A

5.A

Kriteria Penilaian

Benar skornya 1 dan salah skornya 0

Format penilaian diskusi kelompok

No	Nama	Aspek Penilaian					Total Nilai	Presentasi
		Sikap	Keaktifan	Wawasan	Kemampuan mengemukakan pendapat	Kerjasama		

Keterangan : nilai maksimal : 20

Lembar Observasi Diskusi Kelompok

No	Nama Siswa	Aspek yang Dinilai						Skor/Jumlah
		1	2	3	4	5	6	

Aspek yang dinilai :

- Kemampuan menyampaikan pendapat
- Kemampuan memberikan argumentasi

- Kemampuan memberikan kritik
- Kemampuan mengajukan pertanyaan
- Kemampuan menggunakan bahasa yang baik
- Kelancaran berbicara

Penskoran :

- Tidak baik Skor 1
- Kurang baik Skor 2
- Cukup baik Skor 3
- Baik Skor 4
- Sangat baik Skor 5

Jumlah Skor

- 24 – 30 = Sangat baik
- 18 – 23 = Baik
- 12 – 17 = Cukup
- 6 – 11 = Kurang

Format penilaian proses diskusi

No	Nama Siswa	Kriteria Penilaian					Jumlah Skor
		1	2	3	4	5	
1							
2							
dst							

Keterangan :

- Aktivitas dalam kelompok
- Tanggung jawab individu
- Pemikiran
- Keberanian berpendapat
- Keberanian tampil

Rentang skor

- 2 – 15 = Sangat baik
- 9 – 11 = Baik
- 6 – 8 = Cukup
- 3 – 5 = Kurang

Mengetahui:
Kepala Sekolah

Seyegan, 11 Januari 2010
Guru bidang studi



Drs. PAIMAN DARSIH
NIP.19510904 197603 1 004

SUNARYA, SPd.
NIP19650925 2000 1 001

**RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
NO : 09.**

I. Identitas

Nama Sekolah : SMA Islam 1 Gamping
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas /program : X/ Semua
Semester : I
Alokasi waktu : 2 x 45 menit
Standar Kompetensi : Menampilkan sikap positif terhadap hukum dan peradilan nasional

Kompetensi dasar : 2.5. Peran serta dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia

Indikator :

- Menunjukkan contoh sikap anti korupsi
- Menunjukkan contoh gerakan atau organisasi anti korupsi
- Menganalisis macam-macam perbuatan anti korupsi
- Menampilkan peran serta dan sikap anti korupsi

II. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran peserta didik dapat

1. Menunjukkan contoh sikap anti korupsi
2. Menunjukkan contoh gerakan atau organisasi anti korupsi
3. Menganalisis macam-macam perbuatan anti korupsi
4. Menampilkan peran serta dan sikap anti korupsi

III. Materi Pembelajaran

- Ciri-ciri korupsi menurut Shed Husein Alatas sebagai berikut :

1. korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang
2. korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia
3. korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik, yang tidak senantiasa berupa uang
4. mereka yang mempraktekkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum
5. korupsi mengandung penipuan pada badan publik atau masyarakat umum
6. setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan
7. setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan

- Faktor-faktor penyebab korupsi:

1. lemahnya pendidikan agama dan etika
2. kurangnya pendidikan
3. kemiskinan
4. tidak adanya sanksi yang tegas
5. struktur pemerintahan
6. perubahan radikal
7. keadaan masyarakat

- Selo Sumarjan menyatakan faktor-faktor sosial pendukung KKN adalah

1. desintegrasi sosial karena perubahan sosial terlalu cepat sejak revolusi nasional dan melemahnya batas milik negara dan milik pribadi
2. fokus budaya bergeser, nilai utama orientasi sosial beralih menjadi orientasi harta. Kaya tanpa harta menjadi kaya dengan harta
3. pembangunan ekonomi menjadi panglima pembangunan bukan pembangunan sosial atau budaya
4. penyalahgunaan kekuasaan negara sebagai short cut mengumpulkan harta

5. paternalisme, korupsi tingkat tinggi menurun, menyebar, meresap dalam kehidupan masyarakat
6. pranata-pranata sosial kontrol tidak efektif lagi

IV. Metode pembelajaran

- a. Ceramah bervariasi
- b. Diskusi
- c. Latihan
- d. Penugasan
- e. observasi

V. Langkah-langkah pembelajaran

NO	Kegiatan	Alokasi waktu	Keterangan.
1.	Pendahuluan - Memberikan salam siswa mengabsen dan mengetahui kondisi siswa - Menginformasikan SK, KD, tujuan pembelajaran dan bahan ajar yang harus dikuasai kompetensinya.	10'	
2.	Kegiatan Inti • Menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai • Penjelasan materi tentang gerakan anti korupsi • Guru menugaskan secara individu kepada siswa untuk memberikan contoh sikap anti korupsi • Guru menugaskan secara individu kepada siswa untuk memberikan contoh organisasi/ gerakan anti korupsi Guru menugaskan siswa untuk mencari dan menganalisis gambar yang menunjukkan sikap anti korupsi/ atau gerakan/ organisasi anti korupsi	70' 5' 5' 10'	 TMT TMT TMTT
3.	Kegiatan Penutup • Refleksi • Siswa dan guru membuat rangkuman tentang budaya politik.		

VI. SUMBER BELAJAR

1. Buku Paket PKn Kelas X
2. UUD 1945 yang Telah Diamandemen
3. Modul PKN dari MGMP PKN
4. diktat PKn kelas X, Sri Purwati, SMA kalasan
5. Internet, <http://www.google.co.id/search>
6. Internet, <http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum>

VII. PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT

Pilihlah salah satu jawaban yang tepat!

1. Negara Indonesia adalah sebagai negara terkorup didunia, bahkan menurut penelitian TII (Transparency International Indonesia) menduduki rangking ke 6 dari 133 negara, maka sikap kita sebagai warganegara Indonesia adalah, *kecuali....*
 - A. Bersikap terbuka
 - B. Jujur
 - C. Menghindari penyalahgunaan wewenang
 - D. Melaporkan bila ada indikasi korupsi disekitar kita
 - E. Membiasakan diri menyuap dalam mencari pekerjaan

2. Pemerintah dalam menyelesaikan perkara korupsi membentuk suatu badan yang disebut...

A. KPK	C. DPR	E. MK
B. BPK	D. MA	
3. Kewenangan KPK dalam menjalankan tugas berpedoman pada undang-undang yaitu ...

A. No 30 /2002	C. No 35/1999	E. No 14/ 1994
B. No 14 / 1970	D. No 4/ 2004	
4. Berikut ini bukan asas- asas komisi pemberantasan korupsi ...

A. Musyawarah mufakat	D. Kepentingan umum
B. Proporsionalitas	E. Akuntabilitas
C. Keterbukaan	
5. Membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif adalah asas KPK yaitu...

A. Musyawarah mufakat	D. Proporsional
B. Akuntabilitas	E. Kepentingan umum
C. Keterbukaan	
6. Berikut ini adalah badan badan anti korupsi kecuali...

A. Tim pemberantas korupsi	D. Komisi pemberantasan korupsi
B. Badan pemberantas korupsi	E. Tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi
C. Komite anti korupsi	
7. Peranserta masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi harus ada...

A. Saran dan prasarana yg memadai	D. Jaminan keamanan dari pemerintah
B. Sarana administrasi yang lengkap	E. Jaminan ekonomi dari pemerintah
C. Kesiapan mental dari masyarakat	
8. Mengapa tindak pidana korupsi banyak dilakukan oleh para pejabat publik atau pejabat pemerintah? Karena...

A. Mengikuti sistem lingkungan yang korupsi	C. Pejabat sering disuap
B. Pejabat memerlukan banyak uang	D. Kekuasaan cenderung korup
	E. Wewenang pejabat besar
9. Berikut ini adalah wewenang KPK...


A. Penyelidikan	D. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan
B. Penyidikan	E. Pemeriksaan, penyitaan harta hasil korupsi
C. Penuntutan	
10. Susunan hakim pada pengadilan tipikor dilaksanakan oleh majelis hakim yang beranggotakan...orang hakim


A. 4 orang
B. 5 orang
C. 6 orang
D. 7 orang
E. 8 orang

4.Kunci jawaban

1.E	2.A	3.A	4.A	5.C
6.B	7.C	8.D	9.D	10.B

Setiap jawaban yang benar nilai 1, nilai tertinggi 10

Mengetahui
Kepala Sekolah

Drs. Eddy Sulistianto
NIP. 19560720 198603 1 006

Gamping, 21 Juli 2010
Guru M. Pelajaran

Drs. Kaswadi
NIP. 19660403 200701 1 025

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

1. Mata Pelajaran : PKN
2. Materi Pokok : Pancasila sebagai Sumber Nilai.
3. Kelas : XI (IPS)
4. Alokasi waktu : 2 x 45 (2 jam pelajaran)

A. Standar Kompetensi :

Menampilkan sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka.

B. Kompetensi dasar :

Menganalisis Pancasila sebagai sumber nilai dan paradigma pembangunan.

C. Indikator

1. Menganalisis Pancasila sebagai sumber nilai
2. Mendeskripsikan Pancasila dasar negara dan pandangan hidup.
3. Menyebutkan Pancasila sebagai paradigma pembangunan.

D. Tujuan pembelajaran :

1. Siswa dapat menjelaskan Pancasila sebagai sumber nilai
2. Siswa dapat membandingkan fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup
3. Siswa dapat mendeskripsikan Pancasila sebagai paradigma pembangunan.

E. Metode Pembelajaran

1. Ceramah
2. Diskusi

Rangkaian Langkah Pembelajaran

No	Kegiatan belajar	Waktu	Aspek life skill yang dikembangkan
1.	Pendahuluan - Memberikan salam siswa - Mengetahui peserta didik yang hadir	15'	- Disiplin - Kerja sama - Kebersihan
2.	Kegiatan inti - Menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai - Penjelasan materi - Tanya jawab - Latihan	55'	- Kerja sama - Keragukan - Disiplin - Uji diri
3.	Penutup - Evaluasi - Penugasan	20'	Pengendalian diri

G. Sumber belajar

1. Buku Paket II
2. UUD 1945 yang telah diamandemen
3. Buku sumber lain

H. Penilaian dan tindak lanjut

1. Teknik penilaian : Tertulis
2. Bentuk : Pilihan ganda

EVALUASI

Pilihlah jawaban yang paling tepat dibawah ini dengan memberi tanda silang pada huruf A, B, C, D dan E

1. Yang dimaksud pelaksanaa Pancasila secara objektif adalah....
 - a. Pelaksanaan secara apa adanya sesuai dengan realita yang ada.
 - b. Pelaksanaan Pancasila secara pribadi oleh orang setiap orang Indonesia.
 - c. Pelaksanaan yang tergantung pada objek atau bidang tertentu.
 - d. Pelaksanaan dengan mentaati ketentuan berdasar Pancasila dan UUD 1995.
 - e. Menjadikan Pancasila sebagai pedoman penyelenggaraan kehidupan.

2. Kebulatan tekad bangsa indonesia untuk menerima pancasila sebagai dasar negara dan ideologi sejak....
 - a. 17 agustus 1945.
 - b. 18 agustus 1945.
 - c. 28 oktober 1948.
 - d. 1 juni 1945.
 - e. 22 juni 1945.
3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa indonesia berarti pancasila merupakan....
 - a. Cita-cita dan tujuan bangsa indonesia.
 - b. Perjanjian luhur bangsa indonesia.
 - c. Pegangan dan pedoman hidup bangsa indonesia.
 - d. Dasar negara yang mengatur pemerintahan negara.
 - e. Sandaran hidup dan perilaku manusia indonesia.
4. Berikut adalah pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan politik, kecuali....
 - a. Politik berdasar moral ketuhanan.
 - b. Adanya etika politik yang bersarkan etika kemanusiaan.
 - c. Kedaulatan rakyat.
 - d. Musyawarah mufakat.
 - e. Politik berdasar kekuasaan.
5. Pancasila sebagai paradigma pembangunan pertahanan keamanan adalah....
 - a. Kekuatan perang yang tangguh.
 - b. Membentuk pakta pertahanan.
 - c. Sistem pertahanan rakyat semesta.
 - d. Kerjasama untuk pertahanan.
 - e. Politik perimbangan kekuatan

J. KUNCI JAWABAN

1. D
2. B
3. C
4. A
5. C

K. FORMAT PENILAIAN

1. Jawaban benar setiap soal nilainya 2
2. Jawaban salah setiap soal nilainya 0
3. Jawaban benar semua nilainya 10

Mengetahui
Kepala Sekolah

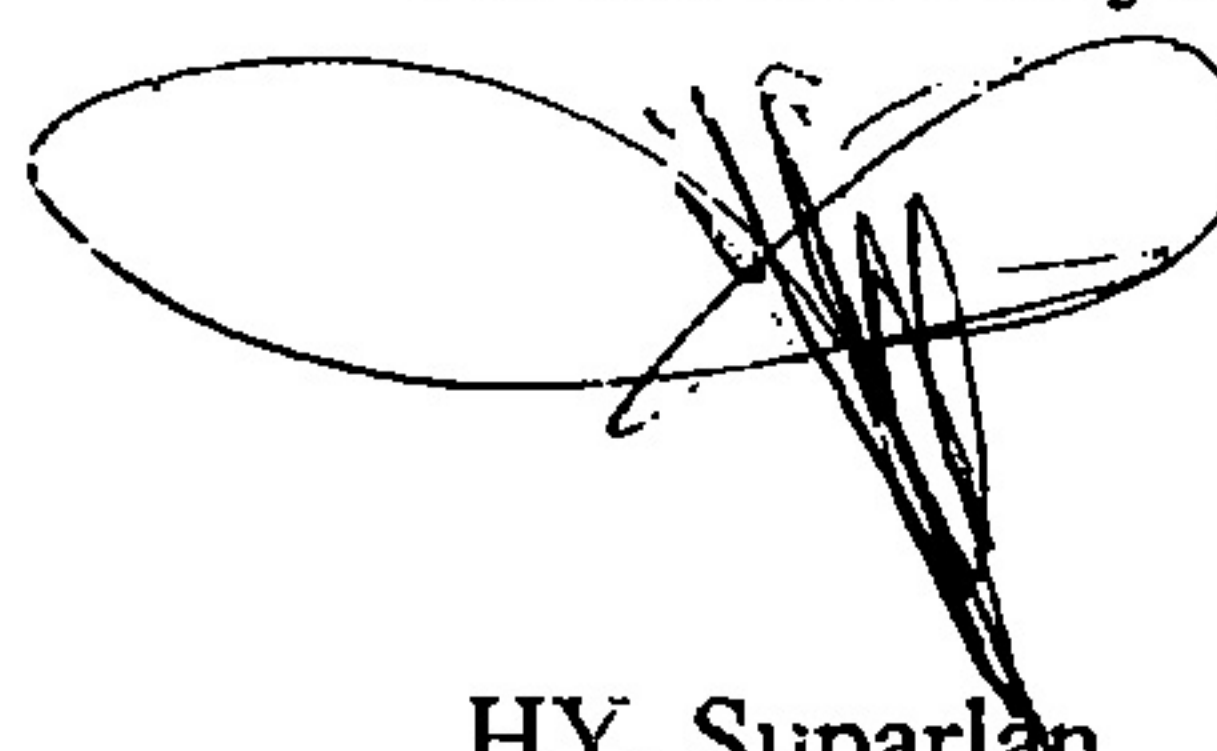


Nico Kanti Rahardjo

Minggir,

2011 ~~2008~~

Guru Mata Pelajaran



HY. Suparlan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
JURUSAN PKn & H
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI
Alamat: Karangmalang Yogyakarta, Telp. 0274-586168 Psw. 247

Nomor : 2025/PKn & H/2010
Hal : Permohonan izin Survey

13 Juli 2010

Kepada Yth : Kepala Sekolah
SMU N 1 Seyegan Sleman
Yogyakarta

Dengan hormat kami bermaksud memintakan izin mahasiswa atas nama :

Nama : Isti Nurwidayanti
NIM : 05401241033
Program Studi : Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum
Maksud/Tujuan : Survey /mencari data untuk Penelitian Tugas Akhir Skripsi
Judul Tugas Akhir : "Hambatan Guru Mata Pelajaran PKn Dalam Mengembangkan Silabus Rencana Pembelajaran dan Pelaksanaan Pembelajaran Berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di SMU N 1 Seyegan "

Atas perhatian kerjasama dan izin yang diberikan kami ucapkan terimakasih.



Pembantu Dekan I

Suhadi Purwantara, M.Si
NIP 19591129 198601 1001

Tembusan Yth :

1. Ketua Jurusan PKn & H
2. Ka.Subdik FISE
3. Mahasiswa Yang bersangkutan
FISE UNY



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814, 512243 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070/3282/V/2011

Membaca Surat : Dekan Fak. Ilmu Sosial & Ekonomi UNY

Nomor : 1605/H.34.14/PL/2011

Tanggal Surat : 20 April 2011

Perihal : IJIN PENELITIAN

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) kepada :

Nama : ISTI NURWIDAYANTI

NIP/NIM : 05401241033

Alamat : Karang Malang Yogyakarta

Judul : HAMBATAN GURU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MENGEMBANGKAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN BERDASARKAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN DI SMA SE KABUPATEN SLEMAN BARAT

Lokasi : Kab. Sleman

Waktu : 3 (tiga) Bulan.

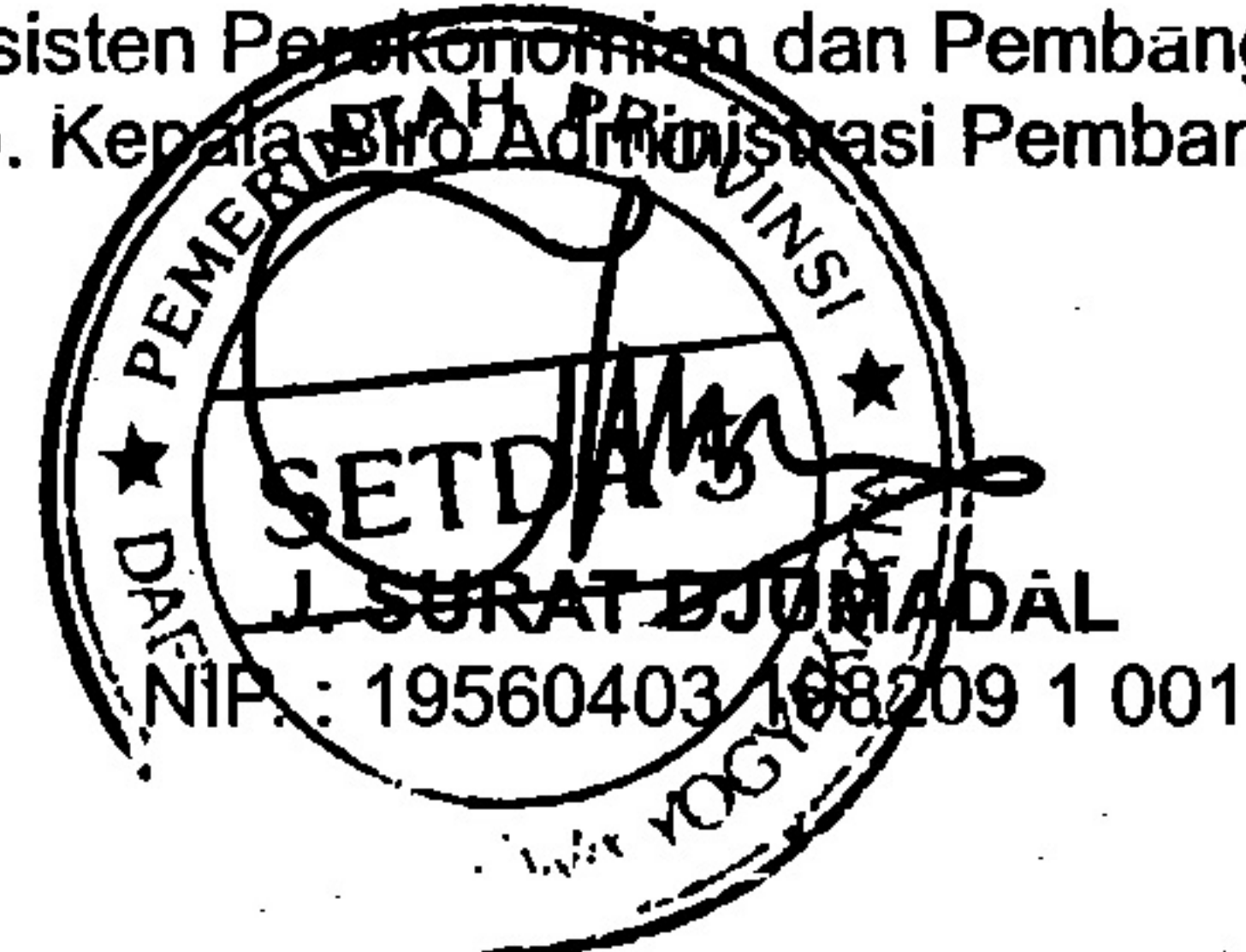
Mulai tanggal : 25 April 2011 s/d 25 Juli 2011

Dengan ketentuan :

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan **softcopy** hasil penelitiannya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam **compact disk (CD)** dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang dengan mengajukan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 25 April 2011

An. Sekretaris Daerah
Asisten Perencanaan dan Pembangunan
Ub. Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Bupati Sleman, Cq. Bappeda
3. Ka. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi DIY
4. Dekan Fak. Ilmu Sosial & Ekonomi UNY
5. Yang Bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(**BAPPEDA**)

Alamat : Jl. Parasamya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511
Telp. & Fax (0274) 868800. E-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 07.0 / Bappeda / 1112 / 2011

**TENTANG
PENELITIAN**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Keputusan Bupati Sleman Nomor: 55 /Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian.
Menunjuk : Surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 070/3282/V /2011 Tanggal: 25 April 2011 Hal : Izin Penelitian

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : **ISTI NURWIDAYANTI**
No. Mhs/NIM/NIP/NIK : 05401241033
Program/ Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : UNY
Alamat Instansi/Perguruan Tinggi : Karangmalang, Yogyakarta
Alamat Rumah : Semampir Kulon 06/18 Tambakrejo, Tempel, Sleman
No. Telp / HP : 085643103202
Untuk : Mengadakan penelitian dengan judul:
"HAMBATAN GURU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MENGEMBANGKAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN BERDASARKAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN DI SMA SE-KABUPATEN SLEMAN BARAT "
Lokasi : Kabupaten Sleman
Waktu : Selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal: **25 April 2011 s/d 25 Juli 2011.**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Wajib melapor diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Lurah Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Bappeda.*
4. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*
5. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

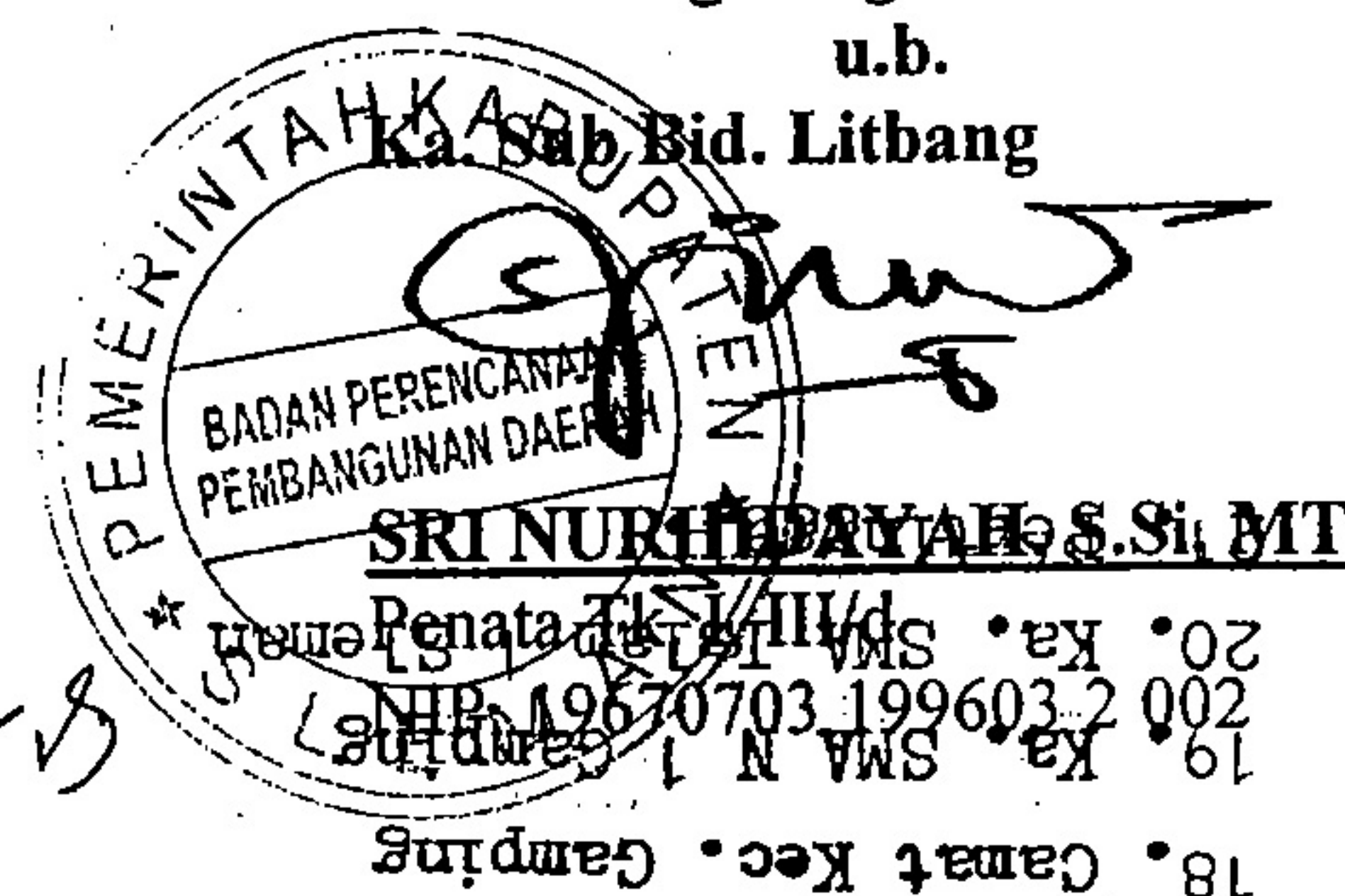
Dikeluarkan di : Sleman
Pada Tanggal : **28 April 2011**

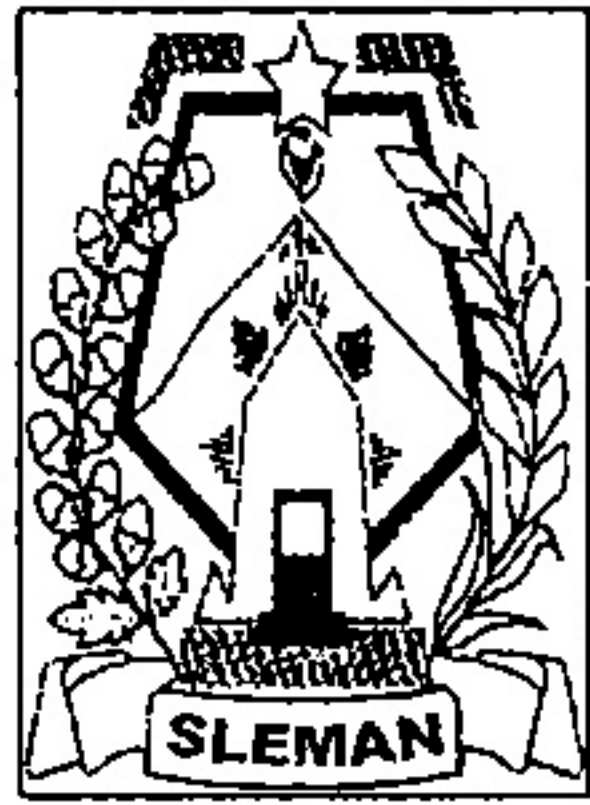
Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Ka. Badan Kesbanglinmas & PB Kab. Sleman
3. Ka. Dinas Pendidikan Pemuda & OR Kab. Sleman
4. Ka. Bid. Sosbud Bappeda Kab. Sleman
5. Camat Kec. Godean
6. Camat Kec. Minggir
7. Camat Kec. Seyegan
8. Camat Kec. Moyudan
9. Ka. SMA N 1 Godean
10. Ka. SMA N 1 Minggir
11. Ka. SMA N 1 Seyegan
12. Ka. SMA Budi Mulia Minggir
13. Ka. SMA Islam 2 Moyudan
14. Ka. SMA Muh Minggir
15. Ka. SMA Muh Moyudan
16. Ka. SMA Muh Seyegan

A.n. Kepala BAPPEDA Kab. Sleman
Ka. Bidang Pengendalian & Evaluasi
u.b.

Ka. Sub Bid. Litbang





PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
SMA NEGERI 1 SEYEGAN

Alamat : Margoagung Seyegan Sleman Yogyakarta No.Telp.08882744526

Website : www.sman1seyegan-yog.sch.id

E-mail : sma1seyegan@gmail.com

SURAT KETERANGAN

No : 423.1/

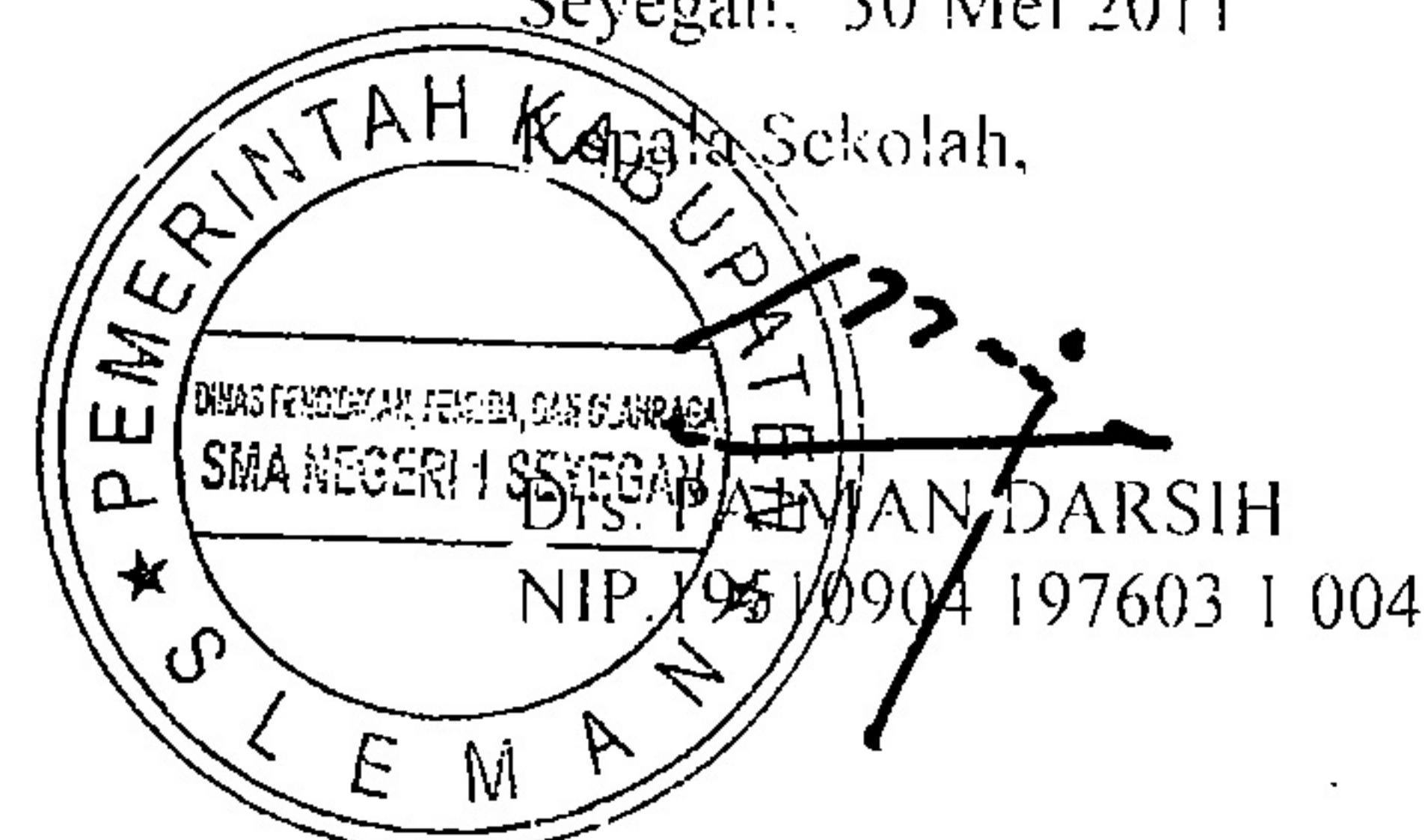
Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Seyegan Sleman menerangkan bahwa

Nama : ISTI NURWIDAYANTI
 NIM : 05401241033
 Program/Tingkat : S.I
 Jurusan : Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum
 Instansi/Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Yogyakarta
 Alamat Kampus : Karang Malang Yogyakarta
 Alamat Rumah : Semampir Kulon 06/18 Tambak rejo, Tempel,
 Sleman, Yogyakarta 55552

Benar-benar telah melaksanakan penelitian di SMA Negeri 1 Seyegan yang dilaksanakan pada Tanggal 3 Mei sampai dengan 14 Mei 2011 dengan judul
“ HAMBATAN GURU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MENGEMBANGKAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN BERDASARKAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN DI SMA SE KABUPATEN SLEMAN BARAT”

Demikian Surat keterangan ini kami sampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Seyegan, 30 Mei 2011





PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
SMA NEGERI 1 GODEAN

Jalan Sidokarto No. 5 Godean Sleman Yogyakarta 55564
Telepon (0274) 798128 Fak.649411

SURAT KETERANGAN

Nomor : 422 / **262**

Yang bertanda tangan dibawah ini Kami, Kepala SMA Negeri I Godean Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. menerangkan bahwa :

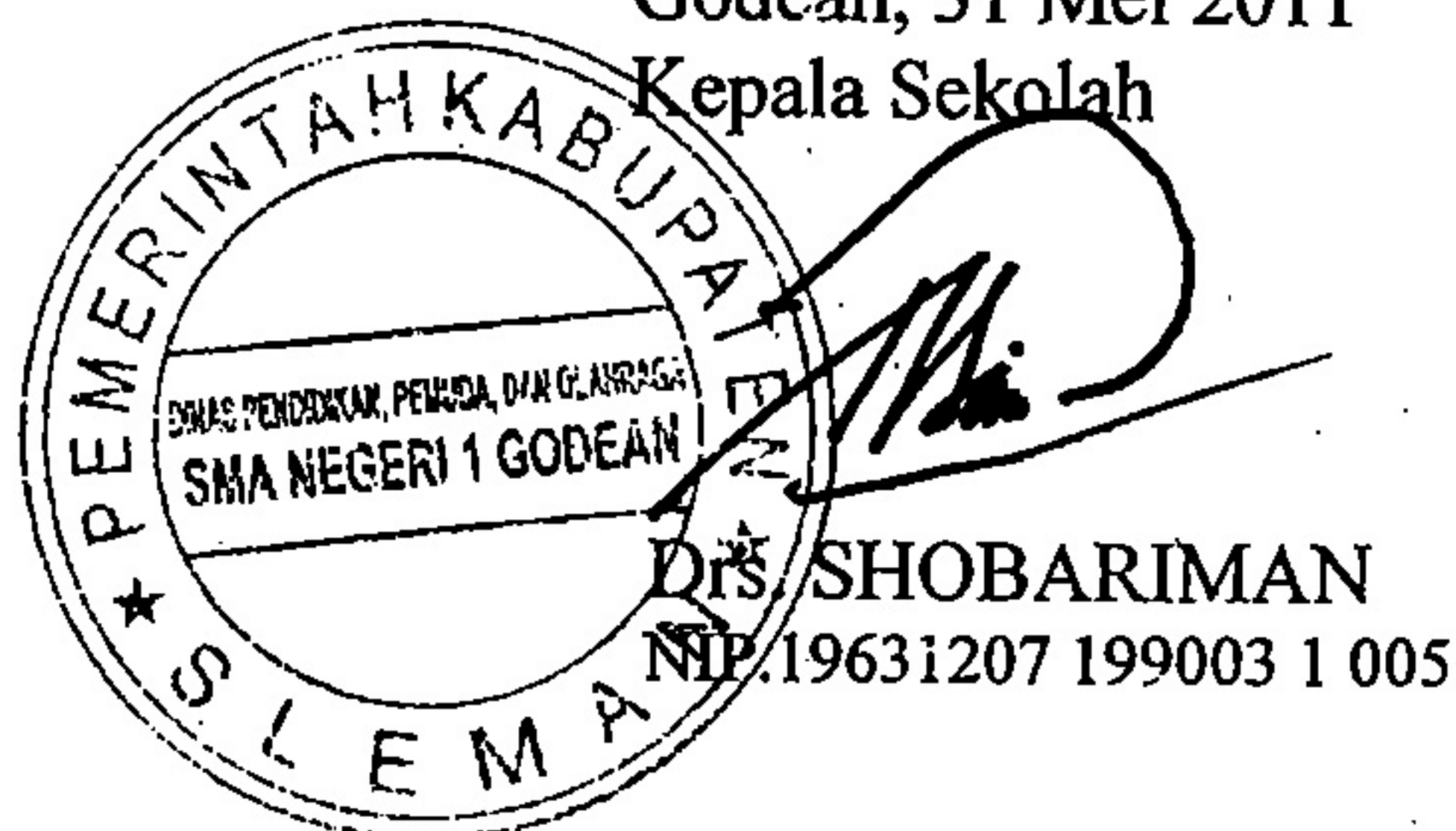
N a m a : ISTI NURWIDAYANTI
 NIM : 05401241033
 Jurusan / Prodi : Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum
 Fakultas : Ilmu Sosial dan Ekonomi
 Program / tingkat : S.1
 Instansi : UNY

telah melaksanakan penelitian di SMA Negeri 1 Godean pada tanggal 10, 11, 21, 24, 26, dan 29 Mei 2011

Demikian Surat Keterangan ini kami berikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Godean, 31 Mei 2011

Kepala Sekolah



Drs. SHOBARIMAN

NIP.19631207 199003 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
SMA NEGERI 1 GAMPING, SLEMAN**

Alamat : Tegalyoso, Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta, 55293 Telp.626345

SURAT KETERANGAN

Nomor : 423.1/ 245

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gamping, Sleman menerangkan bahwa :

Nama	: ISTI NURWIDAYANTI
NIM	: 05401241033
Program / Tingkat	: S1
Instansi / Perguruan Tinggi	: Universitas Negeri Yogyakarta
Alamat Instansi/Perguruan Tinggi	: Karangmalang, Yogyakarta
Alamat Rumah	: Semampir kulon 06/18 Tambakrejo, Tempel, Sleman
No. Telp/HP	: 085643103202

Telah mengadakan penelitian di SMA Negeri I Gamping Sleman mulai tanggal 13 Mei sampai dengan 31 Mei 2011 dengan judul :

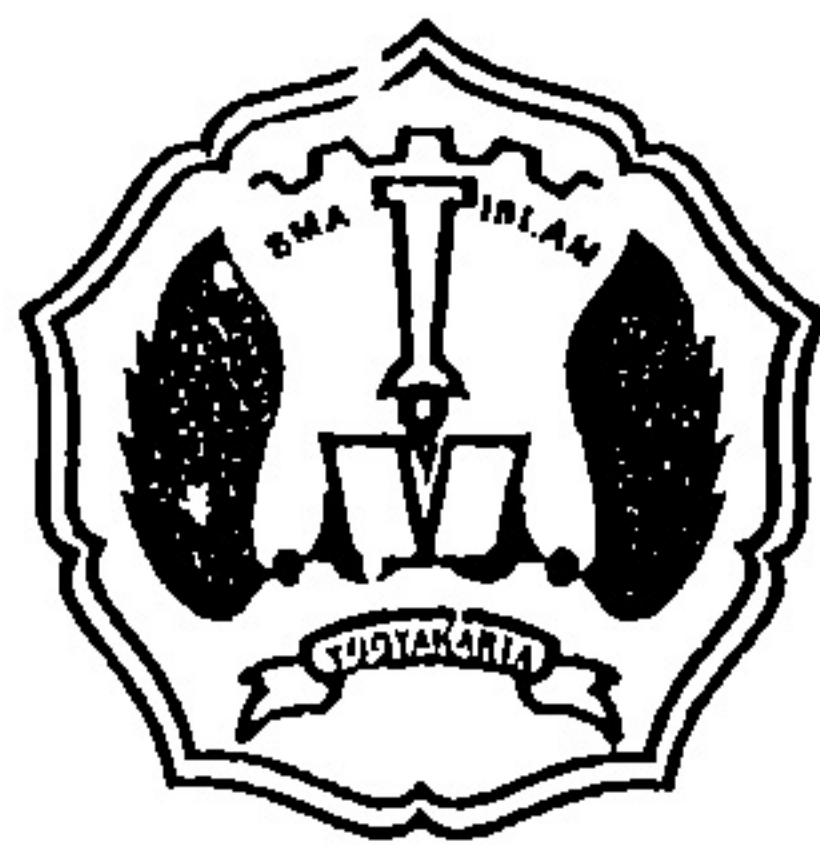
“HAMBATAN GURU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MENGEMBANGKAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN BERDASARKAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN DI SMA SE- KABUPATEN SLEMAN BARAT.”

Demikian surat keterangan ini agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



Gamping, 31 Mei 2011
Kepala Sekolah

Drs. YUNUS
NIP 19580927 198503 1 008



YAYASAN PEMBANGUNAN ISLAM YOGYAKARTA
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
SMA ISLAM - 1 GAMPING

TERAKREDITASI B

NOMOR : 19.01/BAP/TU/XII/2007

ALAMAT : JALAN WATES KM. 4 (0274) 617391, PELEMGURIH, YOGYAKARTA 55293

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No.: 070/I

Yang bertanda tangan dibawah ini kami Kepala SMA ISLAM I Gamping:

N a m a : Drs.EDDY SULISTIANTO
N I P : 19560720 198603 1 006
Pangkat, Gol : Pembina, IV/a
J a b a t a n : Kepala SMA ISLAM I GAMPING

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Saudara yang tersebut di bawah ini:

N a m a : ISTI NURWIDAYANTI
N I M : 05401241033
Jurusan : Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum
Prodi : P.Kn.
Fakultas : FISE

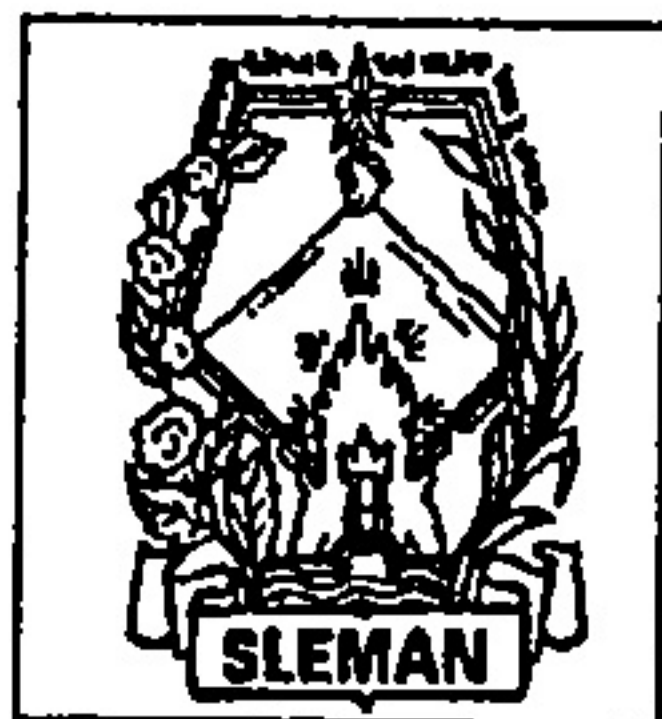
Telah melaksanakan penelitian di SMA ISLAM I GAMPING sejak 13 sd. 21 2011 dengan Judul Skripsi: "Hambatan Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan Pelaksanaan Pembelajaran Berdasarkan Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan di SMA se Kabupaten Sleman Barat.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Sleman, 27 Mei 2011
Kepala Sekolah

Eddy Sulistianto
NIP. 19560720 198603 1 006





PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 MINGGIR
Pakeran, Sendangmulyo, Minggir, Sleman, Yogyakarta 55562. Telepon (0274) 7111264

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 423.4 / 180

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Minggir Sleman, Yogyakarta menerangkan bahwa :

Nama : **ISTI NURWIDAYANTI**
NIM : **05401241033**
Program Tingkat : **S 1**
Instansi / Perguruan Tinggi : **Universitas Negeri Yogyakarta**
Alamat Instansi : **Karangmalang, Yogyakarta**

Telah melaksanakan Penelitian dengan judul :

“ HAMBATAN GURU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MENGEMBANGKAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN BERDASARKAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN DI SMA SE KABUPATEN SLEMAN “

Waktu : Sejak tanggal : **03 Mei 2011 s/d 14 Mei 2011**

Demikian untuk diketahui dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Minggir, 30 Mei 2011

Kepala Sekolah
Drs. SAMIJOL
NIP. 19610819 198903 1 007



YAYASAN WINAYAKA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SMA BUDI MULIA MINGGIR

alamat : Jl. Kebonagung Km. 24, Sendangagung, Minggir, Sleman, Yogyakarta, 55562
 Telp. 081392968980 / 08122602236

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No : 839/BM/V/2011

Yang bertanda tangan di bawah ini kami Kepala SMA Budi Mulia Minggir :

Nama : Yosep Sutarjo, S.Sos
 Jabatan : Kepala SMA Budi Mulia Minggir

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Saudara yang tersebut di bawah ini :

Nama : Isti Nurwidayanti
 NIM : 05401241033
 Jurusan : Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum
 Prodi : PKn
 Fakultas : Ilmu Sosial dan Ekonomi

Telah melaksanakan penelitian di SMA Budi Mulia Minggir sejak tanggal 03 sd. 11 Mei 2011 dengan judul skripsi : "Hambatan Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan Pelaksanaan Pembelajaran Berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di SMA se-Kabupaten Sleman Barat".

Demikian Surat Keterangan ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 28 Mei 2011



Kepala Sekolah

Yosep Sutarjo, S.Sos

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 335 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENGANGKATAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI**

Menimbang : a. Bahwa untuk pembimbingan Tugas Akhir Skripsi perlu ditetapkan pembimbingnya.
: b. Bahwa untuk keperluan di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 268 Tahun 1965
b. Nomor 93 Tahun 1999
4. Keputusan Mendiknas RI :
a. Nomor 274/O/1999
b. Nomor 003/O/2001
5. Surat Keputusan Rektor UNY
a. Nomor 207 Tahun 2000 tanggal 7 Juni 2000
b. Nomor 236 Tahun 2004 tanggal 31 Juli 2004
c. Nomor 532/H34014/KP/2007 tanggal 10 September 2007

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat pembimbing Tugas Akhir Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi tersebut di bawah ini, sebagai berikut :

Nama : **Ekram Pawiroputro, M.Pd.**

NIP : **19480512 198003 1 002**

Sebagai Pembimbing I

dalam menyusun Tugas Akhir Skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : **Isti Nurwidayanti**

NIM : **05401241033**

Jurusan/Prodi : **Pendidikan Kewarganegaraan Dan Hukum**

Judul : **"Hambatan Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan Pelaksanaan Pembelajaran Berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di SMA Se Kabupaten Sleman Barat"**

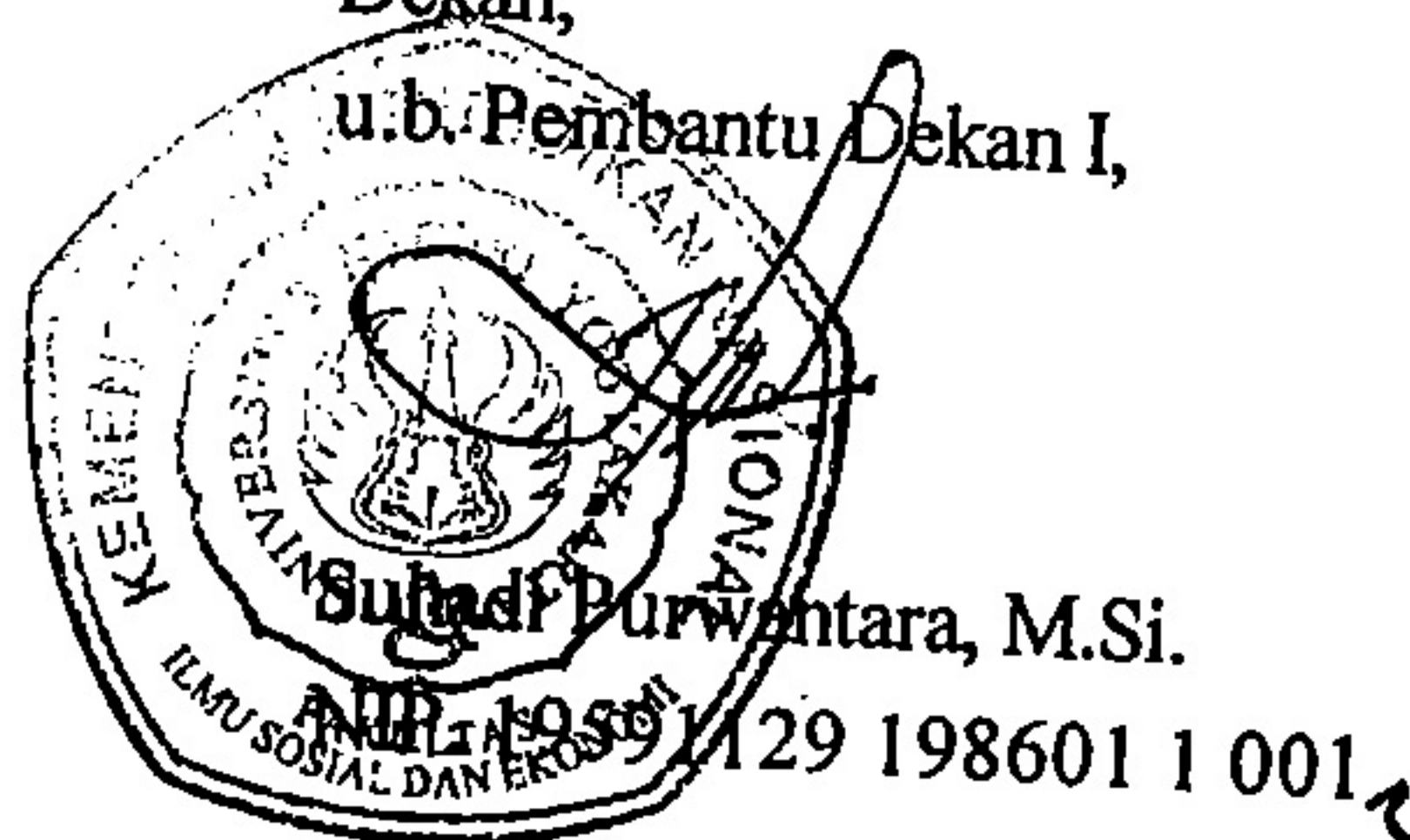
Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Tanggal : 20 April 2011

Dekan,
u.b. Pembantu Dekan I,



Suhad Purwantara, M.Si.

NIP. 19591129 198601 1 001

Tembusan Yth.

1. **Ekram Pawiroputro, M.Pd.**

2. **Isti Nurwidayanti**

Pembimbing I

Mahasiswa